

EKOLOGI MANUSIA



PENULIS :

**Mila Sari
Nurlita Pertiwi
Elsa Yuniarti
Gufran Darma Dirawan
Yosef Adicita
Marylin Susanti Junias
Nur Rohim Yunus
Suriani Nur
Fresy Nissia Lumowa**



EKOLOGI MANUSIA

**Mila Sari
Nurlita Pertiwi
Elsa Yuniarti
Gufran Darma Dirawan
Yosef Adicita
Marylin Susanti Junias
Nur Rohim Yunus
Suriani Nur
Fresy Nissia Lumowa**



PT GLOBAL EKSEKUTIF TEKNOLOGI

EKOLOGI MANUSIA

Penulis :

Mila Sari
Nurlita Pertiwi
Elsa Yuniarti
Gufran Darma Dirawan
Yosef Adicita
Marylin Susanti Junias
Nur Rohim Yunus
Suriani Nur
Fresy Nissia Lumowa

ISBN : 978-623-198-443-2

Editor : Dr. Neila Sulung, S.Pd., Ns., M.Kes.

Penyunting : Tri Putri Wahyuni, S.Pd

Desain Sampul dan Tata Letak : Atyka Trianisa, S.Pd

Penerbit : PT GLOBAL EKSEKUTIF TEKNOLOGI

Anggota IKAPI No. 033/SBA/2022

Redaksi :

Jl. Pasir Sebelah No. 30 RT 002 RW 001
Kelurahan Pasie Nan Tigo Kecamatan Koto Tangah
Padang Sumatera Barat

Website : www.globaleksekutifteknologi.co.id

Email : globaleksekutifteknologi@gmail.com

Cetakan pertama, Juni 2023

Hak cipta dilindungi undang-undang
Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk
dan dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Segala Puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT dalam segala kesempatan. Sholawat beriring salam dan doa kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah atas Rahmat dan Karunia-Nya penulis telah menyelesaikan Buku Ekologi Manusia ini.

Buku Ini Membahas Ekologi dan Ekologi Manusia, Interaksi Manusia-Ekosistem, Etika lingkungan, Pengetahuan Adat dan Adat Masyarakat, Ekologi antropologi, Peranan lingkungan terhadap ekologi manusia, Ekologi politik, Menuju ketahanan sosial dan ekologi, Manajemen Sumber Daya Manusia.

Proses penulisan buku ini berhasil diselesaikan atas kerjasama tim penulis. Demi kualitas yang lebih baik dan kepuasan para pembaca, saran dan masukan yang membangun dari pembaca sangat kami harapkan.

Penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung dalam penyelesaian buku ini. Terutama pihak yang telah membantu terbitnya buku ini dan telah mempercayakan mendorong, dan menginisiasi terbitnya buku ini. Semoga buku ini dapat bermanfaat bagi masyarakat Indonesia.

Padang, Juni 2023

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR GAMBAR	vi
BAB 1 EKOLOGI DAN EKOLOGI MANUSIA	1
1.1 Ekologi.....	1
1.1.1 Pengertian Ekologi.....	1
1.1.2 Ruang Lingkup	1
1.1.3 Aspek dan Prinsip Ekologi.....	3
1.1.4 Manfaat Ekologi.....	3
1.1.5 Jenis Ekologi.....	5
1.2 Ekologi Manusia	6
1.2.1 Awal Mula Ekologi Makhluk Hidup.....	7
1.2.2 Hubungan Antara Sistem Sosial dengan Ekosistem	8
1.2.3 Ekologi Manusia Menurut Para Ahli	10
1.2.4 Fungsi Manusia	10
DAFTAR PUSTAKA	12
BAB 2 INTERAKSI MANUSIA-EKOSISTEM.....	15
2.1 Konsep Dasar Ekosistem.....	15
2.2 Permasalahan Ekosistem Alami Akibat Aktivitas Manusia	18
2.3 Permasalahan Ekosistem Buatan Akibat Aktivitas Manusia	21
2.4 Pembangunan Berkelanjutan Untuk Perlindungan Ekosistem.....	22
2.4.1 Penyediaan Air Bersih dan Sanitasi	23
2.4.2 Penyediaan Energi Bersih yang Terjangkau	24
2.4.3 Perwujudan Kota dan pemukiman yang Berkelanjutan.....	25
2.4.5 Ekosistem Laut.....	26
2.4.6 Ekosistem Darat	27

2.5 Penutup	28
DAFTAR PUSTAKA	29
BAB 3 ETIKA LINGKUNGAN	31
3.1 Defenisi Etika Lingkungan.....	31
3.2 Prinsip-Prinsip Etika pada Lingkungan Hidup.....	34
3.3 Penerapan Prinsip-Prinsip Etika Lingkungan dalam Upaya Pelestarian Lingkungan Hidup	36
DAFTAR PUSTAKA	40
BAB 4 PENGETAHUAN ADAT DAN ADAT MASYARAKAT	41
4.1 Pendahuluan.....	41
4.2 Landasan Teori	43
4.2.1 Definisi dan Karakter Masyarakat Adat.....	43
4.2.2 <i>Property Rights</i> Adat dan Masyarakat Adat.....	46
4.2.3 Private Proverty Rights and Market Prices	52
4.2.4 Institusional Issue	54
4.3 Kesimpulan	56
DAFTAR PUSTAKA	57
BAB 5 EKOLOGI ANTROPOLOGI	59
5.1 Pendahuluan.....	59
5.1.1 Pengertian Ekologi dan Antropologi	59
5.1.2 Kaitan Antara Ekologi dan Antropologi.....	60
5.1.3 Tujuan Penulisan Artikel.....	61
5.2 Konsep Ekologi	62
5.2.1 Pengertian ekologi dan ruang lingkupnya	62
5.2.2 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Ekosistem.....	64
5.2.3 Dampak Perubahan Lingkungan terhadap Ekologi.....	65
5.3 Konsep Antropologi	67
5.3.1 Dampak aktivitas manusia terhadap lingkungan .	68
5.3.2 Pengaruh kebudayaan terhadap lingkungan	69
5.4 Hubungan antara Ekologi dan Antropologi.....	71
5.4.1 Konsep Ekologi Budaya	71

5.4.2 Konsep adaptasi manusia terhadap lingkungan ...	72
5.4.3 Pengaruh kebudayaan terhadap adaptasi manusia	73
5.5 Studi Kasus	74
5.5.1 Hubungan antara Ekologi dan Antropologi pada Masyarakat Adat di Indonesia.....	74
5.5.2 Contoh Dampak Perubahan Lingkungan terhadap Kehidupan Manusia	75
5.5.3 Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Budaya pada Masyarakat Adat	77
5.6 Implikasi dan Dampak.....	78
5.6.1 Implikasi dari kaitan antara ekologi dan antropologi	78
5.6.2 Dampak Kebijakan Lingkungan Terhadap Masyarakat	79
5.6.3 Dampak Lingkungan Terhadap Kebudayaan Manusia	81
5.7 Kesimpulan	83
5.7.1 Ringkasan Mengenai Kaitan antara Ekologi dan Antropologi.....	83
4.7.2 Implikasi dan Dampak yang Perlu Diperhatikan ..	84
DAFTAR PUSTAKA	87

BAB 6 PERANAN LINGKUNGAN TERHADAP

EKOLOGI MANUSIA.....	89
6.1 Pengertian Lingkungan Hidup.....	89
6.2 Pengertian Ekologi Manusia.....	92
6.3 Peranan Lingkungan Terhadap Ekologi Manusia.....	101
DAFTAR PUSTAKA	104

BAB 7 EKOLOGI POLITIK..... 107

7.1 Pendahuluan.....	107
7.2 Pengertian Dasar Ekologi Politik.....	109
7.3 Teori Ekologi Politik.....	112
7.4 Isu Lingkungan dan Kebijakan.....	115

7.5 Kelompok Kepentingan dalam Ekologi Politik.....	119
7.6 Penutup	122
DAFTAR PUSTAKA	125
BAB 8 MENUJU KETAHANAN SOSIAL DAN EKOLOGI.....	129
8.1 Pendahuluan.....	129
8.2 Ketahanan Sosial.....	136
8.3 Ketahanan Ekologi	139
DAFTAR PUSTAKA	147
BAB 9 MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA.....	149
9.1 Pendahuluan.....	149
9.2 Pengertian Manajemen Sumber Daya Manusia.....	150
9.3 Ruang Lingkup Manajemen Sumber Daya Manusia	150
9.4 Organisasi Dan Manajemen Pelayanan Kesehatan	155
9.5 Prinsip - Prinsip Organisasi	156
9.6 Organisasi Pelayanan Kesehatan.....	169
9.7 Penjaminan Mutu Pelayanan Kesehatan	172
9.8 Peran Komunikasi Pimpinan Dalam Proses Manajemen Sumber Daya Manusia	174
DAFTAR PUSTAKA	178
BIODATA PENULIS	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Jenis Ekosistem	16
Gambar 2.2. Karakteristik ekosistem danau	17
Gambar 2.3. Pilar Pembangunan Berkelanjutan	23
Gambar 2.4. Sektor Penyediaan Energi Listrik.....	25
Gambar 8.1. Hubungan Antargatra (Trigatra dan Pancagatra).....	134
Gambar 8.2. Pola Pikir - Wasantara, Tannas, Bangnas, serta Sismenas.....	135
Gambar 9.1. Unsur Organisasi.....	155

BAB 1

EKOLOGI DAN EKOLOGI MANUSIA

Oleh Mila Sari

1.1 Ekologi

1.1.1 Pengertian Ekologi

Ekologi dapat diartikan sebagai suatu cabang ilmu yang mempelajari tentang interaksi makhluk hidup atau kelompok makhluk hidup dengan lingkungannya. Istilah ekologi sering dianggap sebagai istilah asing yang jarang didengar oleh masyarakat. Bahkan, kebanyakan orang menganggap ekologi sama dengan ekosistem, padahal sebenarnya berbeda.

Ecology / ekologi, diperkenalkan oleh seorang ahli biologi dari Jerman yang bernama Ernst Heinrich Philipp August Haeckel atau biasa dikenal sebagai Ernst Haeckel. Secara etimologis, ekologi berasal dari bahasa Yunani yaitu *oikos* dan *logos*. *Oikos* memiliki arti sebagai habitat sedangkan *logos* berarti ilmu.

1.1.2 Ruang Lingkup

Ilmu ekologi secara umum mempelajari tentang interaksi organisme dengan lingkungan hidup di sekitarnya. Ruang lingkup ekologi pada dasarnya terbatas pada beberapa hal, seperti misalnya individu, populasi, komunitas, ekosistem, dan biosfer.

a. Individu

Individu merupakan satuan organisme dari setiap jenis atau spesies tertentu pada suatu lingkungan. Contoh

individu adalah seorang manusia, seekor ikan, seekor burung, dan lain sebagainya.

b. Populasi

Populasi adalah suatu kelompok dari individu-individu sejenis yang berada di suatu tempat tertentu dan pada waktu tertentu. Contoh dari populasi adalah populasi manusia, populasi burung, populasi rumput, dan masih banyak lagi populasi lainnya.

c. Komunitas

Komunitas adalah suatu kelompok makhluk hidup yang terdiri atas beberapa populasi dan saling melakukan interaksi antara satu dengan yang lainnya pada suatu tempat dan waktu tertentu. Contoh komunitas, misalnya komunitas padang rumput. Pada komunitas padang rumput terdapat populasi rumput, populasi belalang, populasi burung, populasi ular, dan populasi lainnya.

d. Ekosistem

Ekosistem adalah suatu kondisi terjadinya hubungan timbal balik dan hubungan saling ketergantungan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Contohnya seperti ekosistem hutan dan ekosistem air laut.

f. Biosfer

Biosfer adalah tingkatan organisasi biologi yang paling besar dan di dalamnya terdapat semua kehidupan yang ada di bumi. Di dalam biosfer terdapat pula interaksi antara lingkungan fisik secara keseluruhan.

g. Lanskap

Ekologi lanskap fokus terhadap faktor yang mengendalikan pertukaran energi, materi dan organis dalam suatu ekosistem.

h. Global

Ruang lingkup bertumpu pada pertukaran energi regional dan pengaruh materi terhadap fungsi dan distribusi organisme pada tingkatan biosfer.

1.1.3 Aspek dan Prinsip Ekologi

Dari pengertian ekologi dan ruang lingkup untuk mempelajari interaksi makhluk hidup dan lingkungannya, terdapat beberapa aspek dan prinsip yang perlu diperhatikan, antara lain:

1. Aspek Utama Ekologi, aspek penting dalam mempelajari ekologi adalah:
 - a. Studi mengenai hubungan organisme/kelompok organisme dengan lingkungannya
 - b. Studi mengenai hubungan organisme/kelompok organisme dengan lingkungannya.
 - c. Studi mengenai struktur dan fungsi alam.
2. Prinsip Utama Ekologi, prinsip dalam ekologi meliputi sebagai berikut:Adanya interaksi (*interaction*)Adanya saling ketergantungan (*interdependence*)
 - a. Adanya keanekaragaman (*diversity*)
 - b. Adanya keharmonisan (*harmony*)
 - c. Adanya kemampuan berkelanjutan (*sustainability*)

1.1.4 Manfaat Ekologi

Ekologi memiliki banyak manfaat bagi manusia dan lingkungan hidup. Berbagai manfaatnya adalah sebagai berikut:

- a. Mengetahui Keanekaragaman Hayati

Ekologi memberikan manfaat kepada manusia dalam memahami berbagai makhluk hidup serta hubungan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Misalnya, mengenai bagaimana seekor unta dapat bertahan hidup pada

lingkungan kering dan bersuhu tinggi dan bagaimana seekor penguin dapat bertahan hidup di lingkungan dengan suhu yang dingin.

b. Mengetahui Perilaku Makhluk Hidup

Ekologi memberikan manfaat kepada manusia untuk mengetahui perilaku makhluk hidup dan hubungannya dengan lingkungan. Misalnya, sistem sonar pada kapal selam yang meniru indera dari hewan kelelawar dan lumba-lumba sehingga dapat bermanfaat bagi manusia untuk menentukan target atau lokasi.

c. Mengetahui Peran Manusia Terhadap Lingkungan

Ekologi membuat manusia lebih mengetahui peran manusia terhadap lingkungannya. Seperti contohnya produk DDT yang bertujuan untuk memberantas hama, ternyata dapat mencemari lingkungan manusia dan juga organisme lainnya.

d. Pemetaan Konsumsi Pangan

Ekologi berguna untuk memetakan konsumsi pangan dan mengetahui struktur serta skala pangan dari setiap makhluk hidup. Misalnya, tumbuhan sebagai produsen dan hewan herbivora sebagai konsumen tingkat I. Selain itu, hewan karnivora berkedudukan sebagai konsumen tingkat II dan manusia sebagai konsumen tingkat III. Setelahnya, masih ada lagi hewan pengurai dan hasil dari pengurai tersebut dikonsumsi kembali oleh produsen sebagai sumber energi.

e. Solusi Masalah Pertanian

Ekologi dapat memecahkan berbagai macam masalah pertanian. Seorang petani membutuhkan beberapa mikroba yang dapat menghasilkan nitrat dan ammonium untuk menjaga kesuburan tanah.

f. Solusi Masalah Energi

Ekologi berguna untuk membantu manusia memastikan adanya ketersediaan energi untuk menunjang

kehidupannya. Misalnya, penggunaan energi alternatif dari tenaga surya dengan tujuan untuk menghasilkan energi listrik.

g. Solusi Masalah Kesehatan

Ekologi membantu manusia untuk memecahkan berbagai masalah kesehatan. Melalui ekologi maka manusia dapat mengetahui mengenai penyakit demam berdarah yang disebabkan oleh nyamuk *Aedes Aegypti*. Kondisi ini dapat diatasi dengan cara penanganan tertentu, misalnya dengan cara menguras tempat penampungan air agar nyamuk tidak bertelur di genangan air.

1.1.5 Jenis Ekologi

Ada beberapa jenis ekologi yang diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan manusia, yaitu:

- a. **Ekologi manusia** adalah cabang ekologi dengan fokus mempelajari tentang keadaan lingkungan hidup manusia.
- b. **Ekologi tumbuhan** adalah cabang ekologi yang mempelajari tentang tumbuhan sebagai suatu organisme dan memusatkan tumbuhan itu sendiri sebagai fokus dengan mengabaikan hewan dan manusia.
- c. **Ekologi hewan** memusatkan fokus pada hewan sebagai suatu organisme dengan mengabaikan manusia dan tumbuhan.
- d. **Ekologi perairan**, yaitu ilmu yang mempelajari hubungan antara organisme dengan lingkungan perairan, seperti sungai, waduk, muara dan laut.
- e. **Ekologi habitat** adalah cabang ekologi yang memusatkan fokusnya pada pembahasan mengenai sifat dari suatu habitat.
- f. **Ekologi populasi** adalah cabang ekologi yang berfokus mempelajari berbagai hubungan antara kelompok organisme dan jumlah individu. Ekologi populasi juga

mempelajari faktor penentu besarnya suatu populasi beserta penyebarannya.

- g. **Ekologi sosial** adalah cabang dari ekologi yang mempelajari hubungan antara manusia dengan lingkungan alam dan teknologi yang ada di sekitarnya.
- h. **Ekologi bahasa** mempelajari dan juga melakukan penyelidikan terhadap hubungan antara bahasa dengan lingkungan manusia.
- i. **Ekologi antariksa** mempelajari tentang ekosistem yang dapat menopang kehidupan manusia selama ada dalam penerbangan antariksa.

Jenis-jenis ekologi tersebut tentu dapat dipelajari sesuai dengan kebutuhan, sehingga pada akhirnya dapat digunakan untuk menjadikan kehidupan yang lebih baik.

1.2 Ekologi Manusia

Ekologi manusia merupakan ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara manusia dengan lingkungan hidupnya. Artinya, terdapat keterkaitan antara manusia dengan komunitas biologis (alam), maupun dengan komunitas sosial (masyarakat). Ekologi manusia dipelopori oleh pakar ilmu sosial, Auguste Comte (1800) tentang rekonstruksi sosial. Kajian sosial tentang penyebaran manusia dalam tata wilayah dipelajari dalam konteks ekologi manusia. Ekologi manusia menekankan penyebaran manusia dan variabel sosialnya dalam tata ruang sehingga kajiannya berkaitan dengan geografi. Saat ini, semua kajian berkaitan dengan ekologi manusia, seperti biologi, ekonomi, teknologi, psikologi, pertanian, hukum, Pendidikan, agama, kesehatan masyarakat.

1.2.1 Awal Mula Ekologi Makhluk Hidup

Dalam pengelolaan lingkungan dibutuhkan ekologi makhluk hidup yang mempelajari hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungan tempat tinggalnya. Salah satunya adalah ekologi manusia pada bagian dari autekologi, yaitu ekologi dari spesies tunggal (*homo sapiens*).

Saat manusia dilihat sebagai makhluk sosial, maka ekologi manusia dapat menggunakan sinekologi. Ekologi manusia adalah studi yang mengkaji dan mempelajari interaksi antara manusia dengan lingkungan. Sebagai bagian dari ekosistem, manusia merupakan makhluk hidup yang ekologi dominan, suatu istilah yang menyatakan bahwa makhluk hidup dapat mengendalikan proses dan interaksi dalam ekosistem atas kehendaknya. Hal ini dikarenakan manusia dapat berkompetensi secara baik dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

Secara analitik, lingkup ekologi manusia dibagi menjadi dua sistem, yaitu sistem alam dan sistem sosial. Kedua sistem tersebut saling berhubungan timbal balik secara terus-menerus dan teratur melalui aliran energi, materi, dan informasi sehingga terjadi proses seleksi dan adaptasi.

Lingkungan manusia didefinisikan sebagai segala sesuatu yang berada di sekitar manusia yang berpengaruh pada kehidupan manusia itu sendiri. Menurut Rambo (1983), faktor sistem biofisik atau ekosistem, yaitu berupa iklim, udara, air, tanah, tanaman, dan binatang.

Timbulnya perubahan hubungan interaksi manusia dan lingkungan sekitar disebabkan oleh faktor internal, yaitu pertumbuhan penduduk dan eksternal yang meliputi perkembangan ekonomi pasar, pembangunan, dan kebijakan pemerintah. Ekologi manusia dipelopori oleh para ilmuwan sosial yang salah satunya adalah Auguste Comte (1800) tentang rekonstruksi sosial.

1.2.2 Hubungan Antara Sistem Sosial dengan Ekosistem

Studi ekologi diketahui memiliki keterkaitan dengan masalah perilaku manusia dengan lingkungan sosialnya, maka teori perilaku mempengaruhi perkembangan studi ekologi manusia. Menurut Chaplin (dalam *Wawolumaya*, 2001), perilaku (*behavior*) merupakan suatu cara atau perbuatan yang layak bagi manusia. Menurut Sarwono (1992), perilaku pada hakikatnya merupakan tanggapan atau respons terhadap rangsangan (*stimulus*), dan rangsangan itulah yang memengaruhi tingkah laku.

Intervensi organisme terhadap stimulus respons dapat berupa kognisi sosial, persepsi, nilai, atau konsep. Perilaku adalah salah satu hasil dari peristiwa atau proses belajar. Proses tersebut adalah proses alami, sebab timbulnya perilaku harus dicari pada lingkungan eksternal manusia dan bukan dari dalam diri manusia itu sendiri.

Sarwono (1991:3) mengatakan bahwa perilaku merupakan perbuatan manusia, baik terbuka (*open behavior*) maupun yang tidak terbuka (*covert behavior*). Perilaku terbuka adalah perilaku yang langsung dapat ditangkap oleh indra misalnya menyapu, merokok, mengemudi, dan lain-lain. Perilaku yang tidak terbuka adalah tingkah laku yang tidak dapat ditangkap langsung oleh indra, misalnya motivasi, sikap, minat, dan emosi. Perilaku menyangkut hubungan antara tanggapan atau respons dengan rangsangan (*stimulus*).

Untuk meningkatkan tanggapan atau balasan dari rangsangan, dapat dilakukan dengan memberikan suatu efek yang menyenangkan bagi subjek yang memberikan tanggapan tersebut, sehingga apa yang dilakukan akan diulang lagi. Bell Gredler dalam *Alhadza* menjelaskan, seseorang akan melakukan tingkah laku baru dengan model yang menarik untuk ditiru. Sedangkan menurut Koswara, tingkah laku adalah hasil kekuatan yang ada dalam diri

individu dan kekuatan yang berasal dari lingkungan psikologis.

Lingkungan psikologi adalah seluruh fakta psikologis yang diketahui atau disadari oleh individu. Fakta psikologis tersebut membentuk keseluruhan dari pengetahuan individu dan merupakan kekuatan yang mempengaruhi tingkah laku. Pembentukan perilaku manusia terhadap lingkungan berhubungan dengan sikap dan nilai yang bersumber dari pengetahuan, perasaan, dan kecenderungan bertindak.

Oleh karena itu, tindakan manusia terhadap lingkungan dilakukan berdasarkan keputusan yang berasal dari informasi lingkungan dan dari latar belakang pengalaman serta sikap terhadap lingkungan. Pengelolaan sumber daya alam pada hakikatnya adalah pertimbangan-pertimbangan positif yang dilakukan dalam rangka membentuk dan membangun keserasian antara penduduk dan lingkungan (prawiroatmojo et al, 1988: 11).

Dari uraian di atas (Bell, 1978 dan Koswara, 1989) dapat disimpulkan bahwa ada beberapa tahapan bagaimana seseorang akan semakin baik berperilaku.

1. Tahap pengenalan. Pada tahap ini individu menerima informasi yang berkaitan dengan gagasan baru.
2. Tahap pendekatan. Pada tahap ini dapat dipergunakan oleh pemberi gagasan untuk meningkatkan motivasi agar bersedia menerima gagasan yang dimaksud.
3. Tahap pengambilan keputusan. Dalam hal ini maksudnya, individu memerlukan dukungan dari lingkungan atas keputusan yang diambilnya. Bila lingkungan memberikan dukungan, maka gagasan baru yang telah diadopsi tersebut tetap dipertahankan. Sebaliknya, bila tidak terdapat dukungan dari lingkungan, maka biasanya gagasan yang

diadopsi tersebut tidak jadi dipertahankan dan individu yang bersangkutan akan kembali lagi ke perilaku semula.

Perilaku adalah aktivitas manusia yang berupa penalaran, penghayatan, dan pengalaman dalam merespons lingkungannya. Dengan demikian, jika gagasan baru yang diperkenalkan kepada individu atau kelompok masyarakat bersifat menguntungkan, cocok dengan nilai dan norma yang ada, mudah untuk dipelajari maupun dipergunakan, serta mudah dikomunikasikan maka dapat diprediksi bahwa gagasan tersebut akan diterima oleh masyarakat.

1.2.3 Ekologi Manusia Menurut Para Ahli

Ekologi manusia adalah ilmu yang mempelajari rumah tangga manusia secara objektif atau apa adanya. Berikut adalah definisi ekologi manusia menurut para ahli:

- a. Amos H Hawley, "Ekologi manusia, dengan demikian bisa diartikan, dalam istilah yang biasa digunakan, sebagai studi yang mempelajari bentuk dan perkembangan komunitas dalam sebuah populasi manusia." (*Human ecology may be defined, therefore, in terms that have already been used, as the study of the form and the development of the community in human population*).
- b. Gerald L. Young, "dengan demikian ekologi manusia, adalah suatu pandangan yang mencoba memahami keterkaitan antara spesies manusia dan lingkungannya." (*Human ecology, then, is "an attempt to understand the inter-relationships between the human species and its environment*).

1.2.4 Fungsi Manusia

Manusia merupakan sosok yang memegang fungsi dan peranan penting dalam konteks lingkungan hidup. Namun, segala unsur kehidupan dan kesejahteraan manusia sangat bergantung

kepada komponen lain. Artinya, keberhasilan manusia dalam mengelola rumah tangga ditentukan oleh berhasilnya dalam mengelola makhluk hidup lainnya secara menyeluruh. Kelebihan yang manusia miliki adalah akal atau alam pikiran (*noosfer*). Dengan akal pikiran tersebut dapat menciptakan budaya serta dengan budayanya yang disebut *extra somatic tool* manusia mampu menguasai dan mengalahkan makhluk yang lebih besar dan menaklukkan alam yang dahsyat.

Masalahnya apabila *noosfer* dengan perilakunya digunakan untuk kepentingan kesejahteraan diri dan makhluk hidup lainnya, juga didukung oleh rasa tanggung jawab terhadap kelestarian kemampuan daya dukung lingkungannya, maka sejahteralah manusia dan makhluk hidup lainnya. Sebaliknya, dengan *noosfer* (*extra somatic tool*) yang dikembangkan manusia dalam mempermudah hidup dan memenuhi kebutuhan pokok (*primery biological needs*), manusia berpotensi memiliki sifat tamak, egois, dan serakah dalam mengeksploitasi sumber daya alam tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjangnya. Bahkan merasa dirinyalah yang paling menguasai dan memerlukan sumber daya alam itu, sehingga pada gilirannya justru mereka terancam hidupnya dan mengancam kehidupan makhluk hidup lain, kini, dan generasi mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, S. 2010. Ekologi Manusia. Bandung: Rosdakarya
- Capra, F. 2005. Ecology and Community. [Online]. Tersedia: <http://www.ecoliteracy.org/change/school-gardens>
- Capra, F. 2002. Jaring-Jaring Kehidupan. Yogyakarta: Fajat Pustaka Baru.
- Cushman, R. 2012. Green Behavior (Homo Ecologicus). [Online]. 16 halaman. Tersedia: http://engineering.dartmouth.edu/Benovit_R_Roisin/courses/engs44/GreenBehavior.pdf
- Abdoellah, Oekan. 2017. Ekologi Manusia dan Pembangunan Berkelanjutan. Jakarta: Gramedia.
- Farisy, Ahmad. 2015. Pengenalan Ilmu Lingkungan Hidup. Yogyakarta: PT Bentang Pustaka.
- Firdausi, Nurul. 2012. Ekosistem dan Ekologi. Jakarta: PT Gramedia Grafindo.
- Fromm Harlod, G. C. I. 1996. The ecocriticism reader. Athens: University of Georgia Press.
- Garrad, G. 2004. Ecocriticism. USA and Canada: Routledge.
- Odum, E. 1993. Dasar-dasar ekologi. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Sankaran, C., & Zhengwen, L. 2018. Ecology and indigeneity: an exploration of asean literatures. The Journal of Ecocriticism, 8(1), 1–4. <https://ojs.unbc.ca/index.php/joe/article/view/1626>
- Dwidjoseputro, D. 1991. Ekologi Manusia dengan Lingkungannya. Jakarta: Erlangga.
- Garrard, Greg. 2004. Ecocriticism: The New Critical Idiom. New York: Routledge.
- Glotfelty, Cheryll dan Harold Fromm. 1996. The Ecocriticism Reader: Landmarks in Literary Ecology. USA: University of Georgia Press.

- Goleman, Daniel. 2010. Kecerdasan Ekologis: Mengungkap Rahasia Di Balik Produk-Produk Yang Kita Beli (terj. Lina). Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Goleman, D., Lisa Bennett, dan Zenobia Barlow. 2012. Ecoliterate: How Educators are Cultivating Emotional, Social, and Ecological Intelligence. San Francisco: Jossey-Bass.

BAB 2

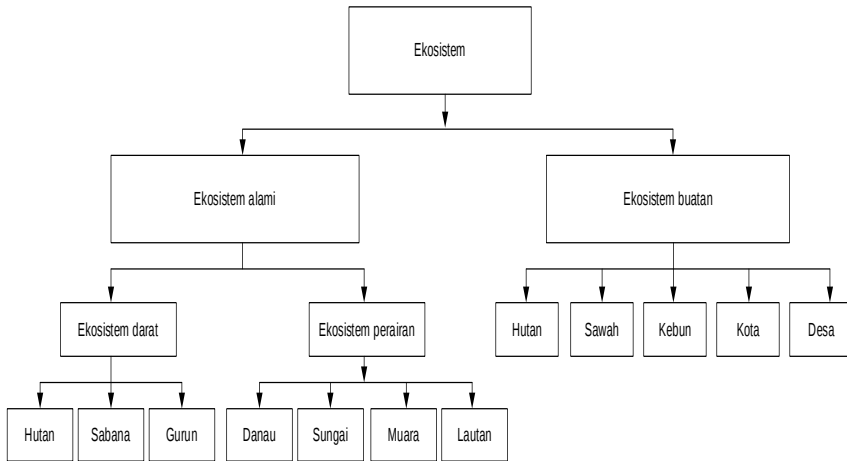
INTERAKSI MANUSIA-EKOSISTEM

Oleh Nurlita Pertiwi

2.1 Konsep Dasar Ekosistem

Ekosistem merupakan satuan fungsional antara makhluk hidup dengan lingkungan. Ekosistem terbentuk dengan adanya keterkaitan yang kuat antara makhluk hidup dan lingkungan. Interaksi yang berkembang dalam ekosistem bersifat dinamis dan kompleks yang terjadi secara simultan. Dalam ekosistem terdapat dua komponen utama yaitu biotik dan abiotik. Komponen biotik merupakan unsur yang bersifat tidak hidup namun mempengaruhi karakter suatu ekosistem. Secara umum, komponen biotik dapat berupa suhu, sinar matahari, air dan tanah. Namun komponen ini dapat berkembang sesuai dengan karakter ekosistem tersebut. Sedangkan faktor biotik berupa makhluk hidup yang tumbuh dan berkembang pada ekosistem dan aktivitasnya sangat tergantung dengan karakteristik unsur abiotik.

Secara umum ekosistem terdiri atas dua kelompok yaitu ekosistem alami atau ekosistem yang terbentuk secara alami. Sedangkan ekosistem buatan merupakan ekosistem yang terbentuk dan berkembang sesuai dengan kebutuhan manusia. Uraian ekosistem dan contohnya terungkap dalam gambar 2.1.

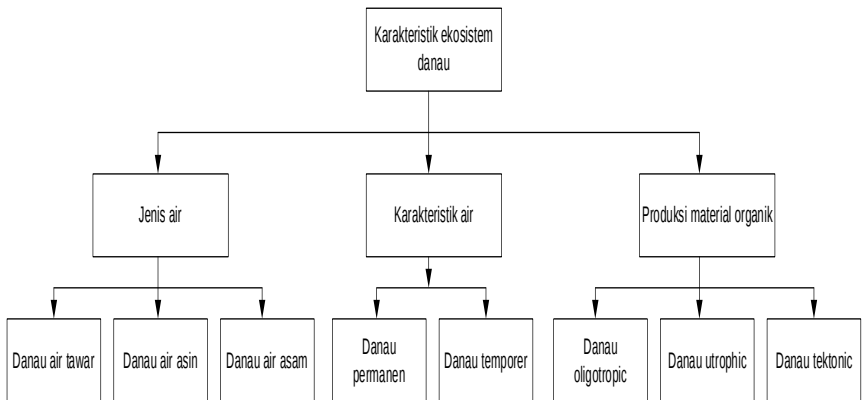


Gambar 2.1. Jenis Ekosistem

Setiap jenis ekosistem memiliki sifat dan komponen yang berbeda. Ekosistem hutan adalah ekosistem yang terbentuk dengan tutupan pohon serta berbagai organisme lain seperti tanaman kecil dan hewan. Komponen biotik pada hutan adalah hewan, tumbuhan, manusia sedangkan komponen abiotik dapat berbentuk tanah, kelembaban, sinar matahari, iklim. Dinamika ekosistem ini tergantung pada tingkat kepadatan pohon (*trees density*). Hutan yang baik terbentuk dengan kepadatan pohon yang tinggi serta ragam mahluk hidup yang berinteraksi di dalamnya.

Ekosistem danau adalah ekosistem air tawar yang terbentuk akibat adanya cekungan alami. Sifat danau sangat tergantung pada sinar matahari, suhu dan elevasi. Sedangkan mahluk hidup yang meruoakan unsur pembentuk danau adalah binatang seperti ikan, udang dan binatang air tawar lainnya. Sedangkan tumbuhan pembentuknya adalah alga, ganggang dan enceng gondok. Selain itu terdapat pula *fitoplankton* dan *zooplankton* dalam ekosistem danau. Pembangunan danau

berdasarkan jenis air, karakteristik air dan produksi material organiknya disajikan pada gambar 2.2.



Gambar 2.2. Karakteristik ekosistem danau

Ekosistem buatan berupa hutan produksi terbentuk oleh pohon atau tumbuhan lain yang memberikan manfaat ekonomi bagi manusia. sebagai hasil budidaya manusia. Hutan jenis ini umumnya bersifat homogen atau terdiri atas satu atau dua jenis pohon. Selanjutnya sawah merupakan ekosistem yang dibuat untuk menghasilkan bahan pangan untuk manusia. Ekosistem ini berupa lahan basah yang kondisi air dan tanahnya disesuaikan dengan kebutuhan dan pertumbuhan tanaman padi. Interaksi antara komponen biotik pada sawah berbentuk kelembaban air akibat jumlah air yang tergenang pada daerah cekungan. Selanjutnya intensitas sinar matahari berpengaruh terhadap suhu air. Interaksi antara unsur biotik dan abiotik pada sawah berbentuk keberadaan hama tanaman yang tergantung pada intensitas pestisida. Selanjutnya sinar matahari sebagai sumber energi untuk terjadinya fotosintesis tanaman padi.

2.2 Permasalahan Ekosistem Alami Akibat Aktivitas Manusia

Berbagai fakta kerusakan lingkungan alami telah terjadi di Indonesia dan beberapa negara lainnya akibat aktivitas manusia. Uraian berikut menunjukkan bahwa kerusakan ekosistem terjadi secara meluas dan harus diantisipasi sebagai upaya perlindungan bumi:

1. Habitat pada hutan lindung Sirimau di Kepulauan Maluku umumnya disebabkan oleh faktor alam (non antropogenik) dan faktor manusia (antropogenik). Bentuk kegiatan manusia yang menyebabkan kerusakan hutan berupa penebangan pohon dan pembakaran hutan. Aktivitas tersebut dilakukan untuk membuka lahan hutan dan mengubahnya sebagai lahan produktif berupa kebun dan permukiman. Kebiasaan antropogenik tersebut berdampak terhadap penurunan kualitas ekosistem hutan. Indikator kerusakan hutan lindung Sirimau ditandai dengan menimbulkan fragmentasi dan degradasi habitat yang diikuti dengan ketidakseimbangan gangguan kelimpahan dan keragaman semut. Unsur biotik ini memiliki peran penting dalam keseimbangan ekosistem hutan sekunder sehingga keberadaannya harus tetap dijaga sebagai bagian dari komponen pendukung ekosistem. (Latumahina *et al.*, 2015)
2. Kerusakan pohon pada hutan lindung di Kota Langsa akibat kegiatan wisata. Kerusakan tersebut terbagi atas enam bentuk yaitu kanker, luka terbuka, gerowong, brum, keropos kayu atau terserang rayap dan serangan dari cendawan. Hasil identifikasi menunjukkan bahwa terdapat kerusakan pada pohon jati dengan adanya Brum (cabang berlebihan). Kejadian ini terjadi akibat adanya perlukaan atau bekas sayatan benda tajam. Kerusakan

tersebut terjadi akibat kebiasaan manusia memberi tanda dengan cara melukai pohon. (Makhfirah *et al.*, 2021)

3. Kerusakan ekosistem hutan di Kelurahan Batu Besar, Kecamatan Nongsa Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau terjadi akibat aktivitas tambang. Hal ini terindikasi dengan hilangnya solum tanah akibat adanya lubang sedalam 15-20 m. Selain itu, pengangkatan tanah asli berdampak pada hilangnya vegetasi, dan bahkan kawasan ini telah berubah menjadi lahan terbuka tanpa vegetasi. Kerusakan yang lain terindikasi pada penurunan kandungan C organik serta hilangnya mikroorganisme tanah. Kerusakan ekosistem berdampak pada perubahan sifat fisik tanah, sifat kimia tanah dan biologi tanah. (Wasis, 2012)
4. Ekosistem sungai juga mengalami perubahan fisik, utamanya akibat adanya kegiatan permukiman. Sungai Sekanak, anak Sungai Musi di Kota Palembang tercemar akibat aktivitas masyarakat. Hasil pengujian laboratorium menunjukkan bahwa terjadi peningkatan nilai COD, BOD, NH₃-N dan fosfat yang melebihi baku mutu air yang telah ditetapkan. Temuan ini terkait dengan adanya pembuangan limbah domestik dan industri ke badan sungai. Bahkan secara khusus, ditemukan kandungan fosfat yang tinggi pada badan air atau adanya kandungan deterjen dalam air. (Kospa and Rahmadi, 2019)
5. Ekosistem Sungai Pedes di Kabupaten Brebes terganggu akibat adanya kelongsoran tebing sungai. Kerusakan ini ditandai dengan perubahan morfologi sungai sepanjang 215 m. Tebing sungai dengan variasi ketinggian antara 10 meter hingga 25 meter dan kemiringan lereng yang berkisar antara 44 derajat hingga 70 derajat. Tebing yang tersusun atas batu, kerikil dan pasir serta tanah

alluvial terlepas dari badan tanah hingga bagian dasarnya. Kelongsoran tebing sungai terjadi akibat tingginya kecepatan aliran sungai. Kecepatan aliran tersebut memiliki energi kinetik dan menghempas kaki lereng. Pelepasan tanah pada dasar lereng juga menyebabkan pelepasan tanah bagian atas. Selain itu, pelepasan tanah atas semakin mudah juga disebabkan oleh adanya aktivitas pertanian yang sangat intensif. Gambaran tersebut menunjukkan bahwa ekosistem sungai mengalami kerusakan akibat kondisi alami dan aktivitas manusia. (Karim, Wardani and Atmojo, 2023)

6. Ekosistem sungai juga sangat tergantung pada kualitas vegetasi pada bantaran sungai. Keberadaan tanaman bambu terbukti dapat melindungi sungai dari berbagai resiko kerusakan fisik sungai. Vegetasi bambu dengan perakarannya dapat memperkuat ikatan antara partikel tanah sehingga memperkecil resiko kelongsoran. Namun dengan peningkatan massa tanaman akibat pertumbuhan alami menyebabkan beban tanah semakin besar dan berdampak pada kejadian kelongsoran tebing sungai. Oleh karena itu, masyarakat sekitar sungai harus melakukan pengelolaan berupa pemanenan bambu secara terkontrol untuk mempertahankan kualitas sungai. (Pertwi, Rauf and Lullulangi, 2021)

Secara faktual, kegiatan manusia mendominasi resiko tersebut seperti aktivitas pertanian, permukiman dan sebagainya. Hal ini mengindikasikan bahwa aktivitas manusia harus dikontrol dengan cermat untuk mencegah adanya kerusakan ekosistem yang lebih besar.

2.3 Permasalahan Ekosistem Buatan Akibat Aktivitas Manusia

Interaksi antara manusia dan lingkungan dalam ekosistem buatan sangat kuat. Ekosistem tersebut terbentuk akibat pemenuhan kebutuhan manusia. Namun demikian, akibat pertumbuhan populasi yang cepat menyebabkan peningkatan degradasi lingkungan. Uraian fakta kerusakan lingkungan buatan disajikan sebagai berikut

1. Laju pertumbuhan kawasan perkotaan telah berdampak terhadap pemanfaatan sumber daya lahan yang sangat masif. Kota Pekalongan sebagai kawasan permukiman yang berkembang di pesisir utara Pulau Jawa mengalami masalah daya dukung dan daya tampung lingkungan. Daya dukung memiliki makna seberapa besar potensi kawasan dalam menyediakan bahan pangan bagi penduduknya., Sedangkan daya tampung mencerminkan kapasitas ruang yang dikaitkan dengan kebutuhan penduduknya. Berdasarkan analisis ekoregion dan jasa ekosistem ditemukan bahwa daya dukung kota sebagai penyedia pangan dalam kategori rendah atau kemampuan ekosistem ini hanya berkisar 47,11% dalam memenuhi kebutuhan pangan populasi manusia. Sedangkan hasil analisis daya tampung lingkungan hidup terungkap bahwa kapasitas ekosistem ini hanya sebesar 74,22%. Dengan demikian, maka kualitas lingkungan di Kota Pekalongan mengalami resiko kelangkaan pangan dan air akibat pesatnya pertumbuhan penduduk. (Febriarta and Oktama, 2020)
2. Ekosistem kota juga sangat rentan dengan resiko pencemaran air tanah dan air permukaan. Sumber air bersih bagi penduduk Kota Batu bersumber dari air tanah dan mata air pada hulu Daerah Aliran Sungai (DAS) Brantas. Namun permasalahan yang ditemukan adalah

penurunan kualitas air tanah yang ditandai dengan peningkatan konsentrasi nitrat, total *dissolved solid*, dan bakteri *coli*. Resiko degradasi kualitas air semakin tinggi akibat kemiringan lahan dan kondisi geologi. Oleh karena itu, pengembangan pemukiman harus memperhitungkan tingkat pencemaran serta sumber pencemarnya serta konservasi air tanah. (Devianto, Lusiana and Ramdani, 2019)

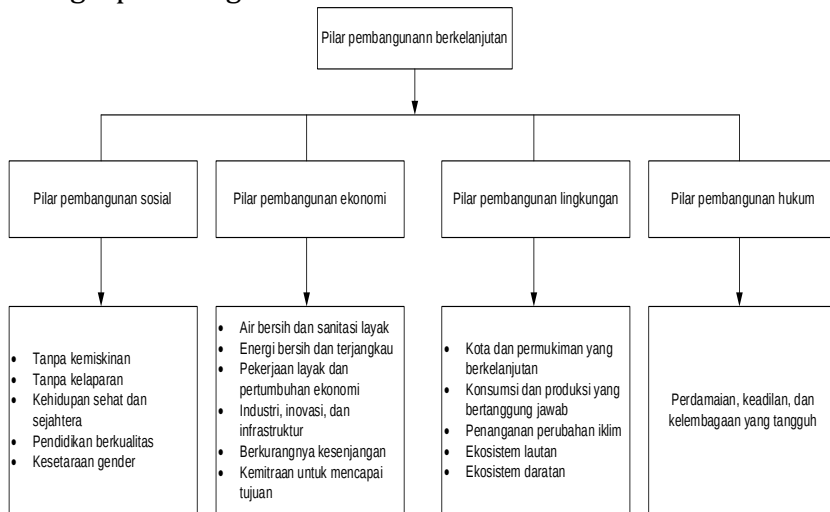
3. Kota Jambi juga mengalami peningkatan resiko pencemaran akibat kegiatan pertanian. Pencemaran tanah akibat pestisida serta keberadaan cacing dan jamur mikoriza dalam tanah. Hasil pengujian sampel tanah menggambarkan bahwa terjadi pencemaran pestisida karbamat sebesar 33,3%), ditemukan adanya jamur mikoriza pada beberapa lokasi. Selain cacing tanah juga ditemukan pada beberapa sampel tanah. Fakta tersebut diduga akibat kebiasaan penggunaan pestisida yang melebihi dosis dengan intensitas yang tinggi. (Supriatna, Siahaan and Restiaty, 2021)

Berdasarkan uraian di atas, maka pengendalian aktivitas manusia menjadi sangat penting dalam menciptakan ekosistem kota yang berkelanjutan. Resiko kepunahan vegetasi serta makhluk hidup lainnya semakin tinggi akibat penurunan kualitas unsur penyusunnya.

2.4 Pembangunan Berkelanjutan Untuk Perlindungan Ekosistem

Strategi global untuk menciptakan kualitas ekosistem yang berkelanjutan dikenal sebagai *sustainable Development Goals* (SDGs). Strategi ini bertujuan agar semua negara mendorong pertumbuhan ekonomi dan sosial tanpa mengabaikan kerusakan lingkungan. Tujuan pembangunan

berkelanjutan yang terdiri atas 17 strategi yang terbagi atas empat pilar pembangunan. Uraian keempat pilar tersebut terungkap dalam gambar 2.3.



Gambar 2.3. Pilar Pembangunan Berkelanjutan

Sebagai upaya penciptaan eksosistem yang berkelanjutan, maka terdapat enam pilar strategi penting yaitu penyediaan air bersih dan sanitasi yang layak, penyediaan energi bersih dan terjangkau, penciptaan kota dan permukiman yang berkelanjutan, peningkatan kualitas ekosistem darat dan ekosistem laut.

2.4.1 Penyediaan Air Bersih dan Sanitasi

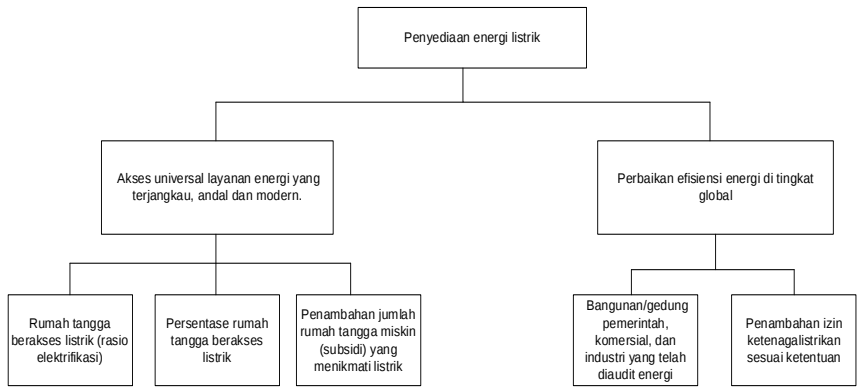
Permasalahan air bersih dan sanitasi terjadi hampir di seluruh kota di Indonesia. UNDP (2019) menguraikan bahwa buruknya sanitasi di Indonesia telah menyebabkan pencemaran. Data menunjukkan bahwa terdapat 75% sungai di Indonesia tercemar berat dan 58% bahan pencemarnya bersumber dari limbah domestik. Dampak sosial akibat kondisi sanitasi tersebut adalah 1.2 juta mengalami kerugian akibat sanitasi buruk. Pada

sektor kesehatan, data menunjukkan bahwa 7.1% kematian di Indonesia akibat minimnya sanitasi pada tingkat keluarga. Sektor pendidikan menunjukkan ada sepertam anak perempuan yang bersekolah saat menstruasi akibat sanitasi sekolah yang buruk. Kondisi ini cukup mengkhawatirkan karena target pada tahun 2030 bahwa semua wilayah Indonesia mencapai akses sanitasi dan kebersihan yang memadai. Pemerataan akses sanitasi untuk seluruh wilayah di Indonesia juga menargetkan agar tidak ada lagi orang yang buang air besar sembarangan.

Data BPS tahun 2020 menyajikan pencapaian target tersebut yaitu bahwa 90.2% masyarakat mendapatkan akses air minum layak dan terdapat 11.9% rumah tangga menunjukkan akses akses air minum aman. Akses sanitasi menunjukkan bahwa terdapat 79.5% masyarakat mendapatkan akses sanitasi layak. Nilai tersebut mencakup 7.6% rumah tangga yang menunjukkan sanitasi aman.

2.4.2 Penyediaan Energi Bersih yang Terjangkau

Energi sebagai kebutuhan rumah tangga menjadi suatu permasalahan pelik di Indonesia. Pencapaian target pembangunan berkelanjutan pada tahun 2030 pada sektor energi terbagi atas dua aspek sebagaimana disajikan pada gambar 2.4.



Gambar 2.4. Sektor Penyediaan Energi Listrik

Sebagai upaya pemenuhan energi bagi masyarakat, maka prediksi kebutuhan energi harus dilakukan secara tepat dan akurat. Hutabarat (2022) menguraikan bahwa analisis prediksi tersebut mempertimbangkan beberapa aspek yaitu:

1. Pertumbuhan penduduk yang berkorelasi positif dengan pertumbuhan kebutuhan energi.
2. Pertumbuhan ekonomi yang berkorelasi positif dengan pertumbuhan kebutuhan energi.
3. Produk Domestik Bruto (PDR) sebagai parameter total produksi perekonomian suatu kawasan

2.4.3 Perwujudan Kota dan pemukiman yang Berkelanjutan

Kota yang berkelanjutan atau “ecocity” adalah kota yang dirancang dengan menyeimbangkan komponen People, Planet, dan Profit. People bermakna bahwa manusia dalam kota memiliki kebutuhan ruang untuk hidup dan berinteraksi. Sedang planet mengandung makna lingkungan atau ruang yang memiliki kualitas yang baik dan mendukung kehidupan manusia. Sedangkan profit mengandung makna bahwa aktivitas ekonomi

masyarakat harus didukung dengan kondisi kota yang baik dan tidak tercemar. (Budihardjo and Sujarto, 2009)

2.4.4 Penanganan Perubahan Iklim

Aktivitas manusia yang merupakan penyebab perubahan iklim adalah pembakaran bahan bakar fosil seperti batu bara, minyak dan gas. Penggunaan bahan bakar tersebut berdampak terhadap peningkatan emisi gas rumah kaca menyelubungi atmosfer dan memantulkan panas matahari serta berdampak pada kenaikan suhu global. Pada rentang waktu puluhan tahun antara tahun 2011-2020 terjadi pemanasan bumi sekitar 1,1°C lebih hangat daripada di akhir tahun 1800-an.

Strategi pemerintah dalam mengantisipasi perubahan iklim adalah mengurangi penggunaan bahan bakar fosil pada kendaraan. Peningkatana kebiasaan berjalan kaki, penggunaan kendaraan dengan zero emision serta upaya mereduksi sampah.

2.4.5 Ekosistem Laut

Indikator kerusakan ekosistem laut dapat dilihat pada kualitas komponen-komponennya. Ekosistem laut terbagi atas enam yaitu laut, pantai, estuari (muara), hutan mangrove, terumbu karang dan padang lamun.

Sebagai sistem akuatik yang terbesar di planet bumi, maka dinamika dan perpindahan energi di laut menjadi indikator penting dalam kualitas bumi. Perubahan iklim global juga sangat terkait dengan ekosistem ini. Ekosistem laut sangat sensitif terhadap perubahan suhu. Beberapa penelitian menguraikan bahwa peningkatan suhu air laut terjadi pada permukaan hingga kedalaman 700 meter. Pada kedalaman ini, kehidupan organisme laut yang menjadi penyeimbang ekosistem laut. (Reid *et al.*, 2010).(Prakash, 2021). Terumbu karang juga mengalami kerusakan seperti adanya bleaching atau memutih akibat kenaikan suhu air laut. Fenomena ini dapat menyebabkan

kematian dan kepunahan terumbu karang (Ainsworth and Brown, 2021). Pemanasan global juga terindikasi dengan semakin tingginya permukaan laut. Bencana banjir rob di beberapa kota di Indonesia juga disebabkan dengan kenaikan permukaan laut (Tabari, 2020).

2.4.6 Ekosistem Darat

Ekosistem darat memiliki resiko kerusakan yang besar akibat aktivitas manusia yang sangat kompleks. Berbagai fakta kerusakan ekosistem darat dapat dilihat pada kerusakan hutan berupa penggundulan (desertifikasi) dan hilangnya keanekaragaman hayati. Oleh karena itu, pembangunan berkelanjutan dirancang untuk melindungi, merestorasi dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan secara lestari, menghentikan penggurunan, memulihkan degradasi lahan, serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati.

Restorasi ekosistem daratan adalah upaya mengembalikan unsur hayati (flora dan fauna) serta unsur non hayati (tanah, iklim dan topografi) pada suatu kawasan kepada jenis yang asli. Salah satu bentuk pemulihan lahan dapat dilihat pada upaya pemulihan ekosistem gambut akibat kebakaran hutan dan lahan di Lukun Kecamatan Tebing Tinggi Timur kabupaten Kepulauan Meranti Provinsi Riau. Upaya yang dilakukan dalam bentuk 3R yaitu rewetting (pembasahan), revegetasi (penanaman), dan revitalisasi (upaya pemaksimalan sumber ekonomi masyarakat). Upaya pembasahan dan revegetasi berkontribusi terhadap perbaikan struktur tanah gambut sehingga lahan tersebut kembali produktif. (Jalil, 2019)

2.5 Penutup

Manusia dengan segala aktivitasnya telah memberi dampak terhadap ekosistem. Ekosistem alami seperti laut, sungai dan hutan mengalami tekanan besar dan menurun kualitasnya akibat pencemaran dan kehilangan sumber daya hayati. Ekosistem buatan seperti kota, desa, sawah, irigasi dan sebagainya juga mengalami kerusakan infrastruktur dan berdampak pada kualitas kehidupan manusia. Oleh karena itu, seluruh negara mendukung strategi pembangunan berkelanjutan untuk mengendalikan penurunan kualitas lingkungan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ainsworth, T. D., & Brown, B. E. 2021. Coral bleaching. *Current Biology*, 31(1), R5-R6.
- Budihardjo, E., & Sujarto, D. 2009. Kota Berkelanjutan (Sustainable City). Bandung: Alumni.
- Devianto, L. A., Lusiana, N., & Ramdani, F. 2019. Analisis kerentanan pencemaran air tanah di kota Batu menggunakan analisis multikriteria spasial dengan indek DRASTIC. *Jurnal Wilayah dan Lingkungan*, 7(2), 90-104.
- Febriarta, E., & Oktama, R. 2020. Pemetaan daya dukung lingkungan berbasis jasa ekosistem penyedia pangan dan air bersih di Kota Pekalongan. *Jurnal Ilmu Lingkungan*, 18(2), 283-289.
- Hutabarat, P. H., Zambak, M. F., & Suwarno, S. 2022. Prediksi Kebutuhan Energi Listrik Wilayah Pln Kota Parapat Simalungun Sampai Tahun 2024. *Journal Of Electrical And System Control Engineering*, 5(2), 52-58.
- Jalil, A. 2019, November. Upaya Pemulihan Ekosistem Gambut Pasca Kebakaran Hutan Dan Lahan Di Desa Lukun Kecamatan Tebing Tinggi Timur. In *Talenta Conference Series: Local Wisdom, Social, and Arts (LWSA)* (Vol. 2, No. 1, pp. 1-12).
- Karim, I. S. A., Wardani, S. P. R., & Atmojo, P. S. 2023. Kajian Penanganan Longsor Tebing Sungai Pedes Di Kabupaten Brebes. *Rang Teknik Journal*, 6(1), 39-50.
- Kospa, H. S. D., & Rahmadi, R. 2019. Pengaruh perilaku masyarakat terhadap kualitas air di Sungai Sekanak Kota Palembang. *Jurnal Ilmu Lingkungan*, 17(2), 212-221.

- Latumahina, F., Musyafa, M., Sumardi, S., & Putra, N. S. 2015. Respon semut terhadap kerusakan antropogenik dalam hutan lindung sirimau ambon (Ants Response to Damage Anthropogenic in Sirimau Forest Ambon). *Jurnal Manusia dan Lingkungan*, 22(2), 169-178.
- Makhfirah, N., Utami, D., Sena, F., Mardina, V., & Rimadeni, Y. 2021. Identifikasi Tipe Kerusakan Pohon Di Wisata Hutan Lindung Kota Langsa. *Jurnal Jeumpa*, 8(1), 462-471.
- Pertiwi, N., Rauf, B. A., & Lullulangi, M. 2021. Analysis of Riverbank Stability Due to Bamboo Vegetation in Walanae River, South Sulawesi, Indonesia. *Journal of Ecological Engineering*, 22(9).
- Prakash, S. 2021. Impact of Climate change on Aquatic Ecosystem and its Biodiversity: An overview. *International Journal of Biological Innovations*, 3(2).
- Reid, P. C., Fischer, A. C., Lewis-Brown, E., Meredith, M. P., Sparrow, M., Andersson, A. J., ... & Washington, R. 2009. Impacts of the oceans on climate change. *Advances in marine biology*, 56, 1-150.
- Supriatna, S., Siahaan, S., & Restiaty, I. 2021. Pencemaran tanah oleh pestisida di perkebunan sayur Kelurahan Eka Jaya Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi (Studi keberadaan jamur makroza dan cacing tanah). *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 21(1), 460-466.
- Tabari, H. 2020. Climate change impact on flood and extreme precipitation increases with water availability. *Scientific reports*, 10(1), 1-10.
- Wasis, B. 2012. Dampak Tambang Pasir terhadap Vegetasi dan Sifat Tanah di Hutan Lindung Kelurahan Batu Besar Kecamatan Nongsa Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau. Makalah paparan/ekspose di Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam. Departemen Silvikultur, Fakultas Kehutanan IPB, Bogor, Jawa Barat.

BAB 3

ETIKA LINGKUNGAN

Oleh Elsa Yuniarti

3.1 Defenisi Etika Lingkungan

Etika lingkungan, atau konsep keberlanjutan lingkungan, melibatkan pendekatan alternatif dalam upaya menyelamatkan lingkungan, sumber daya alam, dan ekosistem (Marfai, 2019). Pendekatan ini menyediakan saran untuk memahami secara ekologis pertumbuhan ekonomi, yang pada saat yang sama meningkatkan standar hidup dan kualitas hidup tidak hanya dari perspektif ekonomi, tetapi juga dalam aspek sosial dan budaya masyarakat. Hal ini bertujuan untuk memastikan peningkatan kualitas hidup secara menyeluruh (Marfai, 2005).

Etika lingkungan melibatkan analisis kritis terhadap norma, nilai dan prinsip moral yang berkaitan erat dengan lingkungan. Selain itu, hal ini juga berkaitan erat dengan evaluasi kritis pandangan manusia terhadap manusia dan alam, serta interaksi dan perilaku manusia terhadap alam yang muncul dari perspektif tersebut. Melalui analisis kritis ini, disajikan pandangan dan perilaku baru yang dianggap lebih tepat dalam menghadapi krisis lingkungan, dengan mengadopsi etika lingkungan yang terakar dalam cerita masyarakat. Etika lingkungan dalam masyarakat tertentu memiliki pengaruh yang signifikan terhadap karakteristik masyarakat tersebut (Sukmawan & Nurmansyah, 2014).

Etika memiliki keterkaitan yang erat dengan perilaku manusia, yang dapat ditingkatkan melalui pendidikan. Materi mengenai etika lingkungan dapat disampaikan dengan memanfaatkan budaya masyarakat adat sebagai sumber

pembelajaran, memahami nilai-nilai kearifan lokal dapat memicu kesadaran lingkungan. Lingkungan mencakup segala hal yang mengitari manusia dan memiliki pengaruh langsung maupun tidak langsung terhadap keberlangsungan hidup, kesejahteraan manusia, dan keberlangsungan makhluk hidup lainnya. Etika lingkungan merujuk pada kebijaksanaan moral manusia dalam menghadapi lingkungan tempatnya berada. Etika lingkungan diperlukan agar setiap tindakan yang terkait dengan lingkungan dipertimbangkan dengan hati-hati guna menjaga keseimbangan ekosistem (Sukmawati & Susilo, 2015; Taneja & Gupta, 2015).

Etika lingkungan melibatkan panduan perilaku dan kecenderungan praktis manusia dalam menerapkan prinsip-prinsip etika lingkungan. Hal ini mencakup tidak hanya seimbangannya hak dan kewajiban terhadap lingkungan, tetapi juga membatasi perilaku dan upaya pengendalian berbagai kegiatan agar tetap berada dalam batas-batas yang masuk akal secara ekologis. Etika lingkungan juga membahas hubungan antara semua bentuk kehidupan di alam semesta, baik itu hubungan antara manusia dengan manusia yang mempengaruhi alam, maupun hubungan antara manusia dengan makhluk hidup lainnya dan alam secara keseluruhan. Ini termasuk juga berbagai kebijakan yang memiliki dampak langsung atau tidak langsung terhadap alam. Untuk mencapai etika lingkungan, penting untuk memahami perubahan perspektif terhadap lingkungan itu sendiri. Etika lingkungan merupakan kebijaksanaan moral manusia dalam menghadapi lingkungan tempat tinggalnya. Etika ekologi diperlukan agar setiap tindakan yang terkait dengan lingkungan dipertimbangkan dengan hati-hati untuk menjaga keseimbangan lingkungan.

Etika lingkungan melibatkan tidak hanya perilaku manusia terhadap alam, tetapi juga hubungan antara semua bentuk kehidupan di alam semesta, baik itu hubungan antara manusia dengan manusia yang mempengaruhi alam, maupun

hubungan antara manusia dengan makhluk hidup lainnya dan alam secara keseluruhan. Konsep etika lingkungan memiliki pentingnya karena berkaitan dengan perilaku manusia yang dapat diarahkan oleh nilai dan norma yang membimbing tindakan individu dan proses sosial terhadap alam dan lingkungannya. Dengan demikian, dasar dari etika ini adalah tindakan yang bertujuan untuk melindungi dan mempertahankan alam atau lingkungan. Etika lingkungan juga dikenal sebagai etika ekologi.

Etika Lingkungan juga dikenal dengan Etika Ekologi. Etika ekologi kemudian dapat dibagi menjadi 2 bentuk, yaitu etika ekologi dalam dan etika ekologi dangkal. Selain itu, etika lingkungan juga dapat dibedakan menjadi etika pelestarian dan etika pemeliharaan. Etika pelestarian menekankan upaya untuk melestarikan alam demi kepentingan manusia, sementara etika pemeliharaan bertujuan untuk mendukung upaya pemeliharaan lingkungan demi kepentingan semua makhluk.

1. Ekologi dangkal, juga dikenal sebagai ekologi shallow, adalah sebuah paradigma yang menitikberatkan pada pemenuhan kebutuhan manusia. Paradigma ini menempatkan lingkungan sebagai alat yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Dengan demikian, ekologi dangkal bersifat antroposentris, yang berarti manusia dianggap sebagai makhluk superior yang memiliki otoritas bebas untuk mengeksploitasi dan memanfaatkan lingkungan sesuai dengan kebutuhan mereka.
2. Ekologi dalam, dikenal sebagai ekologi deep, adalah sebuah etika yang menganggap manusia sebagai bagian yang integral dari lingkungannya. Konsep ini didasarkan pada sistem etika baru yang memiliki dampak positif terhadap kelestarian alam. Etika ekologi ini memiliki prinsip bahwa semua makhluk kehidupan

memiliki nilai intrinsik dan karena itu berhak untuk dihormati, memiliki hak untuk hidup, dan hak untuk berkembang. Prinsip dasarnya adalah bahwa lingkungan moral harus melampaui spesies manusia dengan memasukkan komunitas yang lebih luas. Komunitas yang lebih luas dalam hal ini mencakup hewan, tumbuhan, dan alam secara keseluruhan.

Pandangan ekologis memiliki dasar etika yang mendalam. Pendekatan etika ekologis, yang menentang kerusakan alam dan dampak negatif terhadap manusia dalam masyarakat, bermula dari keyakinan akan adanya keterhubungan yang utuh antara semua bentuk kehidupan di bumi. Ekologi didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari hubungan antara organisme dengan habitatnya, serta interaksi antara anggota dan komponen lain dari habitat tersebut. Hubungan antara organisme dan habitatnya saling menguntungkan. Namun, ketika ketergantungan ini berubah menjadi sumber kerugian bagi salah satu pihak, maka akan memunculkan krisis ekologi.

3.2 Prinsip-Prinsip Etika pada Lingkungan Hidup

Sikap-sikap yang harus di jaga dan dilakukan oleh manusia dalam berperilaku terhadap alam adalah prinsip-prinsip etika lingkungan. Prinsip-prinsip ini perlu diterapkan untuk mencapai tujuan menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan terjaga (Nagel, 2020).

Terdapat dua unsur utama dalam prinsip etika lingkungan. Pertama, komunitas moral tidak hanya terbatas pada komunitas sosial, melainkan juga mencakup seluruh komunitas ekologis. Kedua, manusia memiliki kodrat tidak hanya sebagai makhluk sosial, tetapi juga sebagai makhluk ekologis. Prinsip-prinsip ini bertujuan untuk memberikan panduan dalam mengubah kebijakan sosial, politik, dan ekonomi agar lebih

ramah lingkungan dan menghadapi tantangan lingkungan saat ini. Semua teori etika lingkungan mengakui pentingnya menghormati alam semesta. Dalam teori antroposentrisme, alam semesta dihormati karena kepentingan manusia tergantung pada kelestarian dan keutuhan alam. Sementara dalam teori biosentrisme dan ekosentrisme, manusia memiliki tanggung jawab moral untuk menghormati alam semesta dan semua isinya, karena manusia merupakan bagian integral dari alam dan karena alam memiliki nilai intrinsik (Keraf, 2010).

Sebagai manusia yang memiliki peran moral, kita memiliki tanggung jawab untuk menghormati kehidupan, baik itu manusia maupun makhluk hidup lainnya di dalam komunitas ekologis secara keseluruhan. Kita harus menghargai dan menghormati benda-benda non hayati karena setiap entitas dalam alam semesta memiliki hak yang sama untuk hidup dan berkembang. Penghormatan terhadap alam tidak hanya didasarkan pada ketergantungan kita terhadapnya, tetapi juga karena realitas ontologis bahwa kita merupakan bagian yang tak terpisahkan dari alam dan anggota komunitas ekologis ini. Penghargaan terhadap alam muncul melalui hubungan yang saling terkait antara manusia dan alam dalam konteks komunitas ekologis. Kita memiliki kewajiban untuk menghormati hak setiap makhluk hidup untuk hidup, tumbuh, dan berkembang dengan cara yang wajar. Sebagai ungkapan nyata dari tanggung jawab ini, kita diwajibkan untuk merawat, menjaga, melindungi, dan melestarikan alam serta semua isinya. Kita tidak diperbolehkan merusak atau menghancurkan alam dan isinya tanpa alasan yang kuat. Alam dan semua komponennya juga berhak mendapatkan cinta, perhatian, dan perawatan dari setiap manusia. Rasa belas asih dan kepedulian timbul dari pemahaman bahwa setiap makhluk hidup memiliki hak untuk dilindungi, dirawat, tidak disakiti, dan diperhatikan (Keraf, 2010).

Prinsip penghormatan terhadap alam berhubungan erat dengan tanggung jawab moral terhadap alam. Setiap elemen dan objek di alam semesta ini diciptakan oleh tuhan dengan tujuan tertentu, baik untuk kepentingan manusia maupun tidak. Oleh karena itu, sebagai bagian integral dari alam semesta, manusia juga memiliki kewajiban untuk menjaga alam tersebut. Tanggung jawab ini tidak hanya bersifat individual, tetapi juga bersifat kolektif. Tanggung jawab moral ini membutuhkan inisiatif, usaha, praktik, dan tindakan nyata dari individu-individu untuk melindungi alam semesta beserta semua isinya. Dalam arti lain, pelestarian dan penghancuran alam merupakan tanggung jawab bersama bagi semua orang. Tanggung jawab ini juga menjadi bentuk peringatan, larangan, dan hukuman bagi mereka yang merusak dan membahayakan alam.

3.3 Penerapan Prinsip-Prinsip Etika Lingkungan dalam Upaya Pelestarian Lingkungan Hidup

Dengan merujuk pada teori-teori seperti biosentrisme, ekosentrisme, hak asasi alam, dan ekofeminisme, partisipasi manusia sebagai anggota masyarakat menjadi penting dalam menentukan kebijakan pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan, baik dalam skala lokal maupun global. Tidak hanya pemerintah, tetapi juga anggota masyarakat memiliki peran dalam menentukan kebijakan publik dan memanfaatkan lingkungan dengan mempertimbangkan kepentingan manusia yang vital. Hal ini dikarenakan anggota masyarakat juga secara proporsional turut menanggung beban akibat kerusakan alam semesta atau lingkungan yang ada (Ariwidodo, 2014).

Masyarakat memiliki tanggung jawab moral untuk menghargai alam semesta dan semua yang ada di dalamnya karena alam memiliki nilai intrinsik. Berdasarkan nilai ini, manusia juga diharapkan untuk menghargai dan menghormati

benda-benda non hayati di lingkungan mereka karena benda-benda tersebut memiliki hak yang sama untuk hidup dan berkembang. Dengan kata lain, alam memiliki hak untuk dihormati, tidak hanya karena kehidupan manusia bergantung pada alam, tetapi juga karena secara ontologis manusia adalah bagian dari komunitas ekologis. Bahkan dalam perspektif ekofeminisme, sikap penghormatan terhadap alam timbul dari hubungan kontekstual antara manusia dan alam dalam komunitas ekologis yang dimaksud. Oleh karena itu, sebagai manifest konkret dari sikap penghormatan tersebut, manusia perlu menjaga, merawat, melindungi, dan melestarikan alam beserta semua yang ada di dalamnya. Secara negatif, ini berarti bahwa manusia tidak boleh merusak dan menghancurkan alam serta segala isinya tanpa alasan moral yang dapat dibenarkan (Ariwidodo, 2014).

Manusia perlu menginternalisasikan nilai-nilai moral atau etika dalam dirinya karena memiliki sikap etika yang baik terhadap lingkungan akan mendorong partisipasi dalam menjaga lingkungan, dimanapun mereka berada. Dari analisis yang disampaikan, dapat disimpulkan bahwa terdapat korelasi positif antara etika lingkungan dan tingkat partisipasi dalam usaha pelestarian lingkungan.

Regulasi mengenai lingkungan hidup tercakup dalam “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup”. Bagian terkait hak, kewajiban, dan larangan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dibahas dalam bab X. sedangkan, bab XII membahas mengenai pengawasan dan sanksi administratif. Bagian pertama menguraikan mengenai mekanisme pengawasan, sementara bagian kedua membahas tentang penerapan sanksi administratif.

Berikut adalah beberapa hal yang perlu diperhatikan terkait penerapan etika lingkungan:

1. Manusia merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari lingkungan, oleh karena itu penting untuk mencintai dan merawat semua kehidupan dan lingkungan sekitar, tidak hanya diri sendiri.
2. Sebagai bagian dari lingkungan, manusia harus selalu berusaha menjaga, melestarikan, dan menjaga keseimbangan serta keindahan alam.
3. Penggunaan sumber daya alam yang terbatas, termasuk energi, harus dilakukan dengan bijaksana.
4. Lingkungan tidak hanya diciptakan untuk kepentingan manusia, tetapi juga untuk makhluk hidup lainnya.

Etika lingkungan tidak hanya membahas tentang cara manusia berinteraksi dengan alam, tetapi juga melibatkan hubungan antara semua bentuk kehidupan di alam semesta. Ini termasuk hubungan antara manusia dengan sesamanya, yang memiliki dampak pada alam, serta hubungan antara manusia dan makhluk hidup lainnya, atau alam secara keseluruhan. Sikap yang ramah terhadap lingkungan harus menjadi kebiasaan bagi setiap individu dalam menjalani kehidupan, baik di dalam keluarga, sekolah, maupun di lingkungan masyarakat.

Beberapa tindakan yang dapat dilakukan untuk mengembangkan sikap tersebut antara lain:

1. Lingkungan keluarga: lingkungan keluarga dapat menjadi tempat yang efektif untuk menginternalisasikan nilai-nilai etika lingkungan. Ini dapat dilakukan dengan cara berikut:
 - a. Menanam pohon dan merawat bunga di dalam rumah. Setiap orang tua memberikan tanggung jawab rutin kepada anak-anaknya untuk merawat, seperti menyiram dan memberi pupuk.
 - b. Mengajarkan kebiasaan membuang sampah pada tempatnya. Setiap anggota keluarga saling bergantian

- menjaga kebersihan dan merasa malu jika membuang sampah sembarangan.
- c. Memberikan tugas kepada anggota keluarga untuk menyapu rumah dan halaman secara rutin.
2. Lingkungan sekolah: kesadaran akan etika lingkungan hidup dapat ditanamkan di lingkungan sekolah melalui beberapa cara, seperti:
- a. Memberikan pelajaran tentang lingkungan hidup dan etika lingkungan sebagai bagian dari kurikulum.
 - b. Mengadakan kegiatan ekstrakurikuler yang fokus pada pembentukan sikap yang peduli terhadap lingkungan, seperti:
 - 1) Diskusi atau pembahasan mengenai isu-isu lingkungan hidup.
 - 2) Mengajarkan pengelolaan sampah yang benar.
 - 3) Melakukan kegiatan penanaman pohon.
 - 4) Mengadakan penyuluhan kepada siswa tentang pentingnya pelestarian lingkungan.
 - 5) Mengorganisir kegiatan piket dan jumat bersih untuk membersihkan lingkungan sekolah.
3. Lingkungan masyarakat: untuk mengamalkan etika lingkungan dalam lingkungan masyarakat, dapat dilakukan dengan:
- a. Mengedepankan kebiasaan membuang sampah secara teratur ke tempat pembuangan sampah yang sesuai.
 - b. Menyadari pentingnya memisahkan sampah organik dan non organik.
 - c. Melakukan gotong royong atau kerja bakti secara rutin di lingkungan tempat tinggal.
 - d. Mendorong penggunaan ulang dan daur ulang bahan yang masih bisa digunakan.

(Nagel, 2020)

DAFTAR PUSTAKA

- Ariwidodo, E. 2014. relevansi pengetahuan masyarakat tentang Lingkungan dan etika lingkungan dengan partisipasinya dalam pelestarian lingkungan. *NUANSA: Jurnal Penelitian Ilmu Sosial Dan Keagamaan Islam*, 11(1), 1–20.
- Keraf, A. S. 2010. *Etika lingkungan hidup*. Penerbit Buku Kompas.
- Marfai, M. A. 2005. Moralitas Lingkungan. *Refleksi Kritis Atas Krisis Lingkungan Berkelanjutan, Wahana Hijau Dan Kreasi Wacana*, Yogyakarta.
- Marfai, M. A. 2019. *Pengantar etika lingkungan dan Kearifan lokal*. UGM PRESS.
- Nagel, P. J. F. 2020. Etika Lingkungan Hidup. *Jurnal Sumberdaya Bumi Berkelanjutan (SEMITAN)*, 2(1), 521–525.
- Sukmawan, S., & Nurmansyah, M. A. (2014). Etika Lingkungan dalam Folklor Masyarakat Desa Tengger. *LITERASI: Indonesian Journal of Humanities*, 2(1), 88–95.
- Sukmawati, U. S., & Susilo, S. 2015. Kearifan lokal masyarakat adat dalam pelestarian hutan sebagai sumber belajar geografi. *Jurnal Pendidikan Humaniora*, 3(3), 202–208.
- Taneja, N., & Gupta, K. 2015. Environmental ethics and education- A necessity to inculcate environment-oriented cognizance. *Proceedings of the International Advanced Research Journal in Science, Engineering and Technology (IARJSET), National Conference on Renewable Energy and Environment (NCREE-2015), Ghaziabad, India*, 398–400.

BAB 4

PENGETAHUAN ADAT DAN ADAT MASYARAKAT

Oleh Gufran Darma Dirawan

4.1 Pendahuluan

Adat dan masyarakat Adat merupakan bagian dari kehidupan yang paling dasar bagi masyarakat di Indonesia dalam kesehariannya, karena sesungguhnya adat dan masyarakat adat merupakan bagian inti atau utama dari perkembangan sistem tatanan budaya Indonesia yang sangat heterogen dan terintegrasi satu dengan yang lainnya khususnya dalam pengelolaan sumber daya dalam skala kecil. Indonesia adalah negara dengan jumlah penduduk dan luasan ulayat besar memiliki potensi dalam sistem pengelolaan berbasis partisipatif resources. Hal ini disebabkan luasnya sistem budaya dan kebudayaan yang terbentuk dari pola perilaku masyarakat lokal maupun masyarakat adat yang ada dalam struktur masyarakat tersebut. Jumlah komunitas Masyarakat Adat diperkirakan sekitar lebih dari 40 juta jiwa dibentuk oleh tatanan lingkungan yang berbeda satu dengan yang lainnya, disamping pengetahuan adat yang sifatnya lokal dan sangat bervariasi antara satu dengan lainnya.

Indonesia merupakan negara multi culture dengan lebih dari 300 etnis dengan budaya dan ciri khasnya masing masing. Sebagai bagian dari negara persatuan dimana masing masing daerah memiliki ciri khas tertentu dengan kondisi sosial ekonomi budaya tertentu apalagi didukung oleh sejarah perkembangan

masing masing daerah yang khas serta interklasi dengan lingkungan yang sustainable, karenanya masyarakat adat mempunyai sejarah yang panjang dan budaya yang khas yang terbentuk adat secara turun-temurun dan membentuk satu kesatuan ekosistem tertentu yang didukung oleh pola sosial budaya kemasyarakatan. Secara institusi masyarakat adat seharusnya memiliki kedaulatan atas hak ulayat mereka, tata hukum yang mengatur kehidupan, dan lembaga adat yang menguatkan keberadaan mereka.

Dinamika sosial dan kemasyarakatan yang ada menunjukkan bahwa masyarakat adat lebih sering dianggap sebagai kelompok kecil, dan minoritas serta kadang mengalami diskriminasi, stigma, kekerasan, intimidasi, dan kriminalisasi dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungannya sebagai akibat dari modernisasi, internalisasi penguatan intitusi pemerintahan dan pengelolaan sistem pemerintahan yang berbasis struktur *top down management*. Pengaruh perkembangan teknologi yang semakin menjangkau seluruh aspek kehidupan kemasyarakat di Indonesia menyebabkan pola kehidupan mereka kemudian dianggap menjadi sangat keterbelakangan dan sangat tradisional sehingga dianggap tidak memiliki kemampuan untuk dapat diberikan akses mereka terhadap pengelolaan sumber daya. Akan tetapi, dalam kenyataannya dilapangan, dengan struktur masyarakat yang sangat dinamis maka adat dan masyarakat adat memiliki kemampuan dalam menyusun, merancang bahkan mengimplementasikan serta mengevaluasi satu atau beberapa ekosistem yang ternyata pengelolaannya jauh lebih arif dibandingkan dengan pengelolaan modern.

Dalam perkembangannya kemudian, adaptasi terhadap konflik yang terjadi dan diakibatkan oleh perkembangan teknologi terutama teknologi informasi, globalisasi dan modernisasi mengakibatkan masyarakat adat juga mempunyai

kemampuan adaptif untuk dapat menginternalisasi sistem yang mereka bangun dengan penguatan teknologi yang memberikan kemampuan mereka untuk dapat memberikan efisiensi dan efektifitas terhadap pengelolaan sumber daya. Dahulunya pengetahuan masyarakat adat hanya tersimpan dalam memori/pikiran perseorangan yang kemudian di turunkan melalui sistem genekologis kepada anak generasinya sehingga pengetahuan dan sikap yang baik, maupun praktek yang baik dalam berinteraksi dengan lingkungannya kemudian hanya terkungkung dalam satu sistem tertutup. Namun dengan perkembangan teknologi selanjutnya upaya untuk dapat melakukan diseminasi terhadap ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh pemimpin atau ketua masyarakat adat kemudian dapat disebarkan melalui sebuah proses pembelajaran yang runut dan terstruktur kepada semua lapisan masyarakat sehingga proses partisipasi dan transparansi dalam proses pengambilan keputusan dalam pengelolaan lingkungan akan lebih terbuka dan dapat menyerap lebih banyak pengetahuan dan pengalaman dari anggota masyarakat tersebut.

4.2 Landasan Teori

4.2.1 Definisi dan Karakter Masyarakat Adat

Definisi adat dan masyarakat adat masih menjadi pertanyaan yang “sangat besar”, terkadang masih dipahami secara samar, pengetahuan terhadap adat sebagai satu kesatuan sistem sosial dan *role of the game* serta masyarakat adat sebagai satu kesatuan intitusi menjadi sangat biasa pemahamannya disebabkan belum di susun dan diratifikasinya peraturan perundang undangan tentang masyarakat adat. Hal ini akan memberikan pengaruh signifikan terhadap adanya adat masyarakat. Sementara itu “aliansi masyarakat adat nusantara (AMAN)” berjuang agar adat sebagai pengetahuan dapat menjadi bagian dalam

kaidah hukum yang memiliki justifikasi dalam masyarakat. Secara *definitive* adat diasosiasikan dengan pengetahuan lokal dari struktur atau starta masyarakat tertentu yang memiliki institusi dan sosial kemasyarakatan tertentu. Dalam Hal ini adat merupakan kumpulan pengetahuan mengenai aturan aturan yang ada dalam struktur masyarakat yang memiliki ke khasan dalam sosial budaya. Dalam kaitannya dengan hukum maka adat merupakan hukum yang dibentuk oleh masyarakat adat dalam istilah hukum Belanda yang diwariskan ke Indonesia definisinya dikaitkan dengan adat *gemeenschap*, adat *rechtgemeenschap*, *volkgemeenschap* dan *recht gemeenschappen*. Adat atau hadat dalam beberapa istilah lainnya dinyatakan sebagai suatu “*role the law*” atau tatanan hukum yang dibangun dari akar akar sejarah yang khas dan budaya sebagai hasil dari perilaku manusia yang berbeda dengan komunitas lainnya.

“*Role of the Law*” adat itu mengatur berbagai aspek prilaku manusia dalam pola hidup terutama berhubungan dengan sistem kekerabatan, kepemilikan *resources*, institusi/kelembagaan, pola kepemimpinan dan lain sebagainya. Varian tersebut disparitasnya sangat berbeda antara hukum adat, hal ini mengakibatkan berbagai kaidah hukum adat sulit disatukan yang sekaitan dengan hukum negara. Aspek institusi/kelembagaan budaya yang sangat variatif dan pola kepemimpinan menjadi aspek utama yang sangat sulit untuk disatukan pemahamannya. Pengetahuan dan latar belakang budaya yang berbeda serta pola struktur ruang keulayatan menjadikan pola kelembagaan adat ini menjadi satu diskusi yang sangat luas pemahamannya , apalagi secara teknis terlalu banyak varian dalam satu struktur masyarakat adat tertentu.

Perubahan besar yang terjadi akibat Undang Undang Otonomi daerah menyebabkan sistem tata pemerintahan

disatukan dalam sebuah pemahaman kenegaraan dimana struktur hingga ke tingkat masyarakat di-amalgasi hingga ulayat dan kesatuan hidup sosial budaya masyarakat . perbedaan yurisdiksi kampung menjadi desa menyebabkan sulitnya menerapkan sebuah aturan hukum yang mengikat seluruh elemen masyarakat yang memiliki nilai kesejarahan, sosial budaya yang berbeda dengan yang aturan berlaku umum. Disamping itu, penggabungan beberapa ulayat kesatuan adat menimbulkan konflik yang wajib segera diselesaikan dengan kesepakatan bersama masyarakatnya. Justifikasi terhadap pengetahuan masyarakat lokal yang merupakan hasil dari pemikiran individu yang kemudian diharapkan menjadi kesepakatan bersama dan menimbulkan sikap serta perilaku bersama sehingga menjadi bagian dalam pembentukan pengetahuan adat ataupun sering didefinisikan sebagai pengetahuan tradisional yang sering di jadikan sebagai ikon hukum adat.

Selanjutnya, Definisi komunitas adat adalah masyarakat dimana kehidupannya melingkupi pada aksesibilitas terhadap *resources* yang berdasarkan hak ulayat atau perilaku masyarakat lokal. Sehingga dibutuhkan suatu pemahaman bahwa adat sebagai hukum dan pengetahuan lokal merupakan hasil dari kesepakatan bersama masyarakat lokal yang dijadikan berbagai aturan dalam masyarakat sering diasosiasikan dengan “Adat “ (Dirawan 2001) sebagai bagian *role of the law* / aturan yang disepakati oleh masyarakat tertentu yang menganut budaya tertentu namun skalanya menjadi sangat kecil karena keterbatasan-keterbatasan yang dimilikinya. Hanya saja oleh masyarakat penganutnya aturan tersebut jauh lebih tinggi kedudukannya dibandingkan dengan aturan negara. Karenanya alat ukur yang dipergunakan terdapat pengakuan terhadap hak-hak individu maupun kelompok untuk mengelola *resources*. Jadi

itu tanda- tanda kecil yang menggambarkan bahwa ada sistem adat dan kebiasaan yang justru mengatur hubungan masyarakat dengan *resources*". (Dirawan 2001)

Identifikasi terhadap komunitas yang menjustifikasi dirinya sebagai satu kesatuan masyarakat yang memiliki perbedaan dengan kelompok umum lainnya disebut "orang Asli" di Malaysia, atau, masyarakat tradisional, orang awam, orang buku, dan atau berbagai identitas lainnya yang diberikan pada mereka. Kingsbury (1995:33) menyatakan "*self identifications as a distinct ethnic group, experience of exploitation, dislocation and vulnerability, long connection with the region, the wish to sustain their distinct identity, non-dominance in national society, close affinity a particular land or territory, historic continuity with prior occupants of land in the region, regarded as indigeneous by the ambient population, distinct objective characteristics such as language, race, material and spiritual culture, etc*". Ikon penanda oleh Kingsbury sering digunakan untuk menyatakan masyarakat adat. Walaupun terdapat istilah yang dipergunakan oleh setiap suku bangsa di Indonesia. Inti terminologi yang dipergunakan adalah satu kesatuan komunitas dengan karakteristik yang 'sama'. Aspek kehidupan, tetapi juga perjuangan mereka dalam menjalani kehidupan kesehariannya yang berhadapan dengan sistem kolonialisme pada zaman lampau dan pemerintahan sendiri sekarang ini.

4.2.2 Property Rights Adat dan Masyarakat Adat

Adat dalam struktur masyarakat merupakan sistem yang sangat dinamis keberadaannya dimana aspek keulayatan tidak mengikat para anggotanya melainkan kebersamaan dan pemahaman akan pengetahuan bersama yang menjadi pengikat keutuhan sosial budaya mereka. Baik dalam kaitan duniawi terlebih kaitan kerohanian yang terbentuk dalam pengetahuan

sosial metafisika, Kekuatan kerohanian ini terikat pada hubungan kekerabatan yang sangat kuat, baik secara tidak langsung karena perkawinan atau pertalian genealogis. Hukum kemasyarakatan kemudian menjadi pengikat masyarakat ini yang digunakan untuk mengatur tata hidup mereka dalam lingkungan adat. Hukum adat juga dijadikan sebagai aturan berperilaku yang hanya berlaku bagi golongan mereka, yang sifatnya mengikat, memaksa, dipatuhi, diyakini dan diteladani oleh masyarakat penganut budayanya. Hanya saja, sebagian besar aturan tersebut dinyatakan secara verbal belum dikodifikasikan dalam bentuk peraturan yang berlaku.

Masyarakat adat dikaitkan dengan satu kesatuan atau kelompok masyarakat yang mempunyai batas yurisdiksi tertentu yang ditempati secara lokal sebagai "*Indigenous Peoples atau Indigeous community*", memiliki hak ulayat dan sumber daya alam, pola perilaku yang diikat oleh adat, dan intitusi adat untuk dapat mempertahankan keberlanjutan kehidupannya. Terdapat empat ciri pembeda yang dilimpahkan dari satu generasi kepada generasi penerusnya yang sering dianggap sebagai identitas mereka, antara lain;

1. Karakter budaya mencakup; bahasa, nilai keagamaan, nilai sosial budaya yang diwariskan, sikap dan perilaku manusia;
2. Ilmu pengetahuan, melingkupi pengetahuan sistem perbintangan astronomi dan sistem pertanian, pengobatan, permainan tradisional, pendidikan, dan pengetahuan maupun inovasi lainnya;
3. Teritorial sebagai hak hidup yang mendukung sistem kehidupan, mencakup simbolisasi terhadap alam, sistem kepercayaan dan sosial-budaya; serta
4. Adat (*roles of The Law*) dan kelembagaan adat (institusi) aturan-aturan dan tata kekerabatan struktur organisasi

adat dalam konteks ekologis, sosial-budaya, ekonomi. Pengaturan terhadap sumber daya.

Dalam berbagai konteks sering kita mendengarkan beberapa istilah yang dimerujuk pada masyarakat adat, yaitu pribumi atau penduduk asli, masyarakat lokal tradisional, komunitas terpencil, dengan berbagai penamaan lainnya yang bersifat lokal. Misalnya penyebutan Adat “Sasi” di Maluku Utara dan Papua Barat, terdapat “Pallima Betteng” di masyarakat Selayar, terdapat “O diada O dibiaya” pada masyarakat Mandar di Sulawesi Barat, “Ada’ tellu” atau “Ada Pltu” pada masyarakat Sulawesi Selatan. Serta berbagai sebutan yang ada, pada masyarakat lokal dengan mempertimbangkan identitas bahasa, ikatan kekerabatan, sistem kawasan terikat pada warisan budaya, serta sebagai subjek hukum.

Konvensi masyarakat adat pertama yang menjadi penetapan terhadap pengakuan masyarakat adat dilahirkan dalam Konvensi ILO No. 169 tahun 1989 Konvensi tersebut menetapkan prinsip utama konvensi tersebut adalah perlindungan terhadap masyarakat adat atas kebudayaan, gaya hidup, tradisi, dan perilaku masyarakatnya. Konvensi ini juga bertujuan untuk merevisi Konvensi ILO No. 107/1957 tentang Konvensi Masyarakat Adat 1957. Selanjutnya, faktor yang membedakan Masyarakat Adat dengan sistem kerajaan atau kesultanan dinyatrakan secara tegas mengingat sistem kerajaan atau kesultanan merupakan konsep negara lama. bukan dibentuk oleh suatu komunitas yang terikat secara sah dan dibangun dengan seketaraan soial budaya .

Sementara itu, *Declaration on the Rights of Indigenous Peoples* (UNDRIP) oleh Persatuan Bangsa Bangsa juga memberikan pemahaman tentang karakteristik masyarakat adat, diantaranya mampu melakukan identifikasi diri (*self-identification*) yang berbeda dengan sistem kelarajaan ataupun negara modern mempunyai latar belakang sejarah yang secara

kontinu eksis atau hadir, merupakan penduduk lokal yang mempunyai riwayat panjang, memiliki hubungan *transcendental* dengan wanua {negeri} dan kawasan teritorial, memiliki identitas kebudayaan dan kehidupan, serta khasnya sistem sosial ekonomi politik.

Pasal 18B ayat (2) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 juga menyuarakan bahwa "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang." Sementara itu pada pasal 28I ayat (3) lebih menegaskan mengenai "Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.", Namun, fakta menunjukkan dalam pola keberagaman masyarakat adat yang tersebar di seluruh pelosok Indonesia terdapat berbagai kelompok minoritas dinegasikan keberadaanya, disebabkan oleh berbagai faktor yang berhubungan dengan kesejarahan, kelas sosial, kesulitan akses, keterbatasan komunikasi dan hubungan yang masih sangat individualistik. Mereka bahkan tidak mampu untuk beradaptasi dengan masyarakat yang lebih besar karena mengalami keterbatasan sosial sebagai akibat dari identitas yang melekat pada masyarakat tersebut. Pola hidup mereka yang *sporadic* sering dianggap mengganggu dalam sistem tatanan pemerintahan terutama ditingkat paling bawah. Dalam komunitas mereka yang terdapat beberapa *cluster* minoritas wanita - anak, penyandang disabilitas, lansia yang memiliki ke khasan tertentu dalam bidang fisik, maupun minoritas gender dan seksual dalam hal ini "Bissu" di Sulawesi Selatan dan "Warok" di Jawa Timur, dimana perilakunya dianggap berbeda dengan *mainstream* budaya menyebabkan berbagai hal yang tidak menguntungkan baik secara ekonomi dan sosial bahkan budaya seringkali di tiadakan

karena sifatnya yang sangat kecil dan terbentuk dalam suatu sistem kemasyarakatan yang sangat kecil. Maka, penegasan terhadap keberadaan Masyarakat Adat pun menjadi suatu hal yang penting dalam rangka pengakuan terhadap identitas sosial budaya sehingga mereka dapat mempertahankan nilai budaya yang mereka miliki.

Eksistensi masyarakat adat juga semakin bertambah dengan ditetapkannya Hutan adat yang kepemilikannya dilandaskan atas adat. Sebagai contoh pada To Kajang di Kabupaten Bulukumba pengakuan tersebut memberikan hak ulayat kepada mereka. Kepemilikan tersebut didukung oleh surat keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) nomor 35/PUU-X/2012 mengenai hutan adat yang menegaskan revisi UU Nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan. Keputusan tersebut memberikan konsekuensi terhadap keberadaan adat sebagai bagian tataran aturan pelestarian alam terutama penetapan batas kawasan hutan adat, dan pembagian kewenangan antara masyarakat hukum adat dengan negara dalam tata kelola hutan.

Keputusan MK ini disambut positif setelah beberapa ahli yang menyatakan bahwa pengelolaan hutan yang terbaik adalah mereka yang hidup bersama dan berada di sekitar hutan seperti masyarakat adat. Sehingga negara berkewajiban untuk memberikan kejelasan terhadap dampak hukum dari keputusan tersebut, terkhusus pada pembahasan dua Rancangan Undang-Undang (RUU) yaitu RUU Pertanahan dan RUU Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat (RUU PPMA). Selanjutnya konsekuensinya, konsekuensi yang diberikan pemerintah di atas hutan adat wajib dilakukan peninjauan. Sehingga nantinya mendapatkan konsekuensi ajib mendapatkan persetujuan dari masyarakat hukum adat. Status penguasaan hak ulayat tidak perlu dikukuhkan melalui sertifikat, tapi cukup diregistrasi seperti pada tanah-tanah yang dikuasai negara.

Penetapan batas ulayat hutan adat diusulkan agar dapat berlangsung secara terbuka dan partisipatif, dengan memberikan kemampuan kepada seluruh masyarakat adat untuk melakukan *self identification* termasuk dalam pengaturan tata kelolanya dengan mengintegrasikan sistem pengelolaan adat didalam sistem hukum. Walaupun telah mendapatkan justifikasi sebagai bagian dari subjek hukum, dalam kaitannya dengan UU pokok agraria, masyarakat adat dalam upaya menetapkan fungsi hutan adat sebagai bagian dari sistem adat yang mereka jalankan dan yang mereka kuasai tetap perlu meminta persetujuan negara. Proses dalam pembenahan berbagai peraturan lainnya dan mengatasmakan dengan peratauran yang telah ditetapkan dalam kaitannya dengan masyarakat adat dan hukum adat penting untuk diperjuangkan agar pengakuan terhadap keberadaan adat sebagai satu bagian dari sistem hukum yang diakui keberadaanya dan masyarakat adat sebagai institusi pengelolaannya masih membutuhkan pengetahuan yang lebih jauh sehingga pembangunan berkelanjutan dapat diimplementasikan dengan baik.

Berbagai pendapat para ahli lebih mengerucut pada implementasi dari keputusan MK terdapat tiga pendekatan kebijakan yang dapat dijadikan sebagai pola dasar yaitu, melakukan penertiban dan justifikasi atas keberadaan masyarakat adat dan hukum adat yang melekat pada mereka, kedua, penyelesaian konflik antara pemerinah dan masyarakat adat maupun antara swasta dengan masyarakat adat, dan ketiga perbaikan tata kelola di bidang pertanahan yang adil dan dapat memberikan dampak terhadap kelestarian lingkungan.

Setelah mendapatkan justifikasi, status hukum, maka adat sebagai subjek hukum akan dapat memberikan penguatan dalam penguasaan hutan adat namun hal ini masih memerlukan waktu untuk dapat sinkronisasi dengan aturan

hukum lainnya. termasuk dalam undang undang tataruang , undang undang kelautan dan kawasan pesisir , RUU Pertanahan dan RUU PPMA, dan secara bersamaan perbaikan berbagai peraturan pemerintah, kementerian dan pemerintah provinsi, kabupaten kota. Upaya untuk memperjuangkan terus RUU masyarakat adat dan menjaganya konsistensi agar sesuai dengan semangat putusan MK akan memberikan jalan pada kedaulatan masyarakat adat.

Perbaikan peraturan yang berlaku minimal dapat memuat: (1) Rencana dan strategi percepatan pemetaan Masyarakat Hukum Adat (MHA) yang meliputi ulayat, intitusi, aturan hukum serta mekanisme penyelesaian konflik-sengketa berdasarkan hukum adat; (2) Pengakuan atas kedaulatan territorial wajib dilampiri dengan Peta Ulayat MHA; (3) Kebijakan khusus untuk program pemberdayaan (4). Justifikasi manfaat terkait hutan adat kepada MHA yang didasarkan dan disesuaikan dengan kepentingan konservasi, lindung, ekosistem, dan penjagaan kawasan hutan sesuai dengan berbagai peraturan perundangan yang berlaku.

4.2.3 Private Property Rights and Market Prices

Setiap *property rights* tentunya akan memberikan kemampuan suatu masyarakat untuk dapat mengelola sumber daya yang mereka miliki. Kemampuan untuk dapat memberikan nilai terhadap sumberdaya tersebut tentunya akan menjadi nilai tersendiri secara ekonomi maupun secara finansial. Teori utama yang wajib dipahami adalah setiap sumberdaya memiliki nilai ekonomi atau nilai finansial dan sifatnya tidak terbatas. Setiap kali terjadi perpindahan hak (*Rights*) maka akan terjadi transaksi baik itu berupa perpindahan kepemilikan yang dilakukan secara sukarela, maupun secara pasar ekonomi. Jika hak tau *rights* itu ditransfer dari orangtua ke anaknya tentunya akan menjadi

pemahaman yang berbeda tergantung pada nilai yang ada dalam persepsi dan pengetahuan sang anak . Nilai atau pengetahuan yang ditransfer tentunya akan mendapatkan tanggapan dari pihak lain terhadap kepemilikan terhadap sumberdaya dimana upaya untuk penguasaan sumber daya juga akan menjadi pertimbangan tertentu. Hanya ini tentunya akan menimbulkan “transaksi” dari satu pihak kepada pihak yang lain. Dan tentunya akan menimbulkan gejala, kemampuan dalam implementasi hukum adat yang kemudian akan mampu meredam gejala tersebut

*Defenisi **property rights*** juga merujuk pada satu kesatuan aturan dan hukum yang mengikat individu untuk melakukan berbagai upaya dalam kepemilikan tersebut jika seseorang atau sekelompok orang memiliki hak terhadap sumberdaya maka kemampuan orang tersebut akan kepemilikan akan menjadi mutlak sehingga harga yang ditentukan oleh pasar tidak dapat mengintervensi orang tersebut. Kemampuan untuk “*excludability*” atau melarang seseorang untuk dapat mengakses hak atau kepemilikan tersebut, akan membuat harga pasar tidak menentu atau tak terbatas. Disinilai peran dari masyarakat dalam menentukan nilai dari hak dan kepemilikan adat yang dilandasi atas pengetahuan dan pemahaman adat .

Property rights adalah perangkat hukum yang menentukan apa yang dapat dilakukan individu atau masyarakat khususnya masyarakat adat dengan sumberdaya mereka. Hukum dan peraturan yang digariskan dengan jelas oleh pemerintah akan secara aktif melindungi hak milik individu atau masyarakat yang dilandasi secara jelas atas pengetahuan. Selain menentukan dan menentukan kepemilikan properti, peraturan dan regulasi ini melindungi masyarakat apa pun yang terkait dengan menjadi pemilik sah properti tersebut. Definisi hak properti mengacu pada perangkat undang-undang yang menentukan apa yang

boleh dilakukan individu atau bisnis dengan properti mereka. Jika Anda adalah seseorang yang memiliki sebidang tanah, hak milik mengizinkan Anda untuk menjual tanah dan membangun di atasnya selain itu, hak milik melarang orang lain melakukan apa pun dengan tanah Anda tanpa izin Anda. Hak milik adalah seperangkat hukum yang menentukan apa yang dapat dilakukan individu atau bisnis dengan properti mereka. Aturan dan peraturan yang digariskan dengan jelas oleh pemerintah akan secara aktif menegakkan dan melindungi hak milik individu atau bisnis. Selain menentukan dan menentukan kepemilikan properti, peraturan dan regulasi ini melindungi keuntungan apa pun yang terkait dengan menjadi pemilik sah properti tersebut.

4.2.4 Institusional Issue

Adat sebagai suatu tataran aturan dan masyarakat adat sebagai identitas kemasyarakatan memerlukan suatu institusi atau kelembagaan yang dapat merangkul mereka dalam memperjuangkan hak dan kewajibannya. Institusi atau kelembagaan tersebut dapat dibentuk oleh mereka dalam kelompok atau komunitas yang berbasis pada tujuan yang sama. Kelembagaan tersebut ditingkat lokal juga sangat diperlukan dalam rangka menjaga eksistensi masyarakat adat yang telah mengalami akulturasi budaya dan atau penggabungan dengan berbagai macam budaya lainnya yang menyebabkan identitas budaya mereka mulai berkurang maknanya. Selain itu, berbagai isu yang mendasar pada masyarakat adat bukan hanya mencakup isu identitas diri atau pandangan hidup kemasyarakatan akan tetapi juga kemudian melebar pengaruhnya terhadap kelembagaan adat yang memiliki hak ulayah atas Kawasan adat yang telah mereka miliki secara turun temurun.

Hal ini juga mengakibatkan konflik yang sangat krusial ketika hak ulayah mereka kemudian dinegasikan oleh

intitusi negara dalam level yang paling rendah unifikasi konseptual tentang empat faktor dominan yang mempengaruhi masyarakat adat dan pengetahuan adat yang mereka miliki menyebabkan peran mereka dalam masyarakat menjadi termarginalisasi. Tiga isu utama dalam mekanisme kelembagaan yang menyebabkan berbenturan terhadap masyarakat adat berdampak pada lemahnya bargaining position masyarakat adat seperti "*superioritas versus inferioritas*", "*power versus powerless groups*", dan "*modern versus traditional*". Hal ini disebabkan oleh pengetahuan masyarakat adat terdiposisi oleh pengetahuan modern yang mampu menjangkau secara efektif kepada seluruh *stakeholder* pembangunan sementara itu pengetahuan masyarakat adat yang belum dikenali secara luas memerlukan waktu untuk dilakukan diseminasi dan menggali lebih dalam makna filosofisnya. Kedua, oposisi kembar (*binary opposition*) yang dikembangkan oleh masyarakat yang lebih luas terutama berkaitan dengan pemerintahan dan para pemilik modal serta *stakeholder* lainnya terus mendesak masyarakat adat menuju level dengan bargaining yang lemah. Disisi lainnya, kemampuan adatif masyarakat adat yang masih berpegang teguh kepada budaya yang mereka miliki kadang menjadia batu sandungan dalam proses pengambilan keputusan dan kadang terlalu bertele tele dengan prosedur yang terlalu rumit.

Terdapat 2 Konvensi yaitu; Konvensi ILO 107/1957 dan 169/1989 yang memberikan justifikasi berbagai isu penting terutama yang berkaitan "*indigenous peoples*" yang diasosiasikan sebagai masyarakat adat. Pertama, mengidentifikasi dan justifikasi keberadaan "*indigenous peoples*" secara tepat dan jelas sehingga dapat melindungi eksistensi mereka dalam suatu sistem kenegaraan. Kedua, pengakuan terhadap hak-hak ulayah adat dan pengetahuan

yang merfeka miliki sebagai landasan dalam mereka berperilaku. Ketiga, menjaga dan melestarikan hukum yang mereka anut dan akui dalam rangka memberikan penguatan terhadap kekayaan intelektual. Keempat, menghormati kekayaan intelektual dan hak ulayah masyarakat adat, dan *kelima*, melindungi *resoucer* dan tata cara mereka melestarikan dan efisiensi terhadap pemanfaatannya. Kelima, melindungi berbagai elemen yang berhubungan dengan "*indigenous peoples*", seperti aspek teritorial, history dan hak ulayah, sosial kemasyarakatan, dan prilaku melestarikan warisan leluhur yang berkelanjutan. Lima butir persyaratan untuk justifikasi keberadaan adat mengurangi persyaratan administrasi yang tidak mudah dipenuhi oleh komunitas adat di Indonesia.

4.3 Kesimpulan

Adat sebagai sebuah pengetahuan lokal mempunyai kekhasan dan keunikan yang perlu untuk dijaga dan dilestarikan keberadaanya sebagai sebuah aturan hukum yang berlaku secara spesifik dan sporadic . namun adat sebagai role of the law memberikan makna tersendiri dalam mengdalikan dan mengelola resources. DEfenisi adat dan adat masyarakat dalam International Labor Convention No. 169 /1989 dinyatakan sebagai satu kesatuan bangsa, suku, yang merupakan sekelompok komunitas yang memiliki lintasan history yang berbeda dengan masyarakat umumnya yang bertahan dan berkembang di satu daerah tertentu dimana mereka, ke khasan Adat yang dipengaruhi oleh sistem budaya yang tidak dimiliki oleh masyarakat pada umumnya .

DAFTAR PUSTAKA

- Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) nomor 35/PUU-X/2012
putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor
41 Tahun 1999 tentang Kehutanan terhadap Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
Kingsbury (1995:33) Indigenous Peoples” in International Law: A
Constructivist Approach to the Asian Controversy
Published online by Cambridge University Press: 27
February 2017
- Konvensi International Labor Organisation Convention 107
/1957 C107 - Indigenous and Tribal Populations
Convention, 1957 (No. 107)
- Konvensi International Organisation Labor Convention No. 169
/1989 C169 - Indigenous and Tribal Peoples Convention,
1989 (No. 169)
- Peoples, by the General Assembly on Thursday, 13 September
2007 Dirawan, Gufran Darma 2001. Lokal Versus Central;
The Role of Adat in Managing Coastal Resources. Theses,
The Australian National University.
- Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan
Nasional Nomor 5 Tahun 1999
Tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat
Masyarakat Hukum Adat
- Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
Pasal 18B ayat (2) dan pasal 28I ayat (3)
- United Nations Declaration on The Rights of Indigenous

BAB 5

EKOLOGI ANTROPOLOGI

Oleh Yosef Adicita

5.1 Pendahuluan

5.1.1 Pengertian Ekologi dan Antropologi

Kehidupan manusia tidak dapat dipisahkan dari lingkungan sekitarnya. Oleh karena itu, mempelajari interaksi antara manusia dan lingkungan adalah suatu hal yang penting. Dua disiplin ilmu yang mempelajari interaksi tersebut adalah antropologi dan ekologi. Dalam artikel ini, kita akan membahas pengertian antropologi dan ekologi serta kaitannya dalam memahami hubungan manusia dan lingkungan.

Antropologi adalah studi mengenai manusia dan budaya manusia. Dalam antropologi, manusia dipelajari sebagai makhluk sosial yang memiliki berbagai macam kebudayaan dan cara hidup. Antropologi melihat manusia dari sudut pandang historis, sosial, dan budaya, serta bagaimana aspek-aspek tersebut mempengaruhi kehidupan manusia. Antropologi juga mencakup studi tentang hubungan manusia dengan lingkungan alam. (Rote and Zwick, 2011)

Sementara itu, ekologi adalah studi mengenai interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungan sekitarnya. Dalam ekologi, dilihat bagaimana organisme hidup saling berinteraksi dengan lingkungan hidupnya dan bagaimana interaksi tersebut mempengaruhi kelangsungan hidup organisme tersebut. Studi ekologi meliputi berbagai aspek, seperti siklus air, iklim, struktur tumbuhan, dan interaksi antara predator dan mangsa. (Djohar Maknum, S.Si., 2017)

Dalam kaitannya dengan manusia, ekologi mempelajari bagaimana manusia memanfaatkan sumber daya alam dan bagaimana aktivitas manusia mempengaruhi lingkungan. Sementara antropologi mempelajari bagaimana manusia beradaptasi dan mempengaruhi budaya mereka dan lingkungan sekitarnya. Kedua disiplin ilmu ini sangat penting dalam memahami interaksi manusia dan lingkungan.

Dalam artikel ini, kita akan membahas lebih dalam kaitan antara antropologi dan ekologi serta bagaimana studi ini dapat membantu memahami hubungan manusia dan lingkungan secara holistik dan menyeluruh.

5.1.2 Kaitan Antara Ekologi dan Antropologi

Interaksi manusia dengan lingkungannya merupakan sebuah topik yang menjadi fokus perhatian para ilmuwan selama berabad-abad. Namun, pemahaman terhadap kompleksitas hubungan antara manusia dan lingkungan memerlukan pendekatan interdisipliner yang melibatkan beberapa disiplin ilmu, termasuk antropologi dan ekologi. Antropologi dan ekologi memiliki fokus dan pendekatan yang berbeda dalam memahami interaksi manusia dan lingkungan, namun keduanya saling terkait dan saling mempengaruhi dalam membangun pemahaman yang holistik.

Antropologi merupakan ilmu sosial yang mempelajari manusia dan kebudayaannya, termasuk nilai, norma, adat istiadat, serta pola-pola perilaku sosial manusia. Studi antropologi juga memperhatikan bagaimana manusia beradaptasi dengan lingkungannya, termasuk cara manusia memanfaatkan sumber daya alam dan memperoleh kebutuhan hidupnya dari lingkungan sekitarnya. Di sisi lain, ekologi merupakan ilmu yang mempelajari interaksi antara organisme hidup dan lingkungannya. Studi ekologi memperhatikan bagaimana organisme hidup berinteraksi dengan lingkungannya,

termasuk bagaimana manusia memanfaatkan sumber daya alam dan bagaimana aktivitas manusia mempengaruhi lingkungan.

Kedua disiplin ilmu ini memiliki keterkaitan yang erat dalam memahami kompleksitas hubungan manusia dan lingkungan. Antropologi memberikan perspektif yang penting dalam memahami bagaimana manusia beradaptasi dengan lingkungannya, termasuk cara manusia memanfaatkan sumber daya alam dan memperoleh kebutuhan hidupnya dari lingkungan sekitarnya. Sementara itu, ekologi memberikan perspektif yang penting dalam memahami interaksi antara manusia dan lingkungan serta dampak dari aktivitas manusia terhadap lingkungan. (Ellis, 2015)

Dalam artikel ini, kita akan membahas lebih dalam keterkaitan antara antropologi dan ekologi serta bagaimana studi ini dapat membantu memahami kompleksitas hubungan manusia dan lingkungan secara holistik dan menyeluruh. Kita akan melihat bagaimana kedua disiplin ilmu ini saling mempengaruhi dan saling melengkapi dalam membangun pemahaman yang komprehensif terhadap interaksi manusia dan lingkungan.

5.1.3 Tujuan Penulisan Artikel

Tujuan dari penulisan artikel tentang ekologi dan antropologi adalah untuk memperdalam pemahaman tentang kompleksitas hubungan manusia dan lingkungan, serta bagaimana keduanya saling terkait dan mempengaruhi satu sama lain. Artikel ini akan membahas berbagai isu yang berkaitan dengan interaksi manusia dan lingkungan, termasuk bagaimana manusia memanfaatkan sumber daya alam, bagaimana aktivitas manusia mempengaruhi lingkungan, dan bagaimana manusia beradaptasi dengan lingkungannya.

Selain itu, artikel ini juga bertujuan untuk menunjukkan pentingnya pendekatan interdisipliner dalam memahami kompleksitas hubungan manusia dan lingkungan. Dalam artikel ini, akan dibahas tentang bagaimana pendekatan antropologi dan ekologi dapat saling melengkapi dan membantu memahami interaksi manusia dan lingkungan secara holistik.

Melalui artikel ini, diharapkan pembaca akan memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana manusia dan lingkungan saling terkait dan saling mempengaruhi dalam membentuk keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan ekosistem. Selain itu, diharapkan artikel ini juga dapat memotivasi pembaca untuk mempertimbangkan pendekatan interdisipliner dalam memecahkan berbagai masalah lingkungan yang dihadapi oleh manusia saat ini.

5.2 Konsep Ekologi

5.2.1 Pengertian ekologi dan ruang lingkupnya

Ekologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan antara makhluk hidup (organisme) dan lingkungannya. Ilmu ekologi membahas tentang cara-cara organisme beradaptasi dengan lingkungannya, bagaimana organisme berinteraksi dengan organisme lain dan bagaimana lingkungan berubah seiring waktu. (Ellis, 2015)

1. Konsep Ekologi

Ilmu ekologi didasarkan pada beberapa konsep dasar, yaitu:

- a. Biosfer: Seluruh lingkungan hidup di bumi yang dihuni oleh makhluk hidup.
- b. Populasi: Sejumlah individu dari spesies yang sama yang hidup bersama-sama di suatu wilayah.
- c. Komunitas: Kumpulan dari populasi organisme yang berbeda spesies yang hidup bersama-sama dan saling berinteraksi di suatu wilayah.

- d. Ekosistem: Suatu wilayah yang terdiri dari komunitas organisme hidup dan lingkungannya (abiotik dan biotik) yang saling mempengaruhi.
- e. Bioma: Suatu wilayah yang memiliki karakteristik iklim, vegetasi, dan fauna yang sama.

2. Ruang Lingkup Ekologi

Ruang lingkup ilmu ekologi meliputi berbagai aspek, seperti :

- a. Hubungan antara organisme dan lingkungannya : Ekologi mempelajari bagaimana organisme hidup beradaptasi dengan lingkungan dan bagaimana lingkungan mempengaruhi keberadaan dan kelangsungan hidup organisme.
- b. Dinamika populasi : Ekologi mempelajari faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan, penurunan, dan interaksi antara populasi organisme yang sama.
- c. Komunitas dan keanekaragaman hayati : Ekologi mempelajari bagaimana komunitas organisme berinteraksi satu sama lain dan dengan lingkungannya, serta bagaimana keanekaragaman hayati terjaga di suatu wilayah.
- d. Ekosistem dan siklus biogeokimia : Ekologi mempelajari interaksi antara organisme dan lingkungan abiotik, serta siklus energi dan materi di dalam ekosistem.
- e. Konservasi dan restorasi lingkungan : Ekologi mempelajari cara-cara menjaga dan memulihkan keberlangsungan ekosistem dan keanekaragaman hayati.
- f. Dalam keseluruhan, ilmu ekologi membahas bagaimana organisme hidup berinteraksi dengan lingkungan dan bagaimana lingkungan mempengaruhi keberlangsungan hidup organisme. Ilmu ini juga

membahas bagaimana manusia mempengaruhi lingkungan dan bagaimana kita dapat menjaga dan memulihkan keberlangsungan ekosistem.

5.2.2 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Ekosistem

Ekosistem adalah suatu sistem kompleks yang terdiri dari makhluk hidup (biotik) dan lingkungan fisik (abiotik) yang saling bergantung satu sama lain. Terdapat berbagai faktor yang mempengaruhi keberlangsungan ekosistem, baik faktor biotik maupun abiotik. Berikut adalah penjelasan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi ekosistem. (Djohar Maknum, S.Si., 2017)

1. Iklim dan cuaca: Iklim dan cuaca mempengaruhi pertumbuhan tumbuhan dan kegiatan organisme lain, seperti migrasi dan hibernasi. Perubahan iklim dan cuaca yang drastis dapat mempengaruhi distribusi dan kelangsungan hidup suatu spesies.
2. Ketersediaan air: Air adalah unsur penting bagi keberlangsungan hidup organisme. Ketersediaan air yang cukup dan kondisi drainase yang baik akan memfasilitasi penyerapan nutrisi oleh tumbuhan dan mempengaruhi pertumbuhan tumbuhan dan perkembangan organisme lain
3. Tanah dan nutrisi: Tanah adalah lingkungan hidup bagi sebagian besar tumbuhan dan mikroorganisme. Kualitas dan jenis tanah mempengaruhi pertumbuhan tumbuhan dan ketersediaan nutrisi untuk organisme lain
4. Ketersediaan makanan: Ketersediaan makanan yang cukup dan variasi jenis makanan yang tersedia mempengaruhi kelangsungan hidup organisme. Ketersediaan makanan yang cukup akan mempengaruhi pertumbuhan populasi organisme.

5. Predasi dan parasitisme: Interaksi antara predator dan mangsa, serta parasitisme, mempengaruhi distribusi dan kelangsungan hidup spesies. Organisme yang rentan terhadap predasi dan parasitisme dapat mengalami penurunan populasi.
6. Kebakaran: Kebakaran alami atau manusia dapat mempengaruhi ekosistem dengan merusak habitat dan mempengaruhi keanekaragaman hayati. Kebakaran dapat mempengaruhi jumlah dan jenis tumbuhan dan binatang yang hidup di suatu daerah.
7. Kegiatan manusia: Kegiatan manusia seperti penebangan hutan, pembangunan pemukiman, dan polusi lingkungan dapat mempengaruhi keberlangsungan ekosistem dan keanekaragaman hayati. Aktivitas manusia dapat merusak atau mengubah habitat asli suatu spesies dan menyebabkan penurunan populasi.
8. Dalam ekosistem, setiap faktor mempengaruhi faktor lainnya dan saling terkait. Oleh karena itu, perubahan pada satu faktor dapat mempengaruhi keberlangsungan ekosistem secara keseluruhan. Penting untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi ekosistem agar kita dapat memelihara ekosistem dan keanekaragaman hayati untuk generasi mendatang.

5.2.3 Dampak Perubahan Lingkungan terhadap Ekologi

Perubahan lingkungan dapat memiliki dampak yang signifikan terhadap ekologi dan keanekaragaman hayati. Perubahan lingkungan yang disebabkan oleh aktivitas manusia, seperti deforestasi, polusi, dan perubahan iklim, dapat mengganggu ekosistem dan mempengaruhi ketersediaan makanan, habitat, dan kondisi hidup organisme.(Crutzen, P.J., & Stoermer, 2015) Berikut adalah beberapa dampak perubahan lingkungan terhadap ekologi:

1. Penurunan keanekaragaman hayati: Perubahan lingkungan dapat mempengaruhi kondisi hidup dan ketersediaan makanan bagi suatu spesies. Akibatnya, spesies tertentu dapat mengalami penurunan populasi atau bahkan kepunahan. Ini akan menyebabkan penurunan keanekaragaman hayati dan dapat mengganggu keseimbangan ekosistem.
2. Peningkatan spesies invasif: Perubahan lingkungan dapat memungkinkan spesies invasif yang tidak berasal dari daerah tersebut untuk tumbuh dan berkembang. Spesies invasif dapat merusak ekosistem asli dengan cara mengambil sumber daya yang seharusnya tersedia untuk spesies lain.
3. Perubahan migrasi: Perubahan lingkungan, seperti perubahan suhu atau ketersediaan makanan, dapat mempengaruhi pola migrasi dari beberapa spesies. Perubahan ini dapat mengganggu pola kawin dan penyebaran biji tumbuhan yang dapat berdampak pada keanekaragaman hayati dan keberlangsungan spesies.
4. Ketergantungan manusia terhadap ekosistem: Manusia bergantung pada ekosistem untuk makanan, air, dan sumber daya alam lainnya. Perubahan lingkungan yang merusak atau mengganggu ekosistem dapat mempengaruhi ketersediaan sumber daya dan makanan bagi manusia.
5. Perubahan iklim: Perubahan iklim yang disebabkan oleh aktivitas manusia dapat mempengaruhi ketersediaan makanan, air, dan kondisi hidup bagi organisme. Akibatnya, organisme tersebut dapat mengalami penurunan populasi atau bahkan kepunahan.
6. Polusi lingkungan: Polusi lingkungan dapat mempengaruhi kondisi hidup dan kesehatan organisme, serta mengganggu ketersediaan makanan dan sumber daya alam. Akibatnya,

spesies dapat mengalami penurunan populasi atau bahkan kepunahan.

Dalam kesimpulannya, perubahan lingkungan dapat memiliki dampak yang signifikan terhadap ekologi dan keanekaragaman hayati. Oleh karena itu, kita harus memperhatikan aktivitas kita dan bagaimana itu mempengaruhi lingkungan sekitar kita. Kita perlu menjaga keberlangsungan ekosistem agar dapat mendukung keberlangsungan hidup kita serta keanekaragaman hayati yang ada di dalamnya. (Bricker, 2016)

5.3 Konsep Antropologi

Antropologi berasal dari kata Yunani "anthropos" yang berarti manusia dan "logos" yang berarti ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, antropologi dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari manusia dalam berbagai aspeknya, termasuk aspek budaya, sosial, biologis, dan sejarah. (Hughes, 2003)

Antropologi merupakan ilmu multidisiplin yang memadukan antara metode ilmiah dan humaniora untuk mempelajari beragam fenomena manusia. Dalam menjalankan riset, antropolog sering melakukan studi lapangan dan observasi secara langsung terhadap masyarakat atau kelompok manusia yang diteliti. (Ellis, 2015) Secara umum, antropologi memiliki empat bidang kajian, yaitu:

1. Antropologi budaya (*cultural anthropology*): mempelajari kebudayaan manusia dan bagaimana kebudayaan tersebut memengaruhi cara manusia hidup dan berinteraksi di dalam masyarakat.
2. Antropologi arkeologi (*archaeology*): mempelajari kehidupan manusia pada masa lampau, dengan menggunakan benda-benda peninggalan dari zaman purba, seperti artefak, bangunan, dan kuburan.

3. Antropologi fisik (*physical anthropology*): mempelajari aspek biologis manusia, seperti genetika, evolusi, dan keragaman fisik antara manusia.
4. Antropologi linguistik (*linguistic anthropology*): mempelajari bahasa dan cara manusia berkomunikasi, serta bagaimana bahasa memengaruhi cara manusia berpikir dan berinteraksi di dalam masyarakat.

Dalam melakukan penelitian, antropolog sering menggunakan metode kualitatif yang melibatkan pengumpulan data secara mendalam, seperti wawancara, observasi, dan studi kasus. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif untuk memahami fenomena manusia yang diteliti.

5.3.1 Dampak aktivitas manusia terhadap lingkungan

Aktivitas manusia memiliki dampak yang signifikan terhadap lingkungan, baik dalam skala lokal maupun global. Beberapa dampak tersebut antara lain:

1. Pencemaran udara: aktivitas industri, transportasi, dan pembakaran bahan bakar fosil menghasilkan emisi gas yang dapat merusak kualitas udara. Pencemaran udara dapat menyebabkan gangguan kesehatan pada manusia dan hewan, serta merusak tanaman dan ekosistem.
2. Pencemaran air: aktivitas industri, pertanian, dan rumah tangga menghasilkan limbah yang dapat mencemari air dan mengganggu kualitas air. Pencemaran air dapat berdampak pada kesehatan manusia dan hewan, serta merusak ekosistem air.
3. Deforestasi: penggundulan hutan secara besar-besaran untuk kepentingan industri, pertanian, dan pemukiman manusia dapat merusak ekosistem hutan dan mempercepat perubahan iklim.
4. Perubahan iklim: aktivitas manusia seperti pembakaran bahan bakar fosil dan deforestasi menyebabkan

peningkatan emisi gas rumah kaca yang mempercepat perubahan iklim global. Perubahan iklim dapat berdampak pada kesehatan manusia, ekonomi, dan lingkungan secara keseluruhan. Iklim dan cuaca: Iklim dan cuaca mempengaruhi pertumbuhan tumbuhan dan kegiatan organisme lain, seperti migrasi dan hibernasi. Perubahan iklim dan cuaca yang drastis dapat mempengaruhi distribusi dan kelangsungan hidup suatu spesies.

5. Kerusakan habitat: aktivitas manusia seperti pembangunan infrastruktur, industri, dan pertanian dapat merusak habitat alami dan mengancam kelangsungan hidup spesies hewan dan tumbuhan.
6. Pemanasan global: aktivitas manusia yang menghasilkan emisi gas rumah kaca mempercepat pemanasan global yang dapat berdampak pada kesehatan manusia, lingkungan, dan ekonomi secara global.

Dampak aktivitas manusia terhadap lingkungan ini memerlukan upaya untuk mengurangi dampak tersebut melalui berbagai program lingkungan dan kebijakan yang berfokus pada pengurangan emisi gas rumah kaca, perlindungan habitat alami, dan pengelolaan limbah secara efektif. Selain itu, edukasi dan kesadaran masyarakat juga perlu ditingkatkan untuk mengurangi dampak aktivitas manusia terhadap lingkungan. (Cairns, 2004)

5.3.2 Pengaruh kebudayaan terhadap lingkungan

Kebudayaan merupakan suatu pola perilaku dan cara hidup masyarakat yang membentuk identitas budaya mereka. Pola perilaku dan cara hidup tersebut dapat mempengaruhi lingkungan di sekitarnya. Berikut adalah beberapa pengaruh kebudayaan terhadap lingkungan:

1. Pola konsumsi: Kebudayaan dapat mempengaruhi pola konsumsi masyarakat, termasuk pola konsumsi sumber

- daya alam. Pola konsumsi yang berlebihan dan tidak berkelanjutan dapat menyebabkan kerusakan lingkungan.
2. Teknologi: Kebudayaan juga dapat mempengaruhi teknologi yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Teknologi yang tidak ramah lingkungan dapat menyebabkan dampak negatif terhadap lingkungan.
 3. Pendekatan spiritual: Beberapa budaya memiliki pendekatan spiritual terhadap alam dan lingkungan. Budaya seperti ini menghargai alam dan lingkungan sebagai bagian integral dari kehidupan mereka, dan cenderung memiliki sikap lebih ramah lingkungan.
 4. Peran gender: Budaya dapat mempengaruhi peran gender dalam masyarakat. Peran gender yang tidak seimbang dapat menyebabkan dampak negatif terhadap lingkungan. Sebagai contoh, ketika perempuan memainkan peran utama dalam pertanian dan pengelolaan sumber daya, mereka cenderung lebih mempertahankan lingkungan dan memperhatikan keberlanjutan sumber daya.
 5. Tradisi dan kepercayaan: Budaya dapat mempengaruhi tradisi dan kepercayaan masyarakat terhadap lingkungan. Beberapa budaya memiliki kepercayaan bahwa manusia harus hidup dalam keseimbangan dengan alam. Tradisi dan kepercayaan ini dapat membantu masyarakat dalam mempertahankan dan menjaga keberlanjutan lingkungan.

Pengaruh kebudayaan terhadap lingkungan memerlukan perhatian dan kesadaran dari masyarakat dan pemerintah. Pendidikan dan kesadaran lingkungan dapat membantu meningkatkan kepedulian dan pemahaman masyarakat tentang pentingnya menjaga keberlanjutan lingkungan. Selain itu, perlu juga diadopsi teknologi yang ramah lingkungan dan kebijakan yang berfokus pada keberlanjutan sumber daya.

5.4 Hubungan antara Ekologi dan Antropologi

5.4.1 Konsep Ekologi Budaya

Ekologi budaya adalah studi mengenai hubungan manusia dengan lingkungannya melalui aspek kebudayaan. Konsep ini mencoba untuk memahami bagaimana manusia mempengaruhi dan berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya melalui praktik budaya yang berbeda. Ekologi budaya melihat hubungan manusia dengan lingkungannya sebagai sebuah sistem yang saling mempengaruhi satu sama lain. (Harari, 2015)

Contoh dari konsep ekologi budaya adalah penggunaan sumber daya alam oleh masyarakat adat. Beberapa masyarakat adat memiliki aturan-aturan dan praktik-praktik yang kompleks dalam penggunaan sumber daya alam, seperti hutan, sungai, dan laut. Mereka mempertahankan keberlangsungan sumber daya alam dan berusaha meminimalkan dampak negatif pada lingkungan.

Sebagai contoh, masyarakat adat di daerah hutan hujan tropis mempunyai pengetahuan khusus dalam menjaga keanekaragaman hayati. Mereka memilih tanaman obat tradisional yang tidak hanya memberikan manfaat untuk kesehatan tetapi juga tidak membahayakan lingkungan sekitar. Masyarakat adat juga mempunyai aturan yang ketat dalam memanfaatkan kayu untuk membangun rumah dan peralatan rumah tangga, seperti menggunakan kayu yang sudah tua atau tidak lagi bisa dipakai.

Dalam hal ini, praktik budaya masyarakat adat telah menunjukkan cara mereka mempertahankan dan memelihara keberlangsungan ekosistem, sehingga dapat terus memberikan manfaat bagi kehidupan manusia. Dalam pengaplikasiannya, konsep ekologi budaya dapat membantu untuk membangun kerjasama antara masyarakat adat dan pemerintah, serta membantu untuk menciptakan kebijakan yang berkelanjutan dalam pengelolaan sumber daya alam.

5.4.2 Konsep adaptasi manusia terhadap lingkungan

Adaptasi manusia terhadap lingkungan adalah kemampuan manusia untuk beradaptasi dengan lingkungan sekitarnya agar dapat bertahan hidup. (Harari, 2015) Manusia selalu berusaha untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan fisik dan sosial di sekitarnya, baik melalui perubahan perilaku maupun perubahan fisik. Contoh dari konsep adaptasi manusia terhadap lingkungan adalah sebagai berikut:

1. Kebiasaan pemilihan jenis makanan dan cara memasak. Di daerah tropis, masyarakat memiliki kebiasaan makan makanan yang pedas dan penuh rempah-rempah, karena kandungan rempah-rempah tersebut dapat membantu melindungi tubuh dari bakteri dan virus. Selain itu, cara memasak juga disesuaikan dengan lingkungan yang ada, misalnya memasak dengan teknik yang menghemat bahan bakar di daerah yang kurang memiliki sumber daya bahan bakar.
2. Pembangunan rumah yang sesuai dengan kondisi lingkungan. Manusia di daerah tropis biasanya membangun rumah dengan atap yang tinggi dan sirkulasi udara yang baik untuk menghindari panas dan kelembaban. Di daerah yang rawan bencana alam, manusia membangun rumah dengan bahan yang tahan gempa atau banjir.
3. Penggunaan teknologi modern dalam pengelolaan sumber daya alam. Manusia mengembangkan teknologi seperti irigasi untuk mengatasi masalah kekeringan atau sistem pengolahan air untuk mengatasi masalah kualitas air yang buruk.

Dalam hal ini, adaptasi manusia terhadap lingkungan dapat membantu manusia untuk bertahan hidup dan mempertahankan keberlangsungan hidupnya di lingkungan yang

terus berubah. Namun, manusia juga harus memperhatikan dampak dari kegiatan adaptasi tersebut terhadap lingkungan dan mengembangkan teknologi yang berkelanjutan.

5.4.3 Pengaruh kebudayaan terhadap adaptasi manusia

Pengaruh kebudayaan terhadap adaptasi manusia dapat dilihat pada cara manusia berinteraksi dengan lingkungan dan bagaimana kebudayaan membentuk perilaku manusia dalam mengelola sumber daya alam. Berikut adalah penjelasan dan contoh dari pengaruh kebudayaan terhadap adaptasi manusia: (Crutzen, P.J., & Stoermer, 2015)

1. Pengetahuan tradisional dan sistem pengetahuan lokal. Pengetahuan tradisional yang dimiliki oleh masyarakat lokal dapat membantu manusia dalam beradaptasi dengan lingkungan sekitarnya. Contohnya, masyarakat adat di Kalimantan memiliki pengetahuan tentang cara bercocok tanam yang ramah lingkungan seperti berladang terbuka dan berladang rotasi, yang mampu mempertahankan keseimbangan ekosistem.
2. Kebiasaan dan adat istiadat. Kebiasaan dan adat istiadat yang dimiliki oleh suatu kelompok manusia juga memengaruhi cara mereka beradaptasi dengan lingkungan. Contohnya, masyarakat suku Batak di Sumatera Utara memiliki adat istiadat yang mengatur penggunaan sumber daya alam yang berkelanjutan, seperti mengatur jadwal memancing di danau dan sungai.
3. Perkembangan teknologi. Kebudayaan manusia juga mempengaruhi perkembangan teknologi yang digunakan dalam mengelola sumber daya alam. Contohnya, masyarakat suku Baduy di Banten menggunakan teknologi sederhana untuk mengolah air, seperti sistem penampungan air hujan dan pembuatan sumur tradisional.

4. Agama dan keyakinan. Agama dan keyakinan yang dianut oleh manusia juga memengaruhi cara mereka beradaptasi dengan lingkungan. Contohnya, masyarakat Bali memiliki kepercayaan yang kuat terhadap keberadaan roh di alam sekitar mereka, sehingga mereka memperlakukan alam dengan baik dan menjaga keseimbangan ekosistem.

Pengaruh kebudayaan terhadap adaptasi manusia dapat berdampak positif atau negatif terhadap lingkungan. Oleh karena itu, perlu adanya pemahaman dan kesadaran akan pentingnya keberlanjutan lingkungan dalam pengembangan kebudayaan dan adat istiadat manusia.

5.5 Studi Kasus

5.5.1 Hubungan antara Ekologi dan Antropologi pada Masyarakat Adat di Indonesia

Studi kasus mengenai hubungan antara ekologi dan antropologi pada masyarakat adat di Indonesia dapat dilihat dari kehidupan suku Dayak di Kalimantan. Suku Dayak merupakan salah satu suku asli di Indonesia yang masih mempertahankan kehidupan tradisional dan memiliki sistem kepercayaan yang kuat terhadap alam dan lingkungan sekitar. Mereka hidup dalam komunitas yang sangat tergantung pada sumber daya alam dan mempraktikkan sistem pertanian tradisional yang disebut dengan ladang berpindah.

Konsep ekologi dan antropologi sangat terkait erat dengan kehidupan suku Dayak. Mereka memahami bahwa lingkungan hidup merupakan sumber daya penting yang harus dijaga keberlangsungannya. Oleh karena itu, mereka mempraktikkan sistem pertanian berkelanjutan dengan cara memanfaatkan lahan yang sudah kosong dan membiarkan tanah itu kembali subur selama beberapa tahun sebelum digunakan kembali.

Selain itu, suku Dayak juga memiliki kepercayaan dan budaya yang sangat terkait dengan alam. Mereka memiliki berbagai upacara adat yang berkaitan dengan alam, seperti upacara panen dan upacara pembersihan hutan. Upacara-upacara ini merupakan bentuk penghargaan mereka terhadap alam yang memberi mereka kehidupan. Namun, perkembangan zaman dan modernisasi yang terus berlangsung di Indonesia juga berdampak pada kehidupan suku Dayak. Adanya perubahan iklim dan perubahan lingkungan yang disebabkan oleh aktivitas manusia, seperti pembukaan hutan untuk perkebunan dan tambang, telah mempengaruhi sistem kehidupan suku Dayak.

Banyak suku Dayak yang sekarang mulai meninggalkan sistem pertanian tradisional dan beralih ke sistem pertanian modern. Selain itu, perubahan lingkungan juga mempengaruhi keanekaragaman hayati yang ada di hutan dan menyebabkan hilangnya spesies-spesies tertentu yang diandalkan oleh suku Dayak sebagai sumber makanan.

Dalam konteks ini, peran antropologi sangat penting untuk memahami sistem kepercayaan dan budaya suku Dayak yang sangat terkait dengan lingkungan hidup. Dengan memahami sistem kepercayaan dan budaya suku Dayak, kita dapat memahami bagaimana mereka beradaptasi dengan lingkungan hidup yang selalu berubah. Sementara itu, ekologi juga memainkan peran penting dalam menjaga keberlangsungan lingkungan hidup yang menjadi sumber daya utama bagi suku Dayak dan masyarakat di seluruh Indonesia.

5.5.2 Contoh Dampak Perubahan Lingkungan terhadap Kehidupan Manusia

Perubahan lingkungan yang terjadi di seluruh dunia, termasuk perubahan iklim, deforestasi, dan polusi, telah memberikan dampak besar pada kehidupan manusia. Berikut

adalah beberapa contoh dampak perubahan lingkungan terhadap kehidupan manusia:

1. Kesehatan manusia Perubahan lingkungan dapat mempengaruhi kesehatan manusia secara langsung dan tidak langsung. Misalnya, polusi udara dapat menyebabkan masalah pernapasan dan penyakit jantung, sedangkan perubahan iklim dapat memperburuk penyebaran penyakit dan meningkatkan risiko bencana alam seperti banjir dan kekeringan.
2. Pangan dan air Perubahan lingkungan juga mempengaruhi produksi pangan dan ketersediaan air bersih. Perubahan iklim dan deforestasi dapat menyebabkan terjadinya kekeringan atau banjir yang dapat menghancurkan tanaman dan mempengaruhi pasokan air bersih.
3. Ekonomi Perubahan lingkungan dapat berdampak pada sektor ekonomi dan mengganggu mata pencaharian manusia. Contohnya adalah hilangnya sumber daya alam seperti hasil hutan, ikan, dan gas alam yang dapat mengancam keberlangsungan hidup masyarakat yang hidup dari sektor tersebut.
4. Budaya dan kearifan lokal Perubahan lingkungan dapat mengancam kearifan lokal dan budaya masyarakat yang tergantung pada lingkungan sekitarnya. Misalnya, adat dan kebudayaan masyarakat di Indonesia yang mengandalkan sumber daya alam dalam kehidupan sehari-hari dapat terancam punah karena rusaknya ekosistem.

Dampak-dampak tersebut menunjukkan betapa pentingnya menjaga keseimbangan ekosistem dan menyesuaikan kehidupan manusia dengan lingkungannya. Kita perlu berusaha untuk meminimalkan dampak negatif dan meningkatkan keberlanjutan dalam menjalani kehidupan sehari-hari.

5.5.3 Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Budaya pada Masyarakat Adat

Masyarakat adat memiliki hubungan yang sangat erat dengan lingkungan alam sekitarnya. Kehidupan mereka sangat bergantung pada ketersediaan sumber daya alam yang ada di sekitar mereka. Oleh karena itu, upaya pengelolaan lingkungan dan budaya sangat penting bagi kelangsungan hidup mereka.

Salah satu cara pengelolaan lingkungan yang dilakukan oleh masyarakat adat adalah dengan melakukan sistem pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Mereka mengatur cara penggunaan sumber daya alam agar tetap terjaga keberlangsungannya di masa depan. Misalnya, mereka melakukan penangkapan ikan dengan cara yang ramah lingkungan, seperti dengan menggunakan jaring yang sesuai dengan ukuran ikan atau memperbolehkan adanya periode larangan menangkap ikan untuk memberikan kesempatan bagi ikan untuk berkembang biak. (Djohar Maknum, S.Si., 2017)

Selain itu, masyarakat adat juga memiliki nilai-nilai budaya yang sangat kuat terkait dengan lingkungan sekitar. Mereka meyakini bahwa manusia dan lingkungan hidup saling bergantung satu sama lain. Oleh karena itu, mereka menjaga kelestarian lingkungan sekitar sebagai wujud penghormatan terhadap alam. Salah satu contohnya adalah dalam menjaga kelestarian hutan dengan melakukan tradisi adat yang disebut sebagai hutan keramat.

Di Indonesia, terdapat banyak contoh masyarakat adat yang melakukan upaya pengelolaan lingkungan dan budaya. Misalnya, Suku Dayak di Kalimantan melakukan pengelolaan hutan secara berkelanjutan dengan memanfaatkan sumber daya alam yang ada di hutan dengan cara yang ramah lingkungan. Mereka juga menjaga kebersihan sungai dan menanam berbagai jenis tumbuhan untuk menghindari terjadinya erosi tanah. Sementara itu, masyarakat adat di Nusa Tenggara Timur

melakukan upaya pengelolaan terumbu karang dengan menjaga kebersihan laut dan melakukan penangkapan ikan yang ramah lingkungan.

Dalam upaya pengelolaan lingkungan dan budaya pada masyarakat adat, diperlukan kerjasama dan partisipasi aktif dari semua pihak. Dukungan dari pemerintah dan masyarakat lainnya sangat dibutuhkan dalam menjaga kelestarian lingkungan dan budaya pada masyarakat adat.

5.6 Implikasi dan Dampak

5.6.1 Implikasi dari kaitan antara ekologi dan antropologi

Kaitan antara ekologi dan antropologi memberikan implikasi penting bagi keberlanjutan kehidupan manusia di bumi. Melalui pemahaman yang holistik terhadap lingkungan dan keberadaan manusia di dalamnya, maka dapat dilakukan upaya-upaya yang berkelanjutan untuk menjaga keseimbangan dan kelestarian alam, serta mengembangkan kebudayaan manusia yang berkelanjutan.

Dalam konteks ini, antropologi memberikan wawasan tentang bagaimana manusia berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya, bagaimana kebudayaan mempengaruhi pandangan manusia terhadap lingkungan, dan bagaimana manusia dapat beradaptasi dan berperan aktif dalam menjaga keberlanjutan lingkungan.

Sementara itu, ekologi memberikan pemahaman tentang bagaimana alam bekerja, bagaimana ekosistem terbentuk dan berinteraksi satu sama lain, serta bagaimana manusia mempengaruhi ekosistem tersebut. Dengan demikian, ekologi dapat membantu menemukan solusi untuk mengatasi masalah lingkungan yang diakibatkan oleh aktivitas manusia.

Dalam praktiknya, kaitan antara ekologi dan antropologi dapat diimplementasikan dalam berbagai kegiatan seperti pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan,

pengembangan kebudayaan yang berkelanjutan, pengendalian polusi dan kerusakan lingkungan, serta upaya peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga keberlanjutan lingkungan.(Zalasiewicz *et al.*, 2021)

Contoh konkret dari implementasi kaitan antara ekologi dan antropologi adalah pengelolaan hutan oleh masyarakat adat di Indonesia. Masyarakat adat memiliki kearifan lokal yang mengintegrasikan pemahaman tentang lingkungan dan kebudayaan, sehingga mereka dapat menjaga kelestarian hutan dengan cara yang berkelanjutan. Salah satu contohnya adalah adanya sistem tumpangsari atau kebun campuran yang ditanam di dalam hutan yang memungkinkan tanaman berbuah bergantian dan meminimalkan kerusakan hutan.

Dengan demikian, kaitan antara ekologi dan antropologi memiliki implikasi penting bagi keberlangsungan hidup manusia dan lingkungan di bumi. Melalui pemahaman yang holistik terhadap lingkungan dan keberadaan manusia di dalamnya, maka dapat dilakukan upaya-upaya yang berkelanjutan untuk menjaga keseimbangan dan kelestarian alam serta mengembangkan kebudayaan manusia yang berkelanjutan.(Hughes, 2003)

5.6.2 Dampak Kebijakan Lingkungan Terhadap Masyarakat

Kebijakan lingkungan merupakan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah atau lembaga tertentu dalam rangka melindungi dan memelihara lingkungan hidup. Tujuan dari kebijakan lingkungan adalah untuk menjaga keseimbangan ekosistem dan memastikan bahwa sumber daya alam dapat digunakan secara berkelanjutan. Namun, kebijakan lingkungan juga dapat memiliki dampak terhadap masyarakat yang tinggal di sekitar lingkungan yang dilindungi. (Adicita, Apritama and Afifah, 2020)

Dampak kebijakan lingkungan terhadap masyarakat dapat bersifat positif atau negatif, tergantung pada jenis

kebijakan dan bagaimana kebijakan tersebut dilaksanakan. Dampak positif dari kebijakan lingkungan adalah perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup yang lebih baik, sehingga sumber daya alam yang tersedia dapat digunakan secara berkelanjutan dan bertahan lama.

Namun, dampak negatif dari kebijakan lingkungan adalah bahwa masyarakat yang tinggal di sekitar lingkungan yang dilindungi seringkali kehilangan akses ke sumber daya alam yang mereka butuhkan untuk hidup. Misalnya, ketika suatu daerah ditetapkan sebagai kawasan konservasi, masyarakat yang tinggal di sana mungkin kehilangan akses ke hutan atau lahan pertanian yang mereka butuhkan untuk mencari nafkah.

Dampak negatif kebijakan lingkungan juga dapat berupa ketidakadilan sosial dan ekonomi. Misalnya, kebijakan pengelolaan hutan yang ketat dapat mengurangi akses masyarakat lokal ke sumber daya hutan, yang dapat mengurangi pendapatan dan penghidupan mereka. Hal ini dapat menyebabkan kemiskinan dan ketidakstabilan sosial di daerah tersebut.

Selain itu, kebijakan lingkungan juga dapat mempengaruhi tradisi dan budaya masyarakat lokal. Misalnya, kebijakan konservasi yang ketat dapat membatasi akses masyarakat lokal ke tempat-tempat suci atau situs budaya yang penting bagi mereka.

Sebagai contoh, di Indonesia, kebijakan konservasi yang ketat di Taman Nasional Lorentz di Papua telah membatasi akses masyarakat adat ke tempat-tempat suci dan situs budaya yang penting bagi mereka. Hal ini telah mempengaruhi tradisi dan budaya masyarakat adat, yang telah hidup di wilayah tersebut selama berabad-abad.

Dalam hal ini, diperlukan pendekatan yang bijaksana dan berkelanjutan dalam pengelolaan lingkungan dan kebijakan lingkungan, yang memperhitungkan dampaknya terhadap

masyarakat lokal dan budaya mereka. Dengan demikian, kebijakan lingkungan dapat menjadi kebijakan yang efektif dan berkelanjutan dalam jangka panjang, baik untuk keberlangsungan lingkungan hidup maupun kehidupan manusia.(Adicita, Apritama and Afifah, 2020)

5.6.3 Dampak Lingkungan Terhadap Kebudayaan Manusia

Dampak lingkungan terhadap kebudayaan manusia merupakan hal yang sangat penting untuk dipahami karena kebudayaan manusia merupakan hasil interaksi manusia dengan lingkungan sekitarnya. Perubahan lingkungan akan memberikan dampak yang besar terhadap kebudayaan manusia, baik secara langsung maupun tidak langsung. Berikut ini adalah penjelasan dan analisa mengenai dampak lingkungan terhadap kebudayaan manusia.

1. Perubahan pada ekosistem Perubahan pada ekosistem dapat berdampak pada kebudayaan manusia. Misalnya, jika terjadi kerusakan pada hutan, maka akan mempengaruhi tradisi masyarakat yang mengandalkan hasil hutan sebagai bahan makanan, bahan bakar, atau bahan bangunan. Hal ini dapat menyebabkan hilangnya kearifan lokal dan tradisi yang telah diwariskan dari generasi ke generasi.
2. Perubahan pada pola migrasi manusia Perubahan lingkungan dapat mempengaruhi pola migrasi manusia. Jika terjadi perubahan lingkungan yang signifikan, seperti bencana alam atau perubahan iklim, maka masyarakat akan memilih untuk pindah ke tempat lain yang lebih aman dan nyaman. Hal ini dapat mempengaruhi kebudayaan manusia, karena masyarakat yang pindah akan membawa budaya mereka ke tempat baru dan mungkin mempengaruhi budaya lokal di tempat tersebut.

3. Perubahan pada pola konsumsi Perubahan lingkungan juga dapat mempengaruhi pola konsumsi manusia. Jika terjadi perubahan lingkungan yang menyebabkan ketersediaan sumber daya alam yang berkurang, maka masyarakat akan mengubah pola konsumsinya. Misalnya, jika terjadi penurunan produksi padi di suatu daerah karena perubahan iklim, maka masyarakat akan beralih ke makanan alternatif yang dapat ditemukan di daerah tersebut. Hal ini dapat mempengaruhi kebiasaan makan dan budaya kuliner suatu daerah.
4. Perubahan pada kesenian dan tradisi Perubahan lingkungan juga dapat mempengaruhi kesenian dan tradisi masyarakat. Misalnya, jika terjadi kerusakan pada lingkungan alam, seperti hutan atau sungai, maka masyarakat yang hidup di sekitar lingkungan tersebut mungkin tidak lagi memiliki bahan mentah untuk membuat kesenian atau melaksanakan tradisi mereka. Hal ini dapat menyebabkan hilangnya kesenian dan tradisi yang telah diwariskan dari generasi ke generasi.

Dalam konteks ini, penting untuk mencari cara untuk menjaga kelestarian lingkungan dan budaya manusia. Melalui upaya pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan dan pelestarian kearifan lokal serta tradisi masyarakat adat, dampak lingkungan terhadap kebudayaan manusia dapat diminimalkan atau bahkan dihindari. Selain itu, penting juga untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan dan kearifan lokal dalam upaya mempertahankan kebudayaan manusia yang beragam dan berharga.

5.7 Kesimpulan

5.7.1 Ringkasan Mengenai Kaitan antara Ekologi dan Antropologi

Ekologi dan antropologi adalah dua bidang studi yang berbeda tetapi saling terkait. Ekologi mempelajari hubungan antara makhluk hidup dan lingkungannya, sedangkan antropologi mempelajari manusia dan budayanya. Namun, manusia merupakan bagian dari lingkungan dan memiliki pengaruh signifikan terhadapnya. Oleh karena itu, antropologi dan ekologi memiliki banyak kesamaan dan keterkaitan yang harus dipahami agar dapat memahami hubungan antara manusia dan lingkungannya.

Salah satu contoh keterkaitan antara ekologi dan antropologi adalah konsep ekologi budaya. Konsep ini menjelaskan bagaimana kebudayaan manusia membentuk dan mempengaruhi lingkungan, dan bagaimana lingkungan mempengaruhi kebudayaan. Contohnya adalah masyarakat adat yang hidup secara berkelompok di pedalaman hutan. Mereka telah mengembangkan cara hidup yang harmonis dengan lingkungan sekitar mereka. Mereka memanfaatkan sumber daya alam secara berkelanjutan dan memperhatikan kelestarian alam dalam kehidupan sehari-hari.

Namun, perubahan lingkungan dapat mempengaruhi kebudayaan manusia. Sebagai contoh, perubahan iklim dapat menyebabkan kekeringan, banjir, dan bencana alam lainnya yang dapat mempengaruhi cara hidup masyarakat. Mereka mungkin harus menyesuaikan cara hidup mereka dengan lingkungan yang berubah. Hal ini menunjukkan bagaimana hubungan antara ekologi dan antropologi dapat berjalan dua arah.

Dalam hal kebijakan lingkungan, pengaruh manusia terhadap lingkungan dapat menyebabkan perubahan yang signifikan. Kebijakan lingkungan yang diambil oleh pemerintah atau lembaga lainnya dapat mempengaruhi kehidupan manusia.

Misalnya, pembangunan dam dapat mengubah pola aliran sungai dan dapat mempengaruhi kehidupan masyarakat di sekitar sungai tersebut. Kebijakan lingkungan yang buruk juga dapat menyebabkan kerusakan lingkungan dan mengancam keberlangsungan hidup manusia.

Pentingnya memahami keterkaitan antara ekologi dan antropologi adalah untuk memahami bagaimana manusia dapat hidup secara berkelanjutan dengan lingkungan. Manusia harus memahami konsekuensi dari tindakan mereka terhadap lingkungan dan bagaimana mereka dapat beradaptasi dengan perubahan lingkungan. Selain itu, penting untuk memahami nilai-nilai kebudayaan yang mempengaruhi cara manusia berinteraksi dengan lingkungan.

Kaitan antara ekologi dan antropologi juga memperlihatkan pentingnya kajian interdisipliner. Masalah lingkungan dan keberlangsungan hidup manusia tidak dapat dipecahkan oleh satu bidang studi saja. Kajian antropologi dan ekologi harus berjalan bersamaan untuk menciptakan pemahaman yang lebih baik tentang hubungan manusia dengan lingkungannya.

Kesimpulannya, ekologi dan antropologi saling terkait dan mempengaruhi satu sama lain.

4.7.2 Implikasi dan Dampak yang Perlu Diperhatikan

Ekologi dan antropologi merupakan dua disiplin ilmu yang berbeda namun memiliki kaitan erat satu sama lain. Implikasi dari kaitan antara ekologi dan antropologi ini sangatlah penting untuk diperhatikan agar dapat mencapai keberlanjutan lingkungan hidup dan keberlanjutan budaya manusia.

Pertama, implikasi dari kaitan antara ekologi dan antropologi adalah pentingnya keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam. Masyarakat sebagai pengguna utama sumber daya alam harus terlibat aktif dalam

pengelolaannya agar tercapai keberlanjutan sumber daya alam yang ada.

Kedua, kaitan antara ekologi dan antropologi juga menunjukkan pentingnya mempertahankan keanekaragaman hayati. Keanekaragaman hayati sangatlah penting bagi kehidupan manusia, terutama dalam menyediakan bahan pangan dan obat-obatan. Oleh karena itu, perlunya upaya untuk mempertahankan keanekaragaman hayati ini menjadi suatu hal yang penting.

Ketiga, implikasi dari kaitan antara ekologi dan antropologi adalah perlunya menjaga keseimbangan ekosistem. Keseimbangan ekosistem sangatlah penting bagi keberlangsungan hidup manusia karena terdapat interaksi antara manusia dengan lingkungan sekitarnya.

Keempat, kaitan antara ekologi dan antropologi juga menunjukkan pentingnya menjaga keberlanjutan budaya manusia. Budaya manusia merupakan bagian dari lingkungan hidup dan perlu dijaga agar tidak hilang. Pengaruh lingkungan terhadap kebudayaan manusia juga perlu diperhatikan agar dapat menjaga keberlanjutan budaya.

Kelima, implikasi dari kaitan antara ekologi dan antropologi adalah pentingnya mempertimbangkan dampak kebijakan lingkungan terhadap masyarakat. Kebijakan lingkungan yang diambil perlu mempertimbangkan dampaknya terhadap masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Keenam, kaitan antara ekologi dan antropologi juga menunjukkan pentingnya memperhatikan adaptasi manusia terhadap lingkungan. Adaptasi manusia terhadap lingkungan perlu diperhatikan agar dapat menjaga keberlangsungan hidup manusia.

Ketujuh, implikasi dari kaitan antara ekologi dan antropologi adalah perlunya upaya untuk memperkuat hubungan antara manusia dan lingkungan. Hubungan antara manusia dan

lingkungan perlu diperkuat agar dapat mencapai keberlanjutan lingkungan hidup dan keberlanjutan budaya manusia.

Kesimpulannya, kaitan antara ekologi dan antropologi sangatlah penting dan memiliki implikasi yang perlu diperhatikan. Upaya untuk mencapai keberlanjutan lingkungan hidup dan keberlanjutan budaya manusia perlu dilakukan melalui pengelolaan sumber daya alam, mempertahankan keanekaragaman hayati, menjaga keseimbangan ekosistem, mempertimbangkan dampak kebijakan lingkungan

DAFTAR PUSTAKA

- Adicita, Y., Apritama, M. R. and Afifah, A. S. 2020. 'Multi Criteria Decision Making pada Strategi Pengolahan Sampah Padat Perkotaan', *JTERA (Jurnal Teknologi Rekayasa)*, 5(2), p. 191. doi: 10.31544/jtera.v5.i2.2020.191-200.
- Bricker, B. 2016. 'Review: Review the End of the World . By Timothy Morton . Minneapolis : University of Minnesota', 48(3), pp. 359–365.
- Cairns, J. 2004. 'Future of life on Earth', *Ethics in Science and Environmental Politics*, 4(1), pp. 1–2. doi: 10.3354/esep004001.
- Crutzen, P.J., & Stoermer, E. F. 2015. "The "Anthropocene". Global Change Newsletter', *Geo External News*, 41(17–18), p. 22.
- Djohar Maknum, S.Si., M. S. 2017. *Ekologi : Populasi, Komunitas, Ekosistem*. Edited by Ahmad Zaeni. Cirebon: Nurjati Press.
- Ellis, E. C. 2015. 'Ecology in an anthropogenic biosphere', *Ecological Monographs*, 85(3), pp. 287–331. doi: 10.1890/14-2274.1.
- Harari, Y. N. 2015. *Sapiens: A Brief History of Humankind*. London: Harvil Secker.
- Hughes, J. D. 2003. 'The nature of environmental history', *Revista de Historia Actual*, 1(1), pp. 23–30.
- Rote, G. and Zwickl, U. 2011. *Collapse, Proceedings of the Annual ACM-SIAM Symposium on Discrete Algorithms*. doi: 10.1137/1.9781611973082.47.
- Zalasiewicz, J. et al. 2021. 'The Anthropocene: Comparing Its Meaning in Geology (Chronostratigraphy) with Conceptual Approaches Arising in Other Disciplines', *Earth's Future*, 9(3). doi: 10.1029/2020ef001896.

BAB 6

PERANAN LINGKUNGAN TERHADAP EKOLOGI MANUSIA

Oleh Marylin Susanti Junias

6.1 Pengertian Lingkungan Hidup

Tempat atau media dimana makhluk hidup berada atau tinggal dan mencari penghidupannya, serta memiliki karakter dan fungsi yang khas menjadi hal penting untuk melihat keberadaan makhluk hidup yang menempatnya (Pertiwi, Mutakin, Faisal, Yusuf, & Fitriani, 2019). Selanjutnya Lingkungan didefinisikan sebagai seluruh faktor dan kondisi baik berupa lingkungan fisik, biologi, sosial dan budaya yang mempengaruhi eksistensi atau keberadaan serta perkembangan satu makhluk hidup atau sekumpulan makhluk hidup. Sedangkan Lingkungan hidup adalah ruang yang ditempati makhluk hidup bersama dengan benda hidup dan tak hidup di dalamnya. Dipertegas dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, serta kelangsungan peri kehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya (Pemerintah RI, 2021). Dalam lingkungan hidup terdapat ekosistem, yaitu tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup. Kemudian,

lingkungan hidup menurut Munir menjelaskan lingkungan hidup dalam 3 macam, yaitu:

1. Lingkungan Hidup Alami

Lingkungan hidup alami atau ekosistem terdiri dari lingkungan hidup fisik (sekumpulan pengada ragawi atau abiotik) dan lingkungan hidup hayati (sekumpulan pengada insani atau biotik). Dalam pengertian lingkungan hidup alami ini juga terdapat manusia sebagai bagian lingkungan hidup alami ini juga terdapat manusia sebagai bagian lingkungan hidup hayati. Manusia sebagai makhluk hidup akan terus berkembang biak, itu berarti populasi manusia di Bumi akan terus bertambah, sedangkan luas Bumi dan tanah tidak akan pernah bisa bertambah. Banyak lahan-lahan kosong dijadikan lingkungan baru sebagai tempat tinggal. Lingkungan baru yang diciptakan untuk keberlangsungan hidup manusia dan memenuhi sebuah tuntutan kemajuan zaman.

2. Lingkungan Hidup Buatan

Lingkungan hidup buatan disatukan dengan sosiosistem yang di dalamnya terdapat sistem pertanian, sistem kesehatan, sistem pendidikan, sistem budaya, sistem agama, dan sebagainya. Dalam konteks ini, sosiosistem menurut Suryan, dkk. Mengartikulasikan menjadi arti sempit dan dalam arti luas. Dalam arti sempit, sosiosistem adalah sistem kekerabatan manusia, ilmu pengetahuan dan teknologi, ideology dan kependudukan, kesehatan, gizi dan lain-lain. Sosiosistem dalam arti luas, adalah lingkungan hidup binaan yang sebenarnya didominasi oleh kehadiran manusia.

Lingkungan hidup buatan atau binaan biasa disebut dengan menggunakan teknologi-teknologi terkini. Keberagaman hayati pada lingkungan binaan cenderung terbatas, dan banyak makhluk hidup lain yang tidak dapat

bertahan dan akhirnya mati. Lingkungan binaan sudah tentu lengkap dengan berbagai fasilitas yang beragam, akses yang mudah dan segala sesuatu mudah didapatkan, cenderung penuh dengan keramaian.

3. Lingkungan Hidup Sosial

Lingkungan sosial adalah segala sesuatu di sekitar manusia yang berwujud tindakan atau aktivitas manusia baik dalam hubungannya dengan lingkungan alam maupun hubungan antar manusia. Lingkungan hidup sosial adalah masyarakat manusia yang mempunyai kesamaan kepentingan pokok untuk mempertahankan eksistensi manusia serta untuk mengupayakan peningkatan kesejahteraan manusia dalam pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development*).

Lingkungan sosial atau lingkungan sosiogeografis dibentuk oleh komponen yang utama yaitu penduduk atau populasi. Populasi dalam suatu lingkungan ditentukan oleh jumlah, natalitas, mortalitas, mobilitas, densitas. Penduduk dalam konteks lingkungan terkait dengan jumlah dan pertumbuhan, budaya dan teknologi serta perilakunya sehingga menimbulkan beban bagi lingkungan. Penduduk dalam kehidupannya berkumpul dan berorganisasi serta berinteraksi dengan lingkungan. Penggolongan penduduk memiliki banyak dimensi sesuai kepentingan analisis sosial kependudukan, didasarkan pada umur, jenis kelamin, pendidikan, mata pencaharian, pendapatan permukiman, agama, suku bangsa, ras.

Manusia membentuk pengelompokan sosial di antara sesama dalam upayanya mempertahankan hidup dan mengembangkan kehidupan. Dalam kehidupan bersamanya itu manusia memerlukan pula adanya organisasi, yaitu suatu jaringan interaksi sosial antarsesama untuk menjamin ketertiban sosial. Interaksi sosial itulah kemudian

melahirkan sesuatu yang dinamakan lingkungan sosial (Barlian & U, 2020).

6.2 Pengertian Ekologi Manusia

Ekologi merupakan studi keterkaitan antara organisme dengan lingkungannya, baik lingkungan biotik maupun abiotik. Subagja dkk, (2001:1.3), menjelaskan bahwa Ekologi adalah merupakan bagian suatu ilmu dasar tentang lingkungan. Lingkungan abiotik terdiri dari atmosfer, cahaya, air, tanah dan unsur mineral (Utina & Baderan, 2009) sedangkan lingkungan biotik meliputi semua makhluk hidup. Ernts Haeckel pada tahun 1869 (Odum, 1983), menyatakan bahwa saat belajar tentang Ekologi maka kita mempelajari rumah tangga makhluk hidup (oikos), lanjutnya, ekologi adalah ilmu yang mempelajari tentang hubungan timbal balik manusia dengan lingkungannya. Jadi, dapat disimpulkan bahwa *ekologi* adalah ilmu dasar yang mempelajari tentang hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya (Barlian & U, 2020).

Secara umum, ruang lingkup ekologi meliputi populasi, komunitas, ekosistem, hingga biosfer, yang mana pengertiannya adalah :

1 Populasi

Populasi adalah kelompok individu-individu yang memiliki kesamaan genetic, dan berada bersama-sama dalam tempat dan waktu yang sama .

2 Komunitas

Komunitas adalah kelompok populasi yang berada bersama-sama dalam tempat dan waktu tertentu.

3 Ekosistem

Ekosistem adalah hubungan timbal balik antara unsur-unsur hayati dan nonhayati dalam membentuk sistem ekologi atau dengan pengertian lainnya adalah suatu tingkatan organisasi kehidupan yang mencakup

organisme dan lingkungan tak hidup, dimana kedua komponen tersebut saling mempengaruhi dan berinteraksi. Setiap organisme dalam ekologi, mempunyai suatu peranannya masing-masing. Ada yang berperan sebagai produsen, konsumen ataupun dekomposer, dan interaksi yang terjadi sangat kompleks dan memiliki penyusun yang beragam. Secara garis besar ekosistem dibedakan menjadi ekosistem darat dan ekosistem perairan. Ekosistem perairan dibedakan atas ekosistem air tawar dan ekosistem air laut. Ekosistem Darat adalah ekosistem yang lingkungan fisiknya berupa daratan. Berdasarkan letak geografisnya (garis lintangnya), ekosistem dapat dibedakan menjadi beberapa bioma, yaitu bioma gurun, bioma padang rumput, bioma hutan basah, bioma hutan gugur, bioma taiga dan bioma tundra. Sedangkan Ekosistem Air terbagi lagi menjadi ekosistem air Tawar dan air laut. Ekosistem air tawar mempunyai ciri spesifik dengan variasi suhu tidak menyolok, penetrasi cahaya kurang, dan terpengaruh oleh iklim dan cuaca. Macam tumbuhan yang hidup pada ekosistem ini, terbanyak adalah jenis ganggang, sedangkan lainnya tumbuhan biji. Hampir semua filum hewan terdapat dalam air tawar. Organisme yang hidup di air tawar pada umumnya telah beradaptasi. Untuk Ekosistem air laut, dibedakan atas lautan, pantai, estuary, dan terumbu karang.

4 Biosfer

Biosfer adalah ekosistem global jumlah seluruh ekosistem planet, atau seluruh makhluk hidup dan tempatnya hidup. Biosfer merupakan tingkatan yang paling kompleks dalam ekologi. Biosfer meliputi atmosfer hingga ketinggian beberapa kilometer, daratan sampai ke dan termasuk bebatuan yang mengandung air yang

berada paling tidak 1500 meter di bawah tanah, danau dan aliran sungai, gua, dan lautan hingga kedalaman beberapa kilometer (Barlian & U, 2020).

Secara keilmuan, ekologi manusia mempelajari bagaimana ekosistem dipengaruhi manusia dan bagaimana manusia mempengaruhi ekosistem, atau lebih jelasnya ilmu yang mempelajari interaksi atau hubungan *resiprokal spesies* (bersifat saling berbalasan), khususnya manusia dengan lingkungannya. Artinya ada keterkaitan hubungan yang erat antara manusia dengan komunitas biologi (alamnya) dan komunitas sosialnya. Amos H Hawley dalam tulisannya menjelaskan bahwa Ekologi manusia diartikan sebagai suatu studi yang mempelajari bentuk dan perkembangan komunitas dalam suatu populasi manusia (*Human ecology may be defined, therefore, in terms that have already been used, as the study of the form and the development of the community in human population*)(Dudley L. Poston Jr., 2015).

Ekologi manusia merupakan istilah yang biasanya digunakan oleh akademisi yang ingin mengintegrasikan ilmu alam dan ilmu sosial kedalam spesialisasinya masing-masing. Atau konkretnya, ekologi manusia merupakan istilah generik untuk mereka yang ingin mempelajari pengaruh kehidupan sosial, ekonomi, politik dan budaya masyarakat terhadap ekosistem penyangga kehidupannya dan juga sebaliknya (Barlian & U, 2020). Dalam pengelolaan lingkungan, peran ekologi manusia menjadi sangat penting, karena menjelaskan hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungan tempat tinggalnya. Kajian Ekologi secara khusus menjelaskan salah satu komponen tertentu lingkungan yaitu Ekologi Manusia pada bagian dari *autekologi*, yaitu ekologi dari spesies tunggal (*homo sapiens*). Saat manusia dilihat sebagai makhluk sosial, maka ekologi dilihat sebagai sinekologi. Manusia sangat dominan dan berkuasa pada lingkungannya, sehingga mengendalikan proses

dan interaksi dalam ekosistem sesuai kehendaknya. Hal ini dikarenakan manusia diberikan akal pikiran dan daya yang dapat berkompetensi secara baik guna memenuhi kebutuhan hidupnya.

Secara analitik, lingkup ekologi manusia dibagi menjadi dua sistem, yaitu sistem alam dan sistem sosial. Sistem alam merupakan Lingkungan manusia yang didefinisikan sebagai segala sesuatu yang berada di sekitar manusia yang berpengaruh pada kehidupan manusia itu sendiri. Faktor sistem biofisik atau ekosistem, yaitu berupa iklim, udara, air, tanah, tanaman, dan binatang. Sedangkan sistem sosial adalah jaringan terpolada dari hubungan yang membentuk keseluruhan yang koheren, yang ada diantara individu, kelompok, dan institusi (Wikipedia, 2023). Hubungan yang terjadi menjadi sebuah struktur formal yang menjelaskan peran dan status yang dapat membentuk sebuah kelompok kecil kumpulan individu sebagai manusia. Seorang individu dapat menjadi bagian dari banyak sistem sosial secara bersamaan; seperti contohnya sistem sosial yang terjadi secara bersamaan pada unit keluarga inti, unit komunitas, unit kota, unit negara, unit kampus perguruan tinggi, korporasi, dan industri dan sebagainya. Organisasi dan definisi kelompok dalam sistem sosial bergantung pada berbagai karakteristik bersama seperti lokasi, status sosial ekonomi, ras, agama, fungsi sosial, atau fitur lain yang berbeda. Hawley menjelaskan lebih lanjut bahwa manusia berkembang dalam komunitasnya, yang tidak dapat berdiri sendiri melainkan kumpulan yang terorganisasi atau dalam proses menjadi terorganisasi dengan baik sehingga membentuk sebuah fenomena demografi selama bertahun-tahun. Kajian sosial tentang penyebaran manusia dalam tata wilayah dipelajari pula dalam konteks ekologi manusia. Ekologi manusia menekankan penyebaran manusia dan variabel sosialnya dalam tata ruang sehingga kajiannya berkaitan dengan geografi. Adanya pertumbuhan penduduk menyebabkan terjadinya kebutuhan lahan sebagai tempat tinggal dan pertumbuhkembang, dan

secara tidak langsung menyebabkan terjadinya kepadatan pada sebuah wilayah tertentu dan memberi catatan dalam fenomena demografinya. Mengingat sifat paradigma ekologis, kontribusi paling nyata dalam teori dan penelitian demografi tingkat makro, seperti yang diilustrasikan oleh studi tentang pertumbuhan populasi, konsentrasi, dan dekonsentrasi populasi perkotaan, sistem kota nasional dan internasional, dan migrasi manusia baik di dalam maupun di luar, yang melintasi batas negara bangsa. Mendasar relevansinya untuk demografi adalah sebuah pendekatan sistemik ekologi manusia dan konseptualisasi populasi yang memiliki signifikansi operasional yang terletak dalam konteks ruang-waktu (Hawley,1998) dalam (Frisbie, 2001).

Kedua sistem, yaitu sistem alam dan sosial tersebut saling berhubungan timbal balik secara terus-menerus dan teratur melalui aliran energi, materi, dan informasi sehingga terjadi proses seleksi dan adaptasi. Dengan kompetensi yang ada, proses seleksi berjalan mengikuti arah keinginan manusia sebagai yang dominan. Tidak sedikit dari adanya proses seleksi tersebut, menyebabkan timbulnya perubahan hubungan interaksi manusia dan lingkungan sekitar. Terdapat dua faktor yang berpengaruh, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal seperti pertumbuhan penduduk dan faktor eksternal yang meliputi perkembangan ekonomi pasar, pembangunan, dan kebijakan pemerintah.

Studi ekologi manusia memiliki keterkaitan erat dengan perilaku manusia dan lingkungan sosialnya. Seperti telah diuraikan diatas, bahwa dengan kompetensi manusia yang ada dan bersifat dominan, maka perubahan pada lingkungan pasti disebabkan dengan perilaku manusia dalam lingkungannya. Saat perilaku manusia sebagai individu maupun kelompok atau komunitas dalam menjaga dan melindungi lingkungan sekitarnya, maka daya dukung dan kelestarian lingkungan tetap

terjaga, sebaliknya perilaku manusia tidak menjaga lingkungan, maka kerusakan lingkungan dapat terjadi. Jelaslah bahwa teori perilaku mempengaruhi perkembangan studi ekologi manusia.

Perilaku (*behavior*) merupakan suatu cara atau perbuatan yang dilakukan oleh manusia, dalam menunjukkan eksistensinya dalam lingkungan dan komunitasnya. Menurut Notoatmodjo (2014), perilaku adalah suatu kegiatan atau aktivitas organisme (makhluk hidup) yang merupakan hasil dari segala macam pengalaman dan interaksi manusia dengan lingkungannya, serta lebih kepada salah satu hasil dari peristiwa atau proses belajar (Notoatmodjo, 2014). Wujudnya bisa berupa pengetahuan, sikap, dan tindakan. Hakikatnya perilaku merupakan tanggapan atau respons terhadap rangsangan (*stimulus*), dan rangsangan itulah yang memengaruhi tingkah laku. Dalam proses terjadinya perilaku, sebagian besar terjadi akibat suatu proses alami, sebab timbulnya perilaku kadang dipengaruhi oleh lingkungan eksternal manusia dan bukan dari dalam diri manusia itu sendiri. Skinner menyatakan bahwa perilaku merupakan perbuatan manusia, baik terbuka (*open behavior*) yang langsung dapat ditangkap oleh indra penglihatan seperti menyapu, merokok, mengemudi dan lainnya, maupun yang tidak terbuka (*covert behavior*) yaitu tingkah laku yang tidak dapat ditangkap langsung oleh indra, misalnya motivasi, sikap, minat, dan emosi (Skinner, 2014). Lebih lanjut, apabila respons tersebut terjadi dalam diri sendiri, dan sulit diamati dari luar (orang lain) yang disebut dengan pengetahuan (*knowledge*) dan sikap (*attitude*).

Perilaku terjadi karena adanya tanggapan atau respons dengan rangsangan (*stimulus*). Apabila tanggapan atau balasan dari rangsangan memberikan suatu efek yang menyenangkan bagi subjek yang memberikan tanggapan tersebut, maka perilaku yang terjadi kemungkinan besar akan terjadi pengulangan, yang kemudian berlanjut menjadi sebuah kebiasaan yang membudaya. Biasanya hal ini terjadi karena perilaku tersebut dianggap baik

dan memberikan keuntungan atau dampak positif bagi lingkungan sekitarnya.

Pemikiran dan respon yang positif dari diri seorang individu terhadap lingkungan fisik sekitarnya akan membawa pengaruh yang positif pula. Respon dan stimulus yang memikirkan daya dukung lingkungan fisik dan kelestariannya, akan membuat individu bersikap dan berperilaku yang positif pula. Semua daya usaha dikerahkan untuk mencegah terjadinya kerusakan dan pencemaran lingkungan dan berlanjut penanggulangan/mitigasi lingkungan terhadap daerah/ wilayah secara geografis yang sudah terlanjur rusak atau rawan bencana. Upaya keberlanjutan pembangunan terus disikapi dengan perilaku yang sangat mendukung. Program *Sustainable Development Goals* (SDG's) menjadi salah satu program yang mencerminkan eratnya ekologi manusia dengan lingkungannya.

Demikian juga dengan lingkungan psikologi manusia sebagai individu. Lingkungan psikologi merupakan seluruh fakta psikologis yang diketahui atau disadari oleh individu. Fakta psikologis tersebut secara holistik membentuk keseluruhan dari pengetahuan individu dan menjadi kekuatan yang mendasari perilakunya. Pembentukan perilaku manusia terhadap lingkungan berkaitan dengan sikap dan nilai yang bersumber dari pengetahuan, perasaan, dan kecenderungan bertindak. Oleh karena itu, tindakan manusia terhadap lingkungan dilakukan berdasarkan keputusan yang didasarkan dari informasi lingkungan dan latar belakang pengalaman serta sikap terhadap lingkungan. Pengelolaan sumber daya alam pada hakikatnya adalah merupakan pemikiran positif yang dilakukan dalam rangka membentuk dan membangun keserasian antara individu sebagai masyarakat dan lingkungan (Wikipedia, 2023). Dari uraian di atas (Bell, 1978 dan Koswara, 1989) dalam (Wikipedia, 2023) menjelaskan beberapa tahapan bagaimana seseorang akan semakin baik berperilaku.

1. Tahap pengenalan. Pada tahap ini individu menerima informasi yang berkaitan dengan gagasan baru.
2. Tahap pendekatan. Pada tahap ini dapat dipergunakan oleh pemberi gagasan untuk meningkatkan motivasi agar bersedia menerima gagasan yang dimaksud.
3. Tahap pengambilan keputusan. Dalam hal ini maksudnya, individu memerlukan dukungan dari lingkungan untuk mempertegas keputusan yang diambilnya. Bila lingkungan memberikan dukungan, maka gagasan baru yang telah diadopsi tersebut tetap dipertahankan. Sebaliknya, bila tidak ada dukungan dari lingkungan, maka biasanya gagasan yang diadopsi tersebut tidak jadi dipertahankan dan individu yang bersangkutan akan kembali lagi ke perilaku semula (Universitas Terbuka, 2017) dalam (Wikipedia, 2023).

Perilaku adalah wujud sikap yang nyata dalam bentuk aktivitas manusia, yang berupa penalaran, penghayatan, dan pengalaman dalam merespons lingkungannya. Bila terdapat gagasan baru yang diperkenalkan kepada individu atau kelompok masyarakat bersifat menguntungkan, cocok dengan nilai dan norma yang ada, akan mudah untuk diterima, dipelajari kemudian dipergunakan, serta mudah dikomunikasikan dalam lingkungan dan komunitas. Hal ini menyatakan bahwa gagasan tersebut akan diterima oleh masyarakat. Bila berlanjut terus, bukan tidak mungkin sesuatu gagasan yang berwujud suatu perilaku yang baik, berlanjut menjadi suatu kebiasaan dan berakhir menjadi suatu kebudayaan dalam komunitas atau lingkungan masyarakat tersebut.

Manusia sebagai individu merupakan sosok yang memegang fungsi utama dan peranan penting dalam konteks lingkungan hidup. Namun, segala unsur kehidupan dan kesejahteraan manusia juga bergantung kepada komponen lingkungan lainnya. Artinya, keberhasilan manusia

dalam mengelola rumah tangga ditentukan oleh berhasilnya dalam mengelola lingkungan makhluk hidup lainnya secara menyeluruh. Kelebihan yang manusia miliki sebagai akal atau alam pikiran (*noosfer*) yang dapat menciptakan budaya. Budaya tersebut disebut *extra somatic tool* manusia mampu menguasai dan mengalahkan makhluk yang lebih besar dan menaklukkan alam yang dahsyat (Sumantri, 2013).

Perkembangan ekologi manusia banyak membentuk perubahan dalam hidup dan kehidupan komunitasnya. Dengan pikiran dan akal yang sehat membentuk perilaku yang baik terhadap lingkungannya, dan dengan didukung oleh rasa tanggung jawab yang besar terhadap kelestarian kemampuan daya dukung lingkungannya, maka sejahteralah manusia dan makhluk hidup lainnya dalam sebuah pembangunan yang berkelanjutan. Sebaliknya, akan terjadi suatu permasalahan yang mendasar apabila akal pikiran yang ada beserta perilakunya digunakan untuk kepentingan dan kesejahteraan diri sendiri atau komunitas tertentu. *Noosfer (extra somatic tool)* yang dikembangkan dalam mempermudah hidup dan memenuhi kebutuhan pokoknya (*primery biological needs*) sendiri berpotensi memberikan sifat tamak, egois, dan serakah dalam menguasai dan mengeksploitasi sumber daya alam tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjangnya. Hal ini akan mengancam kehidupan manusia sebagai individu dan makhluk hidup lainnya serta generasi mendatang. Dengan perubahan pemikiran yang berawal dari keserakahan, berpengaruh terhadap pandangan untuk kesejahteraan generasi selanjutnya. Karena itu, penting pula pemahaman akan etika lingkungan sebagai penyeimbang dalam perkembangan ekologi manusia (Mufid, 2014)

6.3 Peranan Lingkungan Terhadap Ekologi Manusia

Manusia mempengaruhi lingkungan hidupnya, sebaliknya karakteristik lingkungan akan mempengaruhi juga karaktersitik manusianya. Lingkungan menyediakan kekayaan alamnya sebagai sumber daya alam yang bisa digunakan oleh manusia dalam interaksinya dengan sesama manusia ataupun guna meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Interaksi antara manusia dengan lingkungan hidupnya tidak hanya ditentukan oleh jenis dan jumlah sumber daya hayati dan non-hayati, tetapi juga oleh kondisi dan sifat sumber daya. Selain itu, perilaku dan kebudayaan manusia yang ikut menentukan bentuk dan intensitas interaksi antara manusia dengan lingkungannya. Kelangsungan hidup manusia tergantung pula daya dukung lingkungan serta kelestarian ekosistemnya. Karenanya, Manusia dituntut untuk bisa menjaga etika lingkungan agar keseimbangan dan kelestarian lingkungan tetap terjaga.

Namun karena kemampuan berpikir manusia dengan perilakunya yang melebihi kemampuan biota lainnya maka manusia menjadi faktor yang penting. Manusia harus dapat menjaga keserasian hubungan timbal-balik antara manusia dengan lingkungannya sehingga keseimbangan ekosistem tidak terganggu (Utina & Baderan, 2009).

Peranan lingkungan bagi ekologi manusia (Mardiastuti, 2022) adalah:

a) Mengenal Keanekaragaman Hayati

Ekologi memberi manfaat kepada manusia untuk memahami berbagai makhluk hidup serta hubungan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Misalnya bagaimana cara hidup manusia eskimo untuk bisa bertahan hidup di lingkungan dingin yang ekstrem.

- b) Mengetahui Perilaku Makhluk Hidup
Ekologi bermanfaat membantu mengenal perilaku makhluk hidup dalam lingkungannya. Misalnya sistem sonar pada kapal selam yang meniru indera dari kelelawar dan lumba-lumba sehingga bisa bermanfaat bagi manusia untuk menentukan target atau lokasi.
- c) Pemetaan Konsumsi Pangan
Ekologi berguna untuk memetakan konsumsi pangan dan mengetahui struktur serta skala pangan dari setiap makhluk hidup.
- d) Menekan Munculnya Sumber Penyakit Manusia
Penyebab penyakit pada manusia bisa bersumber dari organisme tertentu, misalnya saja demam berdarah dan covid 19. Penyakit ini bisa menjadi kejadian luar biasa atau mungkin wabah ketika populasi atau jumlah yang terdampak mengalami ledakan jumlahnya. Dengan menekan pertumbuhan nyamuk dan virus corona, serta modifikasi lingkungan yang tepat, penyakit tersebut bisa diantisipasi.
- e) Menekan Ledakan Hama dan Penyakit Tumbuhan
Sumber hama dan penyakit tanaman terjadi ketika terjadi jumlah populasi yang tidak seimbang antara persediaan pakan dan predatornya. Kondisi yang seimbang atau optimal dari setiap organisme penyusun dalam siklus atau rantai makanannya akan dikontrol mekanisme rantai makanan.
- f) Solusi Masalah Energi
Ekologi berguna untuk membantu manusia memastikan adanya ketersediaan energy untuk menunjang kehidupannya.
- g) Solusi Masalah Pertanian
Modifikasi Ekologi bisa memecahkan berbagai macam masalah pertanian. Di bidang Pertanian,

perkebunan dan peternakan banyak faktor dapat mempengaruhi hasil panen, yaitu termasuk lokasi dan kualitas tanah, infrastruktur pertanian dan mesin yang dimiliki. Karakteristik tanah sebagai media tumbuh tanaman pangan, serta mempelajari ekologi tanaman yang sesuai, serta opsi teknologi yang tepat berdaya guna, memberikan hasil panen organik dan ramah lingkungan yang menjadi salah satu point keunggulan, disamping mengurangi pencemaran lingkungan. Contohnya pertanian organik, menggunakan cacing untuk proses pengolahan tanah secara alami.

h) Menekan Pencemaran Lingkungan

Pencemaran lingkungan bisa ditekan dengan mempelajari ekologi. Tumbuhan maupun pepohonan yang sehat bisa membantu menurunkan zat emiten karbon dan meningkatkan produksi oksigen.

DAFTAR PUSTAKA

- Adyatma, S., & Kartika, N. 2013. Dampak Pencemaran Lingkungan Terhadap Kesehatan. *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, XV(1), 73-78.
- Pertiwi, D., Mutakin, D., Faisal, R., Yusuf, M., & Fitriani, V. 2019. Manusia dan Lingkungan.
- Barlian, E., & U, I. 2020. *Ekologi Manusia*. Sleman: Deepublish.
- Utina, R., & Baderan, D. 2009. *Ekologi dan Lingkungan Hidup*. Gorontalo.
- Mardiastuti, A. 2022. *Ekologi Adalah : Pengertian, Ruang Lingkup, dan Manfaat*. Retrieved from <https://www.detik.com/jabar/berita/d-6241039/ekologi-adalah-pengertian-konsep-ruang-lingkup-dan-manfaat>
- Dudley L. Poston Jr., I. 2015. 'Human Ecology', in *International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences (Second Edition)*. Available at: <https://www.sciencedirect.com/topics/social-sciences/human-ecology>.
- Frisbie, P. 2001. 'Human Ecology: Insights on Demographic Behavior', in *International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences*.
- Mufid, S.A. 2014. *Ekologi Manusia; Dalam Perspektif Sektor Kehidupan dan Ajaran Islam*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Notoatmodjo, S. 2014. *Ilmu Perilaku Kesehatan*. Penerbit Rineka Cipta.
- Pemerintah RI. 2021. 'Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup'. Available at: <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/161852/pp-no-22-tahun-2021>.
- Skinner, B.. 2014. *Science Human Bahavior*. Available at: <http://bfskinner.org/store>.

- Sumantri, A. 2013. *Kesadaran Lingkungan*. Jakarta: Pustaka Media Group. Available at: http://repository.radenintan.ac.id/4680/1/SKRIPSI_EVA.pdf.
- Wikipedia. 2023. *Ekologi Manusia*. Available at: https://id.wikipedia.org/wiki/Ekologi_manusia.

BAB 7

EKOLOGI POLITIK

Oleh Nur Rohim Yunus

7.1 Pendahuluan

Bidang penelitian yang dikenal dengan “ekologi politik” mengkaji bagaimana kebijakan politik dan isu lingkungan saling terkait satu sama lain. Ini mengkaji tidak hanya cara-cara di mana kebijakan politik dan sistem politik secara keseluruhan berdampak pada lingkungan, tetapi juga cara-cara di mana lingkungan berdampak pada kebijakan politik. Selain itu, pemikiran kritis mengenai fungsi kelompok kepentingan dalam pembentukan kebijakan lingkungan dan cara kebijakan lingkungan dapat mempengaruhi masyarakat dan ekonomi merupakan bagian penting dari ekologi politik. Tujuan utama bidang ekologi politik adalah mengadvokasi kebijakan dan kegiatan yang membantu menjaga lingkungan dalam keadaan sehat dan berkelanjutan baik untuk manusia maupun bentuk kehidupan lainnya.

Baik ekologi politik maupun ekologi manusia merupakan subbidang ilmu lingkungan interdisipliner yang saling berhubungan dan saling berpengaruh. Ekologi manusia adalah studi tentang hubungan antara manusia dan lingkungan alam. Ini termasuk studi tentang bagaimana manusia menggunakan sumber daya alam, bagaimana manusia mengubah lingkungan, dan bagaimana lingkungan berdampak pada kesejahteraan manusia. Sementara itu, ekologi politik adalah studi tentang bagaimana kebijakan politik yang berbeda memengaruhi lingkungan dan kelangsungan hidup manusia.

Kedua bidang penelitian ini berkaitan dengan masalah lingkungan dan berupaya memahami dinamika rumit yang ada antara manusia dan lingkungannya. Pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana manusia memanfaatkan dan menghancurkan lingkungan dapat diperoleh melalui studi ekologi manusia, sementara pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana kebijakan politik dapat memperburuk atau meringankan situasi lingkungan dapat diperoleh melalui studi ekologi politik.

Sangat penting untuk menggabungkan kedua bidang penelitian ini jika ingin berhasil menemukan jawaban atas masalah yang berkaitan dengan lingkungan. Sementara ekologi manusia memberikan informasi tentang bagaimana manusia dapat hidup berkelanjutan di lingkungan yang semakin terdegradasi, ekologi politik memberikan informasi tentang bagaimana mengembangkan kebijakan yang melindungi lingkungan dan meningkatkan kesejahteraan manusia. Kedua subbidang ini berada di bawah payung "ekologi". Dalam skenario khusus ini, ekologi politik dan ekologi manusia saling melengkapi untuk mencapai tujuan lingkungan yang berkelanjutan.

Studi tentang hubungan timbal balik antara kekuatan politik, lingkungan alam, dan aktivitas komersial adalah fokus bidang interdisipliner ekologi politik. Studi ekologi politik penting karena memungkinkan kita untuk memahami bagaimana kebijakan politik dan ekonomi dapat mempengaruhi lingkungan serta cara orang menjalani kehidupan mereka. Pemahaman ini penting untuk melindungi lingkungan dan kualitas hidup masyarakat. Kita dapat memperoleh pengetahuan yang lebih baik tentang cara tindakan kita berdampak pada alam dan cara efek ini memengaruhi kesejahteraan kita dengan mempelajari interaksi yang ada antara manusia dan lingkungan.

Pentingnya memperdebatkan ekologi politik juga terkait dengan masalah lingkungan yang lebih besar yang memengaruhi seluruh planet, seperti perubahan iklim, hilangnya

keanekaragaman hayati, dan polusi. Dalam pengertian ini, ekologi politik memungkinkan kita untuk memahami bagaimana kebijakan politik dan ekonomi dapat mempengaruhi masalah lingkungan dan menentukan solusi mana yang paling tepat. Selain itu, studi ekologi politik mencerahkan kita tentang bagaimana kebijakan ekonomi dapat berdampak pada cara distribusi kekayaan dan kekuasaan. Karena itu, akan dapat dipahami hubungan yang ada antara ekonomi dan keadilan sosial dan untuk menyelidiki solusi potensial untuk masalah yang ditimbulkannya.

Diskusi ekologi politik dalam konteks global sangat penting untuk memajukan keadilan global dan memastikan kelanjutan pembangunan berkelanjutan. Kita dapat menciptakan strategi dan kebijakan yang mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan memperhatikan kesejahteraan lingkungan dan masyarakat secara adil jika kita memiliki pemahaman bagaimana kebijakan politik dan ekonomi dapat mempengaruhi kehidupan manusia dan lingkungan. Pemahaman ini dapat diperoleh dengan mempelajari interaksi antara politik dan ekonomi. Oleh karena itu, perdebatan tentang ekologi politik diperlukan untuk mendapatkan pemahaman menyeluruh tentang hubungan antara kekuatan politik, kekuatan ekonomi, dan kekuatan lingkungan untuk mengatasi masalah lingkungan global dan menciptakan masyarakat yang berkelanjutan dan berkeadilan.

7.2 Pengertian Dasar Ekologi Politik

Ada beberapa pengertian dasar dari ekologi politik yang harus dipahami dan diperdalam, sebelum melakukan analisis permasalahan ekologi politik. Diantaranya yaitu lingkungan hidup, hubungan manusia dan lingkungan, dan kebijakan lingkungan.

1. Lingkungan Hidup

Lingkungan dapat didefinisikan sebagai keseluruhan sistem, yang terdiri dari lingkungan fisik, lingkungan biologis, dan lingkungan sosial. Ketiga komponen lingkungan ini saling berinteraksi satu sama lain, dan memberikan dukungan dan sumber daya yang diperlukan untuk kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya. Lingkungan terdiri dari berbagai komponen, termasuk udara, air, tanah, flora dan fauna, dan manusia, yang dianggap sebagai komponen lingkungan sosial. (Purnomo, 2015), (Kalawijaya, et.al. 2019), (Yunita, 2016)

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang dimaksud dengan lingkungan hidup adalah semua unsur lingkungan hidup yang meliputi tanah, air, udara, dan makhluk hidup serta hubungan dan ketergantungan antara unsur-unsur tersebut yang berada di atas, di dalam, dan di bawah permukaan bumi. Undang-undang ini berlaku untuk perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

2. Hubungan manusia dengan lingkungan

Interaksi yang terjadi antara manusia dengan berbagai komponen lingkungan, seperti sumber daya alam, makhluk hidup, dan lingkungan fisik, disebut sebagai hubungan manusia-lingkungan. Kontak ini terjadi di kedua arah. Baik manusia maupun lingkungan sekitarnya memiliki berbagai efek satu sama lain.

Di satu sisi, manusia sangat bergantung pada alam sekitarnya untuk memenuhi kebutuhan hidup, seperti makanan, air, dan udara segar. Selain itu, karena alasan ekonomi dan sosial, manusia memanfaatkan sumber daya alam seperti hutan, tambang, dan laut. Namun, kerusakan lingkungan dan dampak negatif terhadap kesehatan

manusia dapat terjadi akibat penggunaan sumber daya alam secara berlebihan tanpa memikirkan konsekuensinya. (Kals & Maes, 2012), (Naderi, et.al., 2020)

Di sisi lain, manusia juga memiliki pengaruh yang signifikan terhadap lingkungan sekitarnya. Pencemaran udara, air, dan tanah dapat disebabkan oleh aktivitas manusia seperti pembangunan, pertanian, dan industri, serta dapat menimbulkan dampak negatif baik terhadap kesehatan manusia maupun lingkungan. Selain itu, manusia mampu mengubah ekosistem dan menghancurkan habitat makhluk hidup, seperti tumbuhan dan hewan, yang dapat membahayakan kemampuan suatu spesies untuk terus hidup. (Tretter & Knapp, 2015), (Zhang & Song, 2021)

Oleh karena itu, keharmonisan dalam hubungan yang terjalin antara manusia dan lingkungan alamnya harus dijaga. Agar peradaban manusia dapat berlanjut untuk generasi mendatang, sumber daya alam harus digunakan secara bertanggung jawab, dan lingkungan sekitar harus dijaga. Mendaur ulang dan meminimalkan konsumsi produk yang berpotensi membahayakan adalah dua contoh perilaku ramah lingkungan yang dapat dilakukan sebagai bagian dari upaya melestarikan alam. Jadi, sangat mungkin bagi manusia untuk hidup secara berkelanjutan sekaligus memastikan bahwa lingkungan akan terus lestari untuk generasi mendatang.

3. Kebijakan Lingkungan

Kebijakan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh pemerintah atau organisasi lain untuk melindungi, melestarikan, dan memperbaiki kondisi lingkungan. Kebijakan lingkungan dapat dianggap sebagai kerangka kebijakan. Tujuan utama dari kebijakan

lingkungan adalah untuk melestarikan tatanan alami ekosistem dan memastikan bahwa manusia dapat terus hidup di dalamnya dengan cara yang tidak menghabiskan sumber dayanya.

Berikut ini adalah beberapa contoh kebijakan lingkungan yang telah diberlakukan oleh pemerintah di berbagai negara: (Andargoli & Maknoon, 2021), (Kuckertz & Taübe, 2018)

1. Pengurangan emisi gas rumah kaca untuk mengatasi perubahan iklim.
2. Pembatasan penggunaan bahan kimia berbahaya untuk mengurangi polusi air dan udara.
3. Konservasi sumber daya alam dan pengelolaan hutan yang berkelanjutan.
4. Program pengolahan sampah dan daur ulang untuk mengurangi limbah dan meminimalkan dampaknya pada lingkungan.
5. Kebijakan penataan ruang yang berkelanjutan untuk mengurangi penggunaan lahan yang tidak perlu dan memastikan keberlangsungan lingkungan.

7.3 Teori Ekologi Politik

Ada beberapa teori yang harus diketahui dalam teori ekologi politik, diantaranya adalah *Green Theory*, *Social Ecology*, *Ecological Modernization*, dan *Political Ecology*.

1. Green Theory

Green Theory atau teori hijau adalah sebuah teori dalam bidang ekologi politik yang menekankan pentingnya kelestarian lingkungan dan memperhatikan pengaruh tindakan manusia terhadap lingkungan alam. Menurut teori ini, melindungi lingkungan dan memastikan kelangsungan

hidupnya harus menjadi yang terdepan dalam upaya memajukan umat manusia.

Gerakan lingkungan yang tumbuh pada tahun 1960-an dan 1970-an di Eropa dan Amerika Utara adalah awal dari teori hijau. Teori hijau dapat ditelusuri kembali ke gerakan ini. Gerakan ini mengutuk strategi pembangunan ekonomi yang berbahaya bagi lingkungan dan menyoroti perlunya perlindungan dan kelestarian lingkungan untuk memberikan kehidupan yang lebih baik dan lebih harmonis bagi manusia dan alam. (Beeson, 1995)

Gagasan bahwa manusia dan alam saling terkait satu sama lain dan saling mempengaruhi satu sama lain merupakan inti dari Teori Hijau. Oleh karena itu, manusia berkewajiban untuk melakukan kegiatannya dengan memperhatikan dampak kegiatan tersebut terhadap lingkungan alam dan mengambil langkah-langkah untuk melindungi lingkungan agar tetap lestari dan mampu memenuhi kebutuhan generasi mendatang. (Barry, 1999)

Selain itu, Teori Hijau menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dan partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan perencanaan lingkungan. Hal ini dilakukan untuk menjamin bahwa kebijakan lingkungan yang ditetapkan mencerminkan kebutuhan dan cita-cita masyarakat serta memperhitungkan dampak yang akan ditimbulkan oleh kebijakan tersebut terhadap lingkungan.

2. *Social Ecology*

Murray Bookchin muncul dengan ide Teori Ekologi Sosial pada 1960-an, dan itu adalah teori ekologi politik. Menurut pemikiran ini, permasalahan lingkungan yang kita alami saat ini merupakan akibat dari krisis sosial yang lebih luas, seperti kapitalisme, hirarki, dan dominasi manusia atas alam. (Bookchin, 1980)

Membangun masyarakat yang lebih demokratis, egaliter, dan berkelanjutan, menurut Bookchin, adalah cara terbaik untuk memecahkan masalah ekologis yang kita hadapi saat ini. Dia berargumen bahwa orang harus memandang alam bukan sebagai sesuatu yang merupakan objek untuk didominasi dan dieksploitasi melainkan sebagai teman dan sekutu. (Bookchin, 2005)

3. *Ecological Modernization*

Modernisasi Ekologi adalah teori ekologi politik yang mengusulkan bahwa solusi untuk masalah lingkungan dapat dicapai melalui modernisasi ekonomi dan teknologi yang lebih ramah lingkungan. Istilah "ekologis" mengacu pada lingkungan, dan "modernisasi" mengacu pada proses membuat sesuatu menjadi lebih maju. Pada 1980-an, hipotesis ini awalnya diajukan oleh Arthur P.J. Mol, dan kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh sejumlah peneliti lain pada dekade-dekade berikutnya. (Mol, 1995), (Hajer, 1995)

Menurut teori Modernisasi Ekologis, modernisasi memiliki potensi untuk mengurangi efek merugikan yang ditimbulkan oleh aktivitas manusia terhadap alam dengan meningkatkan efektivitas pemanfaatan sumber daya, memajukan pengembangan teknologi ramah lingkungan, dan mengubah kebiasaan baik konsumen maupun produsen. Selain itu, menurut gagasan ini, penyesuaian tersebut dapat menghasilkan keuntungan finansial dan sosial yang cukup besar dalam jangka panjang. (Spaargaren, et.al., 2000)

4. *Political Ecology*

Political Ecology adalah sebuah pendekatan studi ekologi politik yang menyelidiki hubungan antara manusia, alam, dan otoritas politik. Hubungan antara kebijakan politik, ekonomi, dan lingkungan, serta cara kekuatan politik

mempengaruhi pengelolaan sumber daya alam, adalah penekanan utama dari teori ini. (Paulson, 2003)

Menurut teori Ekologi Politik, bencana lingkungan saat ini bukanlah hasil dari kegagalan teknologi atau individu; sebaliknya, itu adalah hasil dari ketidakadilan sosial, ekonomi, dan politik yang fundamental. Ini adalah salah satu prinsip utama dari teori Ekologi Politik. Menurut aliran pemikiran ini, sumber daya alam harus dipahami sebagai produk sosial karena merupakan hasil interaksi antara manusia dan lingkungan sekitarnya. (Watss, 2000)

Bidang ekologi politik menekankan pentingnya memperhatikan unsur-unsur sosial dan politik dalam penyelenggaraan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan. Menurut aliran pemikiran ini, krisis lingkungan hanya dapat diselesaikan dengan melaksanakan reformasi sosial dan politik secara luas. Reformasi ini akan mencakup reorganisasi kekuasaan dan sumber daya, promosi keterlibatan sipil, dan pembentukan proses pengambilan keputusan yang lebih sejalan dengan cita-cita demokrasi. (Scott, 1998)

Beberapa tokoh yang mempelopori teori Political Ecology antara lain Susan Paulson, Michael Watts, dan James Scott.

7.4 Isu Lingkungan dan Kebijakan

Ada beberapa isu lingkungan dan kebijakan dalam pembahasan ekologi politik, diantaranya adalah:

1. Kebijakan lingkungan hidup dalam konteks internasional

Di bidang ekologi politik, salah satu fokus perhatian utama ditempatkan pada masalah kebijakan lingkungan dalam konteks hubungan internasional. Topik ini berkaitan dengan pekerjaan yang sedang dilakukan untuk memerangi masalah

lingkungan dalam skala global dan untuk memajukan kerjasama internasional di bidang perlindungan lingkungan. Topik perubahan iklim adalah salah satu perhatian paling mendesak dalam kebijakan lingkungan internasional. Peningkatan emisi gas rumah kaca adalah pendorong utama perubahan iklim. Emisi ini adalah hasil dari aktivitas manusia seperti penggundulan hutan dan pembakaran bahan bakar fosil. Pengadopsian Protokol Kyoto pada tahun 1997 dan Perjanjian Paris pada tahun 2015 dipicu oleh semakin pentingnya upaya untuk membatasi emisi gas rumah kaca dalam kebijakan lingkungan internasional. (Conca & Dabelko, 2003), (Harris, 2004)

Selain masalah perubahan iklim, masalah lingkungan tambahan ditangani oleh kebijakan lingkungan internasional. Kekhawatiran ini termasuk degradasi lahan, hilangnya keanekaragaman hayati, serta polusi air dan udara. Solusi untuk masalah ini membutuhkan kerjasama internasional dalam bentuk pengembangan teknologi ramah lingkungan, promosi penggunaan sumber daya terbarukan, dan peningkatan tindakan perlindungan lingkungan. (Salleh, 2009)

2. Perubahan iklim dan dampaknya

Topik perubahan iklim adalah salah satu perhatian dunia yang paling penting dan mendesak di bidang ekologi politik. Peningkatan emisi gas rumah kaca adalah pendorong utama perubahan iklim. Emisi ini adalah hasil dari aktivitas manusia seperti penggundulan hutan dan pembakaran bahan bakar fosil. Efek perubahan iklim sangat beragam dan meluas ke semua bidang kehidupan manusia, termasuk bidang ekologi, ekonomi, dan sosial. (Dryzek & Schlosberg, 2010), (Mert, 2013)

Dalam kerangka ekologi politik, masalah perubahan iklim menarik perhatian pada ketidaksetaraan sosial dan ekonomi

yang mendasar dalam pengelolaan pengelolaan sumber daya alam dan produksi energi. Negara maju dengan infrastruktur industri maju, misalnya, bertanggung jawab atas persentase emisi gas rumah kaca dunia yang cukup besar, tetapi negara berkembang lebih rentan terhadap dampak perubahan iklim. Ini mencontohkan distribusi biaya dan manfaat yang tidak merata yang terkait dengan pengelolaan sumber daya global. Menurut teori ekologi politik, upaya untuk mengatasi perubahan iklim melibatkan perebutan kekuasaan serta perubahan struktural dalam institusi ekonomi dan politik masyarakat global. Di antaranya adalah pengurangan emisi gas rumah kaca melalui pengembangan teknologi bersih, promosi penggunaan sumber daya terbarukan, dan pengenalan struktur pengambilan keputusan yang lebih demokratis dalam skala internasional. (O'Brien & Leichenko, 2008)

3. Konservasi sumber daya alam

Bidang ekologi politik memberikan penekanan yang signifikan pada masalah perlindungan sumber daya alam. Pengelolaan sumber daya alam dengan cara yang bertanggung jawab terhadap lingkungan merupakan bagian integral dari konservasi sumber daya alam dan pelestarian ekosistem yang sehat secara ekologis.

Jika dilihat melalui lensa ekologi politik, masalah konservasi sumber daya alam menyoroti ketidaksetaraan dalam cara pengelolaan sumber daya dan dalam distribusi manfaat dan biaya antara negara dan masyarakat. Banyak negara yang kaya akan sumber daya alam, tetapi didominasi oleh perusahaan asing atau oligarki yang memanfaatkan sumber daya alam tersebut untuk kepentingan mereka sendiri, sementara masyarakat setempat tidak memiliki akses yang cukup terhadap sumber daya alam tersebut atau diabaikan

ketika keputusan dibuat mengenai pengelolaan sumber daya alam tersebut. (Agrawal, 2005), (Bryant & Bailey, 1997)

Isu konservasi sumber daya alam memerlukan upaya yang melibatkan pertarungan kekuasaan serta perubahan mendasar dalam sistem ekonomi dan politik global. Ini melibatkan implementasi kebijakan untuk perlindungan keanekaragaman hayati dan spesies yang terancam punah, serta konservasi sumber daya alam termasuk hutan, sungai, dan lahan basah. (Leach & Mearns, 1996)

4. Kebijakan energi

Energi tidak hanya merupakan kontributor yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan kemajuan teknis, tetapi juga merupakan kontributor utama pencemaran lingkungan dan emisi gas rumah kaca. Akibatnya, pertanyaan tentang kebijakan energi menjadi titik fokus penting dalam studi ekologi politik. Agar kebijakan energi menjadi efektif dan berkelanjutan, mereka perlu mempertimbangkan implikasi sosial dan lingkungan dari produksi dan konsumsi energi. (Agrawal, 2010), (Braun & Whatmore, 2019)

Perdebatan tentang kebijakan energi menyoroti ketidaksetaraan yang ada dalam cara energi dikelola dan dalam distribusi keuntungan dan biaya antara negara dan masyarakat dari perspektif ekologi politik. Kemampuan banyak negara untuk memenuhi kebutuhan energinya bergantung pada sumber energi tak terbarukan, seperti minyak atau batu bara, sementara yang lain terpaksa mengimpor energi dari negara yang memiliki sumber daya alam yang melimpah. Hal ini mengakibatkan hubungan kekuasaan menjadi tidak seimbang, baik antar negara maupun di dalam sektor domestik.

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi masalah kebijakan energi melibatkan pertarungan kekuasaan serta perubahan mendasar dalam sistem ekonomi dan politik global. Ini

melibatkan penciptaan teknologi ramah lingkungan, dorongan penggunaan sumber daya terbarukan, dan penerapan struktur pengambilan keputusan yang lebih demokratis dalam skala global. (Castells & Borja, 2012)

7.5 Kelompok Kepentingan dalam Ekologi Politik

Adapun kelompok-kelompok kepentingan dalam ekologi politik adalah:

1. Kelompok lingkungan hidup

Kelompok peduli lingkungan hidup adalah contoh kelompok kepentingan yang relevan dengan ekologi politik. Koalisi ini terdiri dari berbagai organisasi lingkungan yang berkolaborasi untuk memajukan penyebab lingkungan dan melindungi sumber daya alam. (Doyne & McEachern, 2013), (Dryzek, 2013)

Dalam konteks ekologi politik, organisasi lingkungan menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan yang berpengaruh terhadap lingkungan, serta upaya berkelanjutan untuk mengadopsi kebijakan yang berwawasan lingkungan. Selain itu, organisasi lingkungan bekerja keras untuk mengubah sikap dan perilaku masyarakat untuk mendorong perilaku yang lebih bertanggung jawab terhadap lingkungan.

Organisasi advokasi lingkungan seringkali memainkan peran penting dalam perumusan kebijakan lingkungan pada ketiga tingkatan (lokal, nasional, dan internasional). Kemampuan organisasi-organisasi ini untuk menjalankan kampanye advokasi dan memobilisasi masyarakat untuk menuntut perubahan memungkinkan mereka memberi dampak pada agenda politik serta kebijakan lingkungan. (Hajer & Wagenaar, 2003)

2. Kelompok masyarakat adat

Dalam ranah ekologi politik, dimungkinkan untuk mengklasifikasikan kelompok masyarakat adat sebagai kelompok kepentingan. Kategori ini terdiri dari orang-orang dari banyak latar belakang etnis yang memiliki hubungan kuat dengan tanah, hutan, dan sumber daya alam lainnya, yang sering menjadi dasar cara hidup tradisional mereka.

Masyarakat adat, jika dilihat dalam kerangka ekologi politik, menekankan pentingnya hak mereka untuk memiliki, mengelola, dan memanfaatkan sumber daya alam secara tradisional, serta perjuangan mereka untuk melestarikan keanekaragaman hayati dan lingkungan di sekitar mereka. Kelompok masyarakat adat juga menginginkan pengakuan atas hak tradisional mereka serta keterlibatan yang setara dalam proses pengambilan keputusan tentang isu-isu yang berkaitan dengan lingkungan. (Brosius, et.al., 2005), (Agrawal & Ostrom, 2001)

Ketika sumber daya alam dikelola dan kebijakan tentang lingkungan hidup yang dibuat tidak memperhatikan hak-hak kelompok masyarakat adat, kelompok masyarakat adat seringkali menjadi korban ketidakadilan. Namun, mereka juga memiliki keahlian dan pengalaman yang luar biasa dalam pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan dan dalam perlindungan keanekaragaman hayati, yang dapat menjadi sumber inspirasi bagi pengembangan kebijakan lingkungan yang lebih baik. (Keck & Sikkink, 1998)

3. Kelompok korporasi

Dalam bidang ekologi politik, pengelompokan korporasi atau korporasi besar juga dapat dikatakan sebagai kelompok kepentingan. Korporasi besar, sebagai pelaku utama dalam pemanfaatan sumber daya alam dan produksi barang dan jasa, memiliki kepentingan terhadap kebijakan

lingkungan yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam, pengendalian limbah dan polusi, serta peraturan yang mengatur praktik bisnis mereka. Ini karena perusahaan besar adalah aktor utama dalam proses ini. (Banerjee, 2003), (Humphreys, 2008)

Dalam konteks ekologi politik, organisasi korporasi seringkali memiliki akses dan pengaruh politik yang signifikan, yang memungkinkan mereka untuk mempengaruhi undang-undang lingkungan dan memperjuangkan kepentingan keuangan mereka. Akibatnya, kelompok korporasi mampu mempengaruhi ekologi politik. Sayangnya, seringkali ada ketegangan antara kebutuhan melindungi lingkungan dan mempromosikan keberlanjutan dan kepentingan komersial dan keuntungan finansial dari perusahaan besar. (Gray & Purdy, 2018)

4. Kelompok politik

Dalam konteks ekologi politik, pengelompokan politik juga dapat dilihat sebagai kelompok kepentingan. Partai politik, kelompok advokasi lingkungan, atau bahkan hanya individu yang berkepentingan dalam proses pembuatan kebijakan lingkungan semuanya dapat berkumpul untuk membentuk kelompok politik. Partisipasi dalam proses pengambilan keputusan, kampanye publik, dan pemantauan tindakan pemerintah dan perusahaan adalah cara yang efektif dimana kelompok politik dapat menggunakan semacam pengaruh atas kebijakan lingkungan. (Murphy, 2012).

Dalam pembahasan isu-isu lingkungan hidup dalam kerangka ekologi politik, berbagai faksi politik dapat menganut berbagai sikap ideologis. Ada kelompok politik yang mengadvokasi pembangunan ekonomi yang bertanggung jawab terhadap lingkungan dan penerapan kebijakan lingkungan yang ketat. Di sisi lain, ada

kelompok politik yang cenderung mengutamakan kepentingan ekonomi dan industri, bahkan sampai mengabaikan kepentingan lingkungan. (Dryzek, 2005), (Hajer, 1995)

7.6 Penutup

Ekologi politik adalah disiplin ilmu yang berfokus pada studi tentang berbagai masalah dan kebijakan lingkungan. Topik dan kebijakan ini meliputi pengelolaan polusi, konservasi sumber daya alam, dan promosi kelestarian lingkungan. Pada kenyataannya, proses penerapan kebijakan lingkungan seringkali menemui kendala yang sulit dan sudut pandang yang beragam. Ada kebijakan yang berhasil dilaksanakan dan berdampak menguntungkan bagi masyarakat dan lingkungan, namun ada juga kebijakan yang tidak berhasil dilaksanakan dan berdampak merugikan secara signifikan.

Kegagalan kebijakan lingkungan dapat terjadi karena beberapa alasan, termasuk namun tidak terbatas pada hal-hal berikut: kebijakan yang bersangkutan tidak mampu memberikan solusi yang efektif terhadap masalah lingkungan yang dihadapi; kebijakan terkendala oleh perbedaan kepentingan antara berbagai kelompok kepentingan; kebijakan dipengaruhi oleh politik dan pengaruh bisnis yang dominan; dan seterusnya. Di sisi lain, kebijakan lingkungan hidup dianggap berhasil bila berhasil melakukan perubahan yang menguntungkan dalam pengelolaan sumber daya alam, menurunkan tingkat pencemaran dan kerusakan lingkungan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Oleh karena itu, berhasil tidaknya kebijakan lingkungan dalam ekologi politik sangat tergantung pada berbagai faktor. Faktor-faktor tersebut antara lain dukungan dan partisipasi masyarakat luas, efisiensi pelaksanaan

kebijakan, dan upaya untuk mencapai keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan lingkungan. Penting untuk melanjutkan penelitian dan pengembangan kebijakan lingkungan yang efektif dan berkelanjutan, serta bekerja untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan.

Dalam bidang ekologi politik, kelompok kepentingan memainkan peran penting dalam merumuskan dan mempengaruhi kebijakan yang berkaitan dengan lingkungan. Saat melakukan analisis tentang pengaruh kelompok kepentingan terhadap kebijakan lingkungan, sejumlah faktor perlu dipertimbangkan. Ini termasuk kekuatan dan pengaruh relatif dari kelompok kepentingan, kepentingan dan nilai yang mereka junjung tinggi, serta kemampuan mereka untuk melobi dan memobilisasi dukungan.

Ada sejumlah kelompok kepentingan berbeda yang seringkali memiliki pengaruh besar terhadap kebijakan lingkungan. Beberapa kelompok ini termasuk masyarakat adat, korporasi, politik, dan organisasi advokasi lingkungan. Dalam melakukan analisis dampak yang ditimbulkan oleh berbagai kelompok kepentingan, perlu mempertimbangkan dampak jangka panjang dari kebijakan tersebut, selain upaya yang dilakukan untuk mencapai keseimbangan antara masalah ekonomi dan lingkungan.

Penting untuk memperhatikan kepentingan dan perspektif kelompok yang berkepentingan ketika mengevaluasi pengaruh kelompok kepentingan terhadap kebijakan lingkungan. Selain itu, perlu juga diperhatikan upaya-upaya yang dilakukan agar kebijakan tersebut memperhatikan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat pada umumnya. Evaluasi ini perlu dilakukan secara berkesinambungan dan terbuka untuk mendapatkan informasi dan masukan dari berbagai pihak terkait, serta

untuk menghindari benturan kepentingan yang berdampak buruk bagi masyarakat dan lingkungan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agarwal, B. 2010. *Green governance: Ecological survival, human rights, and the law of the commons*. Cambridge University Press.
- Agrawal, A. 2005. *Environmentality: Technologies of Government and the Making of Subjects*. Duke University Press.
- Agrawal, A., & Ostrom, E. (Eds.). 2001. *Collective action, property rights, and decentralization in resource use in India and Nepal*. Sage Publications.
- Andargoli, Seyed Saeid Eslami; Maknoon, Reza. 2021. "A review of policies and strategies for greenhouse gas emissions reduction in European countries: 2005-2019", *Journal of Cleaner Production*.
- Banerjee, S. B. 2003. Who sustains whose development? Sustainable development and the reinvention of nature. *Organization Studies*, 24(1), 143-180.
- Barry, John. 1999. "Theorizing green politics," *Political Theory Journal*.
- Beeson, Mark. 1995. "Green political theory: An overview." *Environmental Politics Journal*.
- Bookchin, M. 1980. *The Ecology of Freedom: The Emergence and Dissolution of Hierarchy*. Cheshire Books.
- Bookchin, M. 2005. *The Philosophy of Social Ecology: Essays on Dialectical Naturalism*. Black Rose Books.
- Braun, B., & Whatmore, S. 2019. *Political Matter: Technoscience, Democracy, and Public Life*. University of Minnesota Press.
- Brosius, J. P., Tsing, A. L., & Zerner, C. (Eds.). 2005. *Communities and conservation: Histories and politics of community-based natural resource management*. Altamira Press.
- Bryant, R. L., & Bailey, S. 1997. *Third World Political Ecology*. Routledge.

- Castells, M., & Borja, J. 2012. *Local and Global: The Management of Cities in the Information Age*. Routledge.
- Conca, K., & Dabelko, G. D. (Eds.). 2003. *Green Planet Blues: Critical Perspectives on Global Environmental Politics*. Westview Press.
- Doyle, T., & McEachern, D. (Eds.). 2013. *Environment and Politics*. Routledge.
- Dryzek, J. S. 2005. *The politics of the earth: Environmental discourses*. Oxford University Press.
- Dryzek, J. S. 2013. *The Politics of the Earth: Environmental Discourses*. Oxford University Press.
- Dryzek, J. S., & Schlosberg, D. 2010. *Debating the Earth: The Environmental Politics Reader*. Oxford University Press.
- Gray, J., & Purdy, R. 2018. Corporate environmentalism and environmental advocacy. *Oxford Research Encyclopedia of Business and Management*.
- Hajer, M. A. 1995. *The Politics of Environmental Discourse: Ecological Modernization and the Policy Process*. Oxford University Press.
- Hajer, M. A., & Wagenaar, H. (Eds.). 2003. *Deliberative Policy Analysis: Understanding Governance in the Network Society*. Cambridge University Press.
- Harris, P. G. 2004. *Environmental and Natural Resource Economics: A Contemporary Approach*. Houghton Mifflin.
- Humphreys, D. 2008. Corporate social responsibility and the politics of representation: An introduction. *Journal of Business Ethics*, 83(1), 12-20.
- Kalawijaya, S. A., & Sulistyawati, E. 2019. Konsep Lingkungan Hidup dalam Perspektif Hukum Internasional. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 16(2), 185-200.

- Kals, E., & Maes, J. 2012. The relationship between environmental concern and specific energy-related behaviors at home and their antecedents. *Journal of Applied Social Psychology*, 42(1), 186-207.
- Keck, M. E., & Sikkink, K. 1998. *Activists beyond borders: Advocacy networks in international politics*. Cornell University Press.
- Kuckertz, Jannis; dan Taübe, Florian. 2018. "The effect of environmental policies on firm-level innovation: A review". *Renewable and Sustainable Energy Reviews*
- Leach, M., & Mearns, R. 1996. *The Lie of the Land: Challenging Received Wisdom on the African Environment*. International African Institute in association with James Currey Publishers.
- Mert, A. 2013. *Climate Change and Environmental Governance: Philosophical Perspectives on an Issue of our Time*. Springer.
- Mol, A. P. J. 1995. *Ecological Modernisation: Industrial Transformation and Environmental Reform*. Polity Press.
- Murphy, M. 2012. *Exploring environmental conflict: Contextual, structural and procedural dimensions*. Routledge.
- Naderi, N., Komilis, D., & Woldegiorgis, A. 2020. Sustainable waste management practices in developing countries: A review of challenges and opportunities in Iran. *Resources, Conservation and Recycling*, 161, 104977.
- O'Brien, K. L., & Leichenko, R. M. (Eds.). 2008. *Global Environmental Change: Research Pathways for the Next Decade*. National Academies Press.
- Paulson, S. (Ed.). 2003. *Political Ecology Across Spaces, Scales, and Social Groups*. Rutgers University Press.

- Purnomo, R. W. 2015. Konsep Lingkungan Hidup dalam Perspektif Hukum. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 4(2), 190-200.
- Salleh, A. 2009. *Eco-Sufficiency and Global Justice: Women Write Political Ecology*. Pluto Press.
- Scott, J. 1998. *Seeing Like a State: How Certain Schemes to Improve the Human Condition Have Failed*. Yale University Press.
- Spaargaren, G., Mol, A. P. J., & Buttel, F. H. (Eds.). 2000. *Environment and Global Modernity*. Sage Publications.
- Tretter, E. D., & Knapp, C. N. 2015. Engaging youth in environmental stewardship: Exploring the factors that influence volunteer behavior. *Environmental Education Research*, 21(6), 857-874.
- Watts, M. 2000. *Political Ecology*. Blackwell Publishers.
- Yunita, D. 2016. Konsep Lingkungan Hidup dalam Perspektif Ekologi. *Jurnal Wilayah dan Lingkungan*, 4(2), 147-156.
- Zhang, X., & Song, J. 2021. The influence of green consumption knowledge and attitudes on green purchasing intentions: Evidence from China. *Journal of Cleaner Production*, 315, 128281.

BAB 8

MENUJU KETAHANAN SOSIAL DAN EKOLOGI

Oleh Suriani Nur

8.1 Pendahuluan

Ketahanan social dan ketahanan ekologi merupakan hal yang penting. Melihat kondisi dunia mengalami perubahan yang begitu cepat dan akan mengancam setiap negara. Sebuah negara yang tidak mampu bertahan akan mengalami kehancuran baik secara perlahan atau secara cepat, jika tidak memiliki ketahanan social dan ekologi. Termasuk Indonesia sebagai salah satu negara yang memiliki sumber daya alam yang melimpah.

Indonesia merupakan negara strategis karena berada pada lintasan pelayaran ramai dunia. Ini dikarenakan berada diantara dua benua dan dua samudra besar yaitu Benua Asia dan Benua Australia serta Samudra Pasifik dan samudra Hindia. Selain itu Indonesia berada di garis khatulistiwa sehingga memiliki kekayaan flora, fauna, dan sumber sumber daya alam lainnya yang melimpah. Posisi geografis dan kekayaan alam yang dimilikinya membuat banyak negara menyorot Indonesia dengan segala perspektif dan kepentingannya. Potensi yang dimiliki Indonesia sekaligus menjadi ancaman, tantangan dan hambatan yang akan berakibat gangguan bagi Indonesia. Selain itu era digital dan revolusi industri yang melesat sedemikian cepatnya 'memaksa' masyarakat dunia untuk mengikuti agar tidak ketinggalan. *Jaman now ini dengan high technology nya*

merupakan potensi dan peluang untuk kemajuan bangsa, tapi juga sekaligus dapat menjadi gangguan bagi Indonesia.

Ada berbagai ancaman yang dapat mengganggu ketahanan nasional Indonesia antara lain Faktor internal (dalam negeri) dan faktor eksternal (luar negeri). adalah: ancaman karena faktor sosial. Era globalisasi yang melanda dunia sudah sedemikian rupa merubah tatanan masyarakat dunia termasuk Indonesia. Ancaman ketahanan nasional karena faktor social sudah didepan mata, sehingga penting untuk mengambil langkah nyata dalam meningkatkan ketahanan sosial.

Selain ancaman karena faktor social, ancaman ketahanan nasional lainnya adalah ancaman faktor ekologi. Persoalan ekologi menjadi persoalan dunia yang tidak dapat dielakkan. Indonesia sebagai salah satu negara kepulauan terbesar di dunia, sangat rentan dengan ancaman ekologi. Lingkungan hidup sebagai tempat hidup makhluk hidup sudah mengalami perubahan yang sangat signifikan. Baik yang terjadi karena faktor alam maupun akibat dari tangan manusia. Oleh kaena itu diperlukan ketahnan ekologi dalam mendukung ketahanan nasional.

Mewujudkan tujuan nasional sebagaimana yang diamanatkan pada pembukaan UUD RI 1945 perlu mendapatkan perhatian seluruh komponen. Pemerintahan negara memiliki tugas dan tanggung jawab serta butuh partisipasi seluruh elemen bangsa untuk mencapai tujuan nasional. Tujuan Nasional tercapai butuh dukungan ketahanan nasional. melalui ketahanan nasional negara mampu menghadapi tantangan, ancaman, hambatan dan gangguan. Demi tercapainya tujuan nasional Indonesia yang nyaman, aman, dan sejahtera. Indonesia memiliki potensi, peluang, tantangan dan hambatan yang sangat besar karena negara Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia.

Setiap warga negara penting memiliki kepribadian yang kuat. Agar negara Indonesia bertahan sebagai negara berdaulat yang kuat di dunia ini. Jiwa nasionalisme tinggi dan cinta tanah air berlandaskan Pancasila harus dimiliki oleh warga negara Indonesia agar ketahanan Nasional kuat.

Ketahanan nasional adalah keadaan dinamis suatu bangsa yang meliputi seluruh aspek kehidupan bangsa yang terpadu dan mengembangkan kekuatan bangsa untuk menghadapi segala tantangan, ancaman, hambatan dan gangguan, baik yang bersifat eksternal maupun internal. bangsa dan negara untuk mencapai tujuan bersama (Pranowo, 2010). Ketahanan Nasional merupakan dinamika keadaan suatu bangsa yang memiliki daya ulet dan daya tahan serta kemampuan dalam mengembangkan kekuatan nasional, menghadapi ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan dari luar maupun dari dalam negeri yang memungkinkan mengganggu identitas, interitas kelangsungan hidup bangsa dan negara. Pada hakikatnya ketahanan nasional merupakan keadaan suatu bangsa yang mampu mengatasi berbagai ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan.

Pada era disrupsi saat ini, sulit memprediksi keadaan dunia yang sangat dinamis. Oleh karena itu ketahanan nasional penting ditingkatkan termasuk ketahanan social dan ketahanan ekologi. Peningkatan mutu dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam peradaban yang berkembang berdasarkan Pancasila akan terwujud jika ketahanan nasional kuat. Ketahanan nasional kuat jika seluruh warga negara ikut serta mendukung. Undang-undang 1945 Pasal 30 ayat 1, menyatakan bahwa dalam usaha pertahanan dan keamanan negara setiap warga berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Lebih lanjut pada Pasal 30 ayat (2) menyatakan

bahwa Upaya pertahanan dan keamanan negara diselenggarakan melalui sistem pertahanan dan keamanan negara yang utuh menyeluruh, dipimpin oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta didukung oleh rakyat.

Warga negara tanpa terkecuali berhak dan wajib untuk ikut dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Meskipun Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai hal utama, tapi butuh kekuatan pendukung yaitu rakyat. Warga negara diharapkan ikut berperan dalam mendukung ketahanan nasional. Segala sesuatu dilakukan secara bersama-sama dan secara gotong royong akan lebih mudah dan lebih kuat. Sehingga penting untuk menjaga ketahanan nasional dengan keterlibatan seluruh unsur bangsa.

Karena tidak mungkin dapat melakukan kehidupan dengan tenang apabila ketahanan nasional rapuh.

Berdasarkan data Indeks Sistem Pengukuran Ketahanan Nasional terlihat bahwa target T.A. 2020 untuk point 8,1 belum tercapai karena capaian TA. 2020 pada point 7,4 (Lemhannas, 2020). Data ini dapat menjadi peringatan terhadap daerah dan nasional dalam mengambil kebijakan. Bahwa penting untuk lebih meningkatkan ketahanan nasional yang dapat dimulai dari diri sebagai individu hingga dalam tataran nasional.

Pelaksanaan pembangunan nasional Indonesia selama ini tidaklah semulus 'jalan tol'. Bangsa Indonesia senantiasa mengalami ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan terhadap upaya mencapai cita-cita bangsa.

Berdasarkan data pengukuran Ketahanan Nasional Indonesia yang dilakukan oleh Lemhanas, pada tahun 2020 di mana posisi Ketahanan nasional Indonesia berada pada indeks dengan posisi kurang Tangguh sehingga dengan

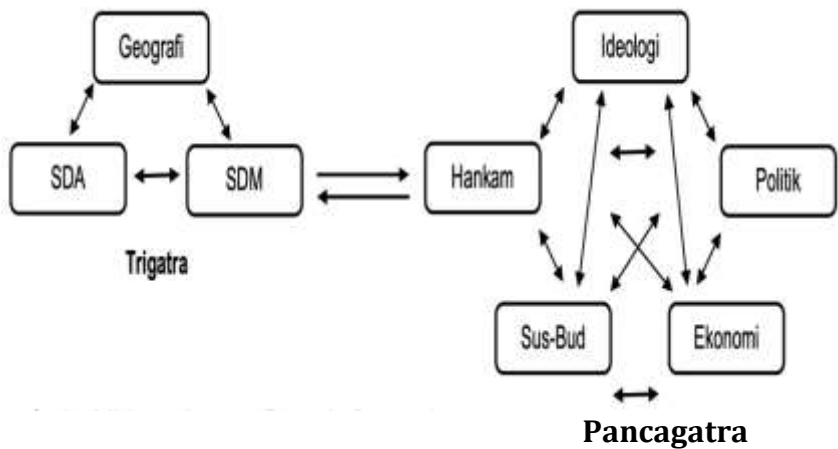
sendirinya berefek pada yang lainnya, kurang mendukung capaian cita-cita tujuan bernegara. Terwujudnya Ketahanan nasional yang Tangguh adalah prasyarat dalam mencapai cita-cita dan tujuan bernegara. (Lemhananas, 2020).

Ketahanan nasional menurut lemhanas suatu integrasi dari aspek Asta Gatra, yaitu gatra geografi, demografi, sumber kekayaan alam, ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan hankam. Aspek astagatra dapat dibagi dalam 2 (dua) kelompok besar yaitu tri gatra dan panca gatra. Aspek alamiah disebut dengan Tri Gatra meliputi geografi, demografi, dan sumber kekayaan alam. Aspek sosial yang disebut dengan Panca Gatra meliputi: ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan hankam. Aspek Tri Gatra merupakan faktor determinan dari kekuatan pembangunan nasional, sedangkan aspek Panca Gatra merupakan kondisi yang tercipta sebagai akibat dari hasil pembangunan nasional (<http://lib.lemhannas.go.id>).

Tulisan ini hanya mengulas tentang gatra social budaya terkait ketahanan social dan gatra sumber kekayaan alam terkait ketahanan ekologi. Meskipun pada hakekatnya keseluruhan dari astagatra ini merupakan satu kesatuan yang saling terkait dan tidak terpisahkan. Menjaga ketahanan sosial merupakan salah satu item yang berpengaruh dalam mewujudkan ketahanan nasional. Menjadi warga negara yang menghargai bangsanya, bangga menjadi Indonesia, cinta tanah air, mengakomodir perbedaan, memiliki jiwa nasionalisme tinggi, serta rasa tanggungjawab yang tinggi bagi bangsa dan negara. Demikian juga menjaga ketahanan ekologi merupakan item yang tidak kalah pentingnya. Karena ekologi membicarakan tentang tempat melangsungkan kehidupan hubungan yang terjadi di dalamnya.

Pothan, (2019) memaparkan sistem pertahanan negara, hubungannya dengan kedelapan gatra tidak terpisah tetapi saling terkait. Keseluruhan gatra sebagai satu kesatuan yang utuh, yang mencerminkan kondisi dinamika tata

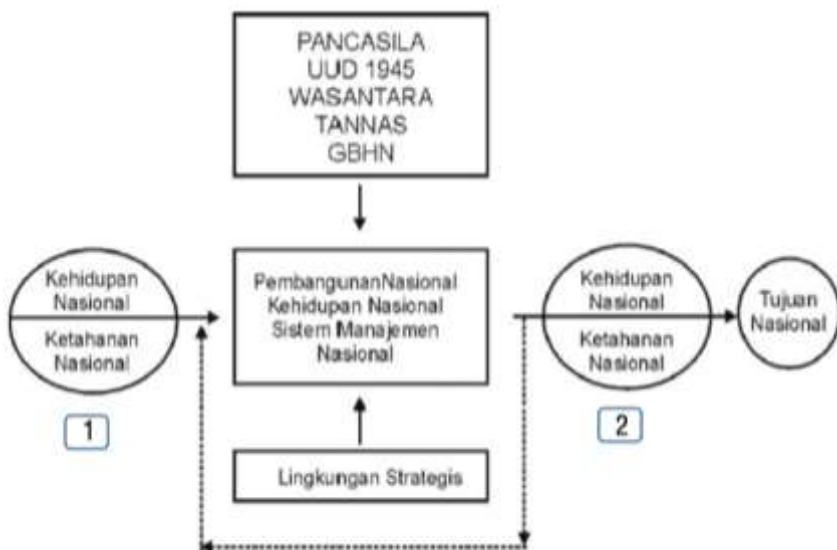
kehidupan bangsa. Faktor ini hanya dapat dibedakan secara teoretis, tetapi faktanya tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Lemahnya satu gatra akan melemahkan gatra lainnya dan juga akan mempengaruhi keadaan (sistem) secara keseluruhan. Interaksi antar astagatra dalam astagatra dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 8.1. Hubungan Antargatra (Trigatra dan Pancagatra)
Sumber: Pothan RI, 2019.

Keterkaitan Wasantara, Tannas, dan Bangnas dapat kita buat dalam bentuk pola pikir kesisteman. Dalam pola pikir ini tannas dilandasi oleh Pancasila, UUD 1945, Wasantara dan kondisi Tannas yang diinginkan dalam GBHN, yang berperan sebagai instrumental *input* bagi Tannas. Tannas menentukan lingkup, volume dan kecepatan pembangunan nasional. Pembangunan nasional yang berhasil akan meningkatkan Tannas, dan Tannas yang kokoh akan mendorong lajunya pembangunan nasional, seperti yang diilustrasikan pada gambar berikut :

Berdasarkan gambar 8.2 ini menunjukkan bahwa Ketahanan nasional berlandaskan pada Pancasila dan UUD 1945 bersama wasantara dan kondisi Tannas sesuai dalam GBHN, merupakan *input* bagi sistem manajemen nasional. Tannas menentukan pembangunan nasional. Apabila pembangunan nasional berhasil maka akan meningkatkan Tannas,. Apabila Tannas kokoh dapat mendorong kecepatan pembangunan nasional, sebagaimana gambar 8.2 berikut:



Gambar 8.2. Pola Pikir - Wasantara, Tannas, Bangnas, serta Sispenas.

Sumber: Pothan RI, 2019.

8.2 Ketahanan Sosial

Ketahanan berasal dari asal kata “tahan”. Berdasarkan kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI) ‘tahan’ mengandung makna tetap keadaanya (kedudukannya dan lain-lain) meskipun mengalami berbagai hal, tidak lekas rusak (berubah, kalah, luntur dan sebagainya). Sosial mengandung makna berkenaan masyarakat (KBBI). Sehingga secara harafiah dapat dikatakan ketahanan sosial adalah kondisi masyarakat yang keadaanya tetap meskipun menghadapi berbagai tantangan.

Ketahanan sosial merupakan bagian integral dari ketahanan nasional. bertahan di tingkat sistem lokal dari arus globalisasi dan desentralisasi. kemampuan untuk mengubah ancaman dan tantangan menjadi peluang dan kesempatan (Mu'man Nuryana, 2002). kemampuan untuk mengelola sumber daya, perbedaan, kepentingan, dan konflik.

Ketahanan Sosial adalah suatu kondisi yang dinamis dari suatu bangsa yang terdiri atas ketangguhan serta keuletan dan kemampuan untuk mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi segala macam dan bentuk ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan, baik yang datang dari dalam maupun luar, secara langsung maupun yang tidak langsung yang mengancam dan membahayakan integrasi, identitas, kelangsungan hidup bangsa dan negara serta perjuangan dalam mewujudkan tujuan perjuangan nasional. (Afrizal, Handrisal, 2020). Ketahanan Sosial juga bermakna kemampuan individu atau kelompok sosial untuk mengimbangi kerusakan yang terjadi atau untuk mengembalikan fungsi yang telah hilang, yaitu kemampuan menjadi fleksibel merespon bahaya. (Tanja, 2009) Ketahanan sosial sebagai kemampuan kelompok atau komunitas untuk mengatasi tekanan dan gangguan eksternal sebagai akibat dari perubahan sosial, politik dan lingkungan (Neil, 2000) .

Seluruh negara didunia pasti memiliki organisasi yang terstruktur dan mempunyai tujuan nasional. Mencapai tujuan nasional suatu bangsa butuh proses yang panjang dan tidak bebas dari ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan dalam segala bentuk. Mengatasi segala macam tantangan, ancaman, hambatan dan gangguan yang ada butuh sistem kuat dan manusia-manusia kuat untuk bertahan dari serangan yang ada.

Masyarakat international saat ini tidak terlalu khawatir dengan agresi militer dari negara lain. Karena setiap bangsa di dunia ini sudah sedemikian matangnya persiapan militer dengan segala perlengkapan perang yang hebat. Selain itu negara aggressor yang menyerang negara lain akan banyak mendapatkan tekanan dunia international jika sampai melakukan serangan militer. Meskipun agresi militer sudah berkurang di dunia international, tapi ancaman yang jauh lebih berat dari agresi militer adalah ancaman 'globalisasi'.

Ancaman itu dapat dikategorikan dalam beberapa hal, yaitu: pertama, ancaman terhadap Ketahanan nasional karena bahaya alam termasuk dalam kategori ini adalah pemanasan global, banjir, tsunami dan lain sebagainya. Untuk menghadapi hal di atas, maka kita harus mencintai alam, sebagaimana mencintai diri sendiri. Pembalakan liar harus diperankan dapat mengakibatkan pemanasan global dan banjir.

Ancaman terhadap Ketahanan nasional karena penyakit. Ketiga, ancaman terhadap Ketahanan nasional karena kemiskinan dan pengangguran. Keempat ancaman terhadap Ketahanan nasional karena narkoba dan zat aditif kelima ancaman terhadap Ketahanan nasional karena faktor social politik. Termasuk dalam kategori ini adalah konflik etnis, agama, budaya, kejahatan terorganisasi, terorisme, dan

lain sebagainya. Mengatasi mencamkan ini, upaya pencegahan jauh lebih penting daripada penanganannya. Menjaga tidak pidana terorisme jauh lebih penting daripada Menindak pelaku terror, karena kita pelaku terror dapat dicegah secara dini maka tidak tindak pidana terorisme tidak akan terjadi. Ke enam ancaman terhadap terhadap Ketahanan nasional karena faktor militer.

Indonesia sebagai negara yang memiliki letak geografi strategis pagi lalu lintas dunia, Indonesia yang berada dalam daerah khatulistiwa dengan banyak pulau, Indonesia yang terdiri dari berbagai suku, bangsa, dan agama merupakan potensi yang dapat memecah belah dan menjadi ancaman NKRI. Untuk dapat melakukan bela negara secara optimal, masyarakat perlu memiliki ketahanan sosial yang baik. Berbagai modal yang dimiliki bangsa ini harus terus dipelihara dan dijadikan sebagai penyokong ketahanan social masyarakat.

Modal yang ada penting dikuatkan, baik dari sisi modal alam, fisik, manusia, ekonomi/finansial, sosial, dan kelembagaan/politik. Tanpa hadirnya modal-modal tersebut, masyarakat akan rapuh demi mendapatkan kepentingan pribadi.. Masyarakat perlu memiliki modal ekonomi/finansial yang kuat agar tidak mudah disuap dalam praktik yang merugikan. tulisan ini akan membahas kondisi ketahanan sosial masyarakat PPKT sebagai modal dalam melaksanakan bela negara untuk menghadapi ancaman di perbatasan.

Ketahanan sosial budaya adalah kondisi kehidupan sosial budaya bangsa yang dijiwai kepribadian nasional berdasarkan Pancasila yang mengandung kemampuan membentuk dan mengembangkan kehidupan sosial budaya manusia dan masyarakat Indonesia yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, rukun, bersatu, cinta tanah air, berkualitas, maju dan sejahtera dalam kehidupan yang serba selaras, serasi,

seimbang serta kemampuan menangkal penetrasi budaya asing yang tidak sesuai dengan kebudayaan nasional

8.3 Ketahanan Ekologi

Ekologi merupakan ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara makhluk hidup (manusia, hewan dan tumbuhan) dan lingkungan. Berbicara ekologi adalah membahas tentang suatu sistem yang ada di alam tentang keterkaitan antaran makhluk hidup dan lingkungannya. Termasuk keterkaitan antara manusia dan lingkungannya. Manusia sebagai makhluk hidup yang paling sempurna karena memiliki akal pikiran dibandingkan dengan makhluk hidup lainnya. Melalui kecerdasan manusia mampu memanfaatkan lingkungan hidup secara optimal. Melalui kecerdasan manusia pula, lingkungan hidup dapat hancur karena perilakunya yang tidak ramah lingkungan. Oleh karena itu sangat penting Indonesia mendapat dukungan dari seluruh unsur negara untuk memiliki ketahanan ekologi.

Pengelolaan sumber daya alam sudah dilakukan sejak revolusi industri. Manusia melakukan eksploitasi sumber daya alam secara membabi buta terhadap cadangan sumber daya alam, baik yang dapat diperbahauai maupun tidak dapat diperbaharui (Gorz, 2003). Lebih lanjut Gorz, 2003 mengatakan bahwa model kehidupan saat ini tidak memiliki masa depan. Generasi mendatang tidak dapat menikmati minyak bumi dan sumber daya alam lainnya. Dunia sedang menuju kehancuran. Jika tidak berubah maka laut dan sungai akan steril dari ikan dan penghuni aquatic lainnya. Hutan sudah menghilang bersamaan dengan penghuninya lenyap entah ke mana. Air, tanah dan udara sudah tercemar dan tidak layak digunakan.

Hal inipun dapat terjadi di Indonesia atas nama pembangunan kemudian secara jor-joran sumber daya alam

dieksploitasi demi peningkatan perekonomian. Walaupun Indonesia merupakan negara yang memiliki kekayaan alam yang melimpah. Seluruh kekayaan Indonesia, baik yang hayati maupun non hayati akan memiliki manfaat jika dikelola dengan baik oleh warga negara. Warga negara sebagai pengelola sumberdaya harus memiliki kemampuan teknologi yang memadai, agar pemanfaatan sumber daya alam dapat dilakukan secara optimal dengan dibarengi wawasan lingkungan yang kuat. Agar sumber daya alam dapat berkelanjutan demi generasi mendatang. Agar sumber daya alam masih bisa terus menjadi modal pembangunan maka ketahanan ekologi adalah keharusan.

Sebenarnya apa yang di maksud ketahanan ekologi? Ketahanan ekologi adalah kemampuan, keuletan lingkungan hidup, sumber daya alam untuk bertahan dari berbagai gangguan. Ketahanan ekologi akan terbentuk jika didukung oleh manusia yang berada dalam sistem suatu negara.

Selain dari keberlanjutan sumber daya alam, maka perihal lainnya terkait dengan ketahanan ekologi adalah terkait bencana di Indonesia. Indonesia sebagai negara yang berada pada garis khatulistiwa, berada pada cincin api (*ring fire*) , negara kepulauan dengan pulau besar dan kecil dalam kepungan air laut, sangat rentan dengan berbagai bencana yang setiap saat mengancam. Bencana akibat masalah lingkungan lokal, masalah regional maupun global. Berbagai bencana sudah sering melanda berbagai tempat di Indonesia. Saat ini dunia sedang hangat membicarakan tentang ancaman dunia global yaitu perubahan iklim yang akan memberikan efek lainnya dan bencana turunannya. Selain itu bencana akibat pencemaran industri, berupa pencemaran: air, tanah dan udara.

Banyak bencana yang sudah sering terjadi dalam berbagai wilayah di Indonesia, misalnya: bencana banjir,

bencana gempa bumi, tsunami, longsor, gunung berapi, kebakaran hutan dan masih banyak lagi bencana lainnya. Indonesia sangat dekat dengan bencana dan akan selalu ada sepanjang zaman. Oleh karena itu penting untuk meningkatkan ketahanan ekologi di Indonesia agar ketahanan nasional semakin meningkat.

Ketahanan nasional adalah syarat utama suatu negara untuk maju, sejahtera, tangguh dan ulet, dalam menghadapi ancaman yang akan membahayakan integritas & kelangsungan bangsa. Seluruh unsur dan komponean bangsa harus bisa menjaga ketahanan ekologi dengan berbagai cara berdasarkan profesi dan kemampuan diri.

Berdasarkan definisi pada pemaparan sebelumnya Ketahanan nasional merupakan kondisi dinamis sebuah bangsa yang tangguh, ulet, dan memiliki potensi untuk mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mencari solusi berbagai ancaman yang akan membahayakan integritas, identitas dan kelangsungan hidup bangsa (Tannas).

Manusia dan lingkungan hidup tidak dapat dipisahkan sejak keberadaan manusia di bumi ini. sejak awal pula manusia sudah berinteraksi dengan alam dan lingkungannya. Hubungan lingkungan dan manusia dapat dilihat pada berbagai aspek baik budaya, perilaku manusia, dan ditentukan, dipengaruhi lingkungan (Susilo, 2012). Pada hakekatnya manusia tidak bisa terpisah dari alam karena segala kebutuhan manusia dipenuhi dari lingkungan hidup. Tanpa lingkungan hidup maka manusia tidak dapat melangsungkan kehidupan ini.

Ada beberapa teori perkembangan hubungan interaksi antara manusia dengan lingkungannya yaitu: 1) *environmental Determinism*, 2) *Environmental possibilism*, 3) *Cultural ecology*, 4) *The ecosystem- based model of human ecology*, 5) *the actor- based model of human ecology*, 6) *the*

system- based model of human ecology (Rambo, 1983; Iskandar, 2009).

1. *Environmental Determinism*. Teori ini menegaskan bahwa semua aspek budaya dan perilaku manusia secara langsung dipengaruhi oleh lingkungan (Rambo, 1983; Iskandar, 2009). Ada variasi perilaku manusia yang sangat mirip dengan konteks geografis, karenanya menjadi penentu lingkungan.
2. *Environmental Possibilism*. Teori ini menyatakan bahwa lingkungan tidak secara langsung mempengaruhi pertumbuhan tanaman tertentu; ada atau tidak adanya faktor lingkungan tertentu membatasi pertumbuhan dengan membiarkan atau mencegah pertumbuhan tersebut terjadi
3. *Cultural Ecology*, hubungan antara manusia dengan alamnya adalah suatu dinamika dimana baik budaya maupun lingkungan terus-menerus beradaptasi dan readaptasi ketika sesuatu berubah yang merupakan respons terhadap pengaruh yang lain.
4. *The Ecosystem- Based Model Of Human Ecology*, Dari perspektif ini, manusia hanyalah salah satu spesies tumbuhan dan hewan yang berinteraksi satu sama lain dan dengan komponen anorganik ekosistem lokal. Ekosistem, bukan budaya, adalah unit dasar analisis dalam kerangka konseptual ekologi manusia.
5. *The Actor- Based Model Of Human Ecology*, Dalam kasus masyarakat manusia, adaptasi lingkungan tidak dilihat sebagai hasil seleksi alam dalam sosio-kultural, tetapi sebagai hasil pilihan kolektif yang dibuat oleh ribuan orang tentang cara terbaik untuk berinteraksi dengan lingkungan. terus-menerus membuat keputusan tentang bagaimana menggunakan sumber daya yang tersedia sambil mengatasi bencana. Mereka yang membuat pilihan

yang tepat bertahan dan berkembang, sedangkan mereka yang membuat pilihan yang salah mengalami sebaliknya. Seiring waktu, strategi yang lebih adaptif akan dibakukan sebagai norma budaya. Faktanya, norma-norma ini hanyalah hasil statistik dari pengambilan keputusan individu, tidak memiliki realitasnya sendiri, dan merupakan konsep biasa dari ilmuwan sosial.

6. *The System- Based Model Of Human Ecology*. Pendekatan "model sistem ekologi manusia" alternatif menggambarkan sistem sosial saat mereka berinteraksi dengan sistem ekologi. Adaptasi seharusnya terjadi, bukan pada tingkat lembaga budaya atau sosial yang berbeda - - seperti dalam model budaya-ekologis - - atau dalam kaitannya dengan populasi orang tertentu - - seperti dalam model ekologi dasar manusia - - atau dalam istilah pengambilan keputusan individu secara khusus - - seperti dalam model ekologi manusia berbasis agen - - tetapi pada tingkat sistem sosial total mungkin sebagai suatu sistem.

Dalam pengelolaan lingkungan dibutuhkan ekologi manusia (Soemarwoto, 1997:20) yang mempelajari hubungan timbal balik antara manusia dengan lingkungan hidupnya. Ekologi manusia disatu pihak dapat dilihat sebagai bagian dari autekologi, yaitu ekologi dari spesies tunggal (*homo sapiens*). Saat manusia dilihat sebagai makhluk sosial maka ekologi manusia dapat menggunakan sinekologi sehingga ekologi manusia bersifat sebagai social. Ekologi manusia adalah studi yang mengkaji interaksi manusia dengan lingkungan. Sebagai bagian dari ekosistem, manusia merupakan makhluk hidup yang ekologi dominan. Hal ini karena manusia dapat berkompetensi secara lebih baik untuk memenuhi kebutuhan hidupnya (Hadi, 2000).

Secara analitik (Rambo dalam Soerjani, 1985:3) membedakan lingkup ekologi manusia dalam dua system yaitu system alam dan system sosial. Kedua system tersebut saling berhubungan timbal balik terus menerus dan teratur melalui aliran energy, materi dan informasi sehingga terjadi proses seleksi dan adaptasi. Lingkungan manusia didefinisikan sebagai segala sesuatu yang berada di sekitar manusia yang berpengaruh pada kehidupan manusia itu sendiri (lihat Gambar 1). Menurut Rambo (1983), factor system biofisik atau ekosistem adalah berupa iklim, udara, air, tanah, tanaman, binatang. Di alam nyata terjadi daur (siklus) materi dan energy hanya satu arah yaitu dari alam, terjadi arus energy sedangkan materi terdapat pada arus informasi. Timbulnya perubahan hubungan interaksi manusia dan lingkungan sekitar disebabkan oleh factor internal (pertambahan penduduk) dan eksternal (perkembangan ekonomi pasar, pembangunan, kebijakan pemerintah). Ekologi manusia dipelopori oleh para ilmu sosial (Auguste Comte tahun 1800 tentang rekonstruksi sosial). Kajian sosial akan penyebaran manusia dalam tata wilayah dipelajari dalam konteks ekologi manusia. Ekologi manusia menekankan penyebaran manusia dan variable sosialnya dalam tata ruang, sehingga kajiannya berkaitan dengan geografi. Saat ini semua kajian berkaitan dengan ekologi manusia, yaitu biologi, antropologi, ekonomi, teknologi, psikologi, hokum, pertanian, pendidikan, kesehatan masyarakat, filsafat, agama dan lain-lain.

Neil (2000) menyoroti resiliensi sosial dalam kaitannya dengan konsep resiliensi ekologis yang merupakan ciri ekosistem untuk mempertahankan diri dalam menghadapi gangguan. Ada hubungan yang jelas antara ketahanan sosial dan ekologi, khususnya untuk kelompok sosial atau komunitas yang bergantung pada sumber daya ekologi dan

lingkungan untuk penghidupan mereka. Namun tidak jelas apakah ekosistem yang tangguh memungkinkan masyarakat yang tangguh dalam situasi seperti itu. Lebih lanjut Neil mengatakan bahwa ketahanan adalah karakteristik yang berguna untuk menggambarkan situasi sosial dan ekonomi kelompok sosial dan mengeksplorasi hubungan potensial antara ketahanan sosial dan ketahanan ekologis.(Neil,2000).

Ketahanan social dan ketahanan ekologi sangat terkait, Temuan menunjukkan bahwa ketahanan social dan ketahanan ekologis terkait erat dengan dinamika lokal, regional, dan global. Ketahanan sosial dan ketahanan ekologis sangat ditentukan oleh lingkungan lokal, regional maupun global. Ketahanan social dan ketahanan ekologis akan selalu berubah mengikuti perubahan zaman yang terjadi. Keterlibatan masyarakat dalam menjaga ketahanan social dan ketahanan ekologis mutlak diperlukan. Setiap individu penting berpartisipasi untuk menjaga ketahanan sosial dan ketahanan ekologis. Semakin kuat ketahanan sosial dan ekologis setiap individu, maka semakin kuat pula ketahanan sosial dan ekologis keluarga hal ini secara berjenjang pada ketahanan nasional yang kuat. Jika ketahanan sosial keluarga kuat, maka ketahanan sosial masyarakat juga akan kuat

Legionosuko (2019). menyatakan bahwa ancaman ekologi, terutama dari perubahan iklim, akan mendukung perumusan kebijakan pemerintah yang mengutamakan manusia atau human security. Oleh karena itu, perubahan iklim yang dapat mengganggu kondisi lingkungan negara harus diantisipasi dengan dukungan teknologi, kesiapan sumber daya manusia dan kebijakan pemerintah yang ada untuk beradaptasi dengan perubahan iklim.

Sebagai negara yang rawan bencana maka sudah merupakan keharusan seluruh masyarakat Indonesia untuk bersiap dengan segala kemungkinan yang ada. Penting untuk mengajarkan pada manusia Indonesia dalam menjadi

manusia ulet dan tangguh terhadap keadaan lingkungan hidup Indonesia. Masyarakat Indonesia harus sadar tentang potensi sumber daya alam dengan kekayaan alam yang luarbiasa. Pelestarian sumber daya alam yang ada baik hayati maupun non hayati harus menjadi prioritas. Selain itu juga harus sadar dengan potensi bencana yang setiap waktu akan menjadi ancaman, tantangan dan hambatan dalam mencapai tujuan Nasional Indonesia. Ketahanan social dan ketahanan ekologi bagian dari kehatanan nasional yang penting manjadi perhatian bersama.

DAFTAR PUSTAKA

- Neil W. Adger. 2000. *"Social and Ecological Resilience: Are They Related?"* Progress in Human Geography Vol. 24 No. 3: 347-364. <https://journals.sagepub.com/doi/10.1191/030913200701540465#tab-contributors>
- Afrizal, Handrisal. 2019. *Mewujudkan Ketahanan Sosial Masyarakat Melalui Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Di Desa E kang Anculai Kabupaten Bintan*. Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji. Email: Afrizal.Umrah@gmail.Com-Handrisal.88@Umrah.Ac.Id . Jurnal Wedana Volume.5 NO.1 (2019): April
- Balai Pustaka. 2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*. DEPDIKNAS. Jakarta: Balai Pustaka.
- Iskandar, Johan. 2009. Ekologi manusia dan pembangunan berkelanjutan. Program studi Magister ilmu lingkungan Universitas Padjadjaran. Bandung
- Nugroho, R.B.E.A. Menggalang Ketahanan Nasional dengan Paradigma Pancasila. Kompas Penerbit Buku. JAKarta
- Pranowo, M. Bambang. 2010. *Multi dimensi Ketahanan nasional*. Alvabet. Jakarta.
- Sadewo dan Purnasari. 2020. *Pengantar ketahanan Sosial, Ekonomi dan ekologi*. Purwekerto Selatan: Pena Persada.
- Susilo, Rachmad K.D. 2012. *Sosiologi Lingkungan*. Radjagrafindo Persada. Jakarta.
- Tanja Trkulja. 2009. *" Social Resilience As A Theoritical Approach To Social Sustainability*. Faculty Architecture and Civil Engginering. Banja Luka .

- Legionosuko, Tri. 2019. Posisi Dan Strategi Indonesia Dalam Menghadapi Perubahan Iklim Guna Mendukung Ketahanan Nasional. Jurnal Ketahanan Nasional. Vol. 25, No. 3, Desember 2019, Hal 295-312. Universitas Pertahanan
- Laporan Kinerja Lemhannas R.I. TA 2020. https://www.lemhannas.go.id/images/2021/06/PPID/LAPORAN_KINERJA_2020.pdf. Dikases 29 april 2023.
- <http://lib.lemhannas.go.id/public/media/catalog/0010-011600000000161/swf/4217/files/basic-html/page3.html#:~:text=Ketahanan%20nasional%20merupakan%20integrasi%20dari,%2C%20sosial%20budaya%2C%20dan%20hankam>.
- Tim Pokja Modul Pembinaan Kesadaran Bela Negara. 2019. Ketahanan Nasional Dalam Gerakan Bela Negara. Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. Jakarta. <https://pothan.kemhan.go.id/wp-content/uploads/2020/07/8-Modul-Ketahanan-Nasional.pdf>
- Sylvia Prisca Delima. 2019. Model Ketahanan Sosial-Ekologi dalam Pembangunan Berkelanjutan : Studi Kota Batam. URI: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20491880&lokasi=lokal>. Disertasi. UI Library. Jakarta.

BAB 9

MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA

Oleh Fresy Nissia Lumowa

9.1 Pendahuluan

Manajemen sumber daya manusia merupakan suatu organisasi, suatu tim, ataupun sekelompok orang yang mengatur cara kerja anggotanya dalam hal ini manusia, untuk bisa menjalankan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan prosedur yang ditetapkan untuk suatu tujuan bersama. Manusia merupakan sumber daya yang bertugas sebagai penggerak, pelaksana, maupun pengatur jalannya suatu kegiatan ataupun suatu sistem yang berjalan. oleh sebab itu, perlu adanya pengaturan, arahan, bahkan informasi yang relevan terkait dengan pengorganisasian bahkan kategorisasi peranan manajerial untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkompeten. Manajemen dan sumber daya terbagi atas dua bagian yang keduanya berperan dalam proses berlangsungnya suatu kegiatan(Fais,2014). Secara garis besar, bab ini akan menjelaskan tentang manajemen sumber daya manusia yang berperan dalam organisasi manajemen kesehatan dan didalamnya berkaitan dengan pelayanan kesehatan dan program kesehatan masyarakat.

9.2 Pengertian Manajemen Sumber Daya Manusia

1. Manajemen berasal dari kata manage yang berarti mengatur, mengelolah, mengkoordinir, mengurus segala sesuatu baik suatu kinerja, maupun suatu kegiatan yang membutuhkan pengaturan dan perencanaan sehingga dapat berjalan dengan baik dan selaras untuk mencapai tujuan bersama (Faustino, 2003)
2. Sumber Daya. Sumber Daya yang dimaksud terbagi atas dua yaitu, Sumber Daya Manusia (SDM) yang adalah orang – orang yang berperan dalam menjalankan suatu aktifitas maupun kegiatan yang terstruktur sesuai dengan bidagn keahlian , tugas dan tanggung jawab.Sedangkan Sumber Daya non Manusia berupa alat, material, mesin, dan bahan – bahan yang biasanya disebut dengan fasilitas – fasilitas yang digunakan untuk memenuhi lancarnya suatu aktifitas dan kegiatan yang dijalankan(Faustino, 2003)

Berbagai istilah yang dipakai untuk menunjukan keberadaan dari manajemen sumber daya manusia diantaranya adalah manajemen sumber daya manusia, manajemen sumber daya insani, manajemen personalia, manajemen kepegawaian, manajemen perburuhan, manajemen tenaga kerja, administrasi personalia dan hubungan industrial (Faustino, 2003).

9.3 Ruang Lingkup Manajemen Sumber Daya Manusia

Tugas Manajemen Sumber Daya Manusia adalah untuk manage suatu kegiatan yang berlangsung dengan adanya struktur organisasi yang melahirkan buah – buah pikiran dalam bentuk perencanaan, pelaksanaan, monitoring hingga evaluasi.

Manusia adalah pelaksana suatu kegiatan yang dirancang dan ditetapkan sehingga suatu kegiatan dapat berlangsung dengan baik. Manusia yang menjalankan suatu kegiatan yang telah dirancang, dituntut untuk bisa menjalankan seefektif dan seefisien mungkin, sehingga mencapai satu tujuan kegiatan. Tujuan dari manajemen sumber daya manusia merujuk pada fungsi dari manajemen sumber daya manusia dimana sumber daya manusia ini berfungsi sebagai penggerak suatu kegiatan berdasarkan susunan organisasi pada kegiatan tersebut. Jadi, dapat diartikan bahwa, manajemen sumber daya manusia adalah komponen penentu berhasilnya suatu kegiatan dan tercapainya suatu tujuan kegiatan (Faustino, 2003).

Manajemen sumber daya manusia sangat penting dalam suatu organisasi kegiatan, dimana beberapa waktu belakangan ini nampaknya sebagian besar orang dalam hal ini pihak akademisi memiliki pandangan bahwa manajemen sumber daya manusia ini ternyata sangat berperan di masa pandemik covid – 19, dimana setiap orang menjadi tidak sulit untuk bisa berinteraksi dengan orang lain untuk berbagi ilmu dalam bentuk kuliah umum, kuliah pakar, seminar yang dinamakan webinar, maupun kegiatan – kegiatan untuk melatih seseorang dalam memperoleh suatu keterampilan seperti pelatihan – pelatihan. Kegiatan – kegiatan personal maupun interpersonal seperti itu tentunya membuhkan sumber daya manusia untuk bisa menjalankan suatu aktifitas yang membangun. Kegiatan – kegiatan positif seperti ini, dapat juga membangun minat seseorang untuk bisa berperan dan beraktualisasi secara bebas meskipun hanya bertatap muka secara online. Peran dari manusia sebagai penyaji yang dibantu oleh berbagai perangkat dan aplikasi ini, sangat penting agar kegiatan yang berlangsung secara online dapat terlihat menarik dan interaktif serta diterima sebagai kegiatan yang bermanfaat. Pentingnya Manajemen Sumber Daya Manusia ini penting untuk dijalankan dan dapat dilihat dari berbagai

perspektif yaitu perspektif kesehatan, perspektif hukum, perspektif sosial budaya, dan perspektif ekonomi.

1. Perspektif Kesehatan

Pentingnya manajemen sumber daya manusia dalam perspektif bidang kesehatan, dimana berkaitan dengan mutu pelayanan kesehatan sebagaimana diatur dalam Permenkes No. 4 Tahun 2019 Tentang Standard Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standard Pelayanan Kesehatan yang didalamnya terdapat sumber daya yang terutama dalam hal ini adalah sumber daya yang memiliki karakteristik sebagai orang yang memiliki pengetahuan, keterampilan, pengalaman dan tentunya berkompeten dalam pemberian layanan kesehatan sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah. Selanjutnya sumber daya berupa sarana prasarana dalam hal ini terkait dengan fasilitas kesehatan yang menunjang terlaksananya pelayanan kesehatan. Sumber daya sarana prasarana juga menentukan mutu layanan kesehatan yang diberikan, dimana dengan adanya sarana prasarana memudahkan petugas kesehatan dalam memberikan layanan kesehatan. Sementara kurangnya ketersediaan sarana prasarana dapat mempengaruhi kepuasan pasien dalam pemenuhan hak layanan kesehatan yang diberikan oleh petugas kesehatan.

2. Perspektif Hukum

Pentingnya sumber daya manusia dalam perspektif bidang hukum dimana didalamnya terkait dengan peraturan – peraturan yang dibentuk, dipersiapkan bahkan diberlakukan oleh suatu lembaga ataupun suatu badan hukum yang memiliki keterkaitan dengan pembentukan suatu peraturan. Suatu peraturan dan sumber daya manusia tentunya merupakan suatu keterkaitan dimana peraturan dibuat ataupun dibentuk oleh suatu organisasi yang

didalamnya terdapat manusia yang membentuk suatu pandangan melalui proses perencanaan, analisis hingga evaluasi, kemudian berdasarkan proses itulah, maka melahirkan suatu peraturan yang wajib diberlakukan dan dijalankan oleh semua orang dalam hal ini adalah kelompok masyarakat. Berdasarkan konsep manajemen sumber daya manusia dalam hal mengkoordinir, membentuk, mengelolah dan mengatur, maka pada perspektif hukum juga memiliki pandangan tentang pentingnya manajemen sumber daya manusia yang didalamnya terdapat organisasi yang membentuk suatu pola pikir yang mendasar untuk membentuk suatu peraturan untuk dijalankan dan ditaati oleh semua elemen masyarakat. Masyarakat disini juga termasuk dalam komponen sumber daya dimana yang menjadi tujuan dari terbentuknya suatu aturan hukum adalah masyarakat itu sendiri, maka jika terdapat ketidaksesuaian berupa pelanggaran hukum, maka perlu diberlakukannya sanksi terkait dengan jenis aturan yang dilanggar(Faustino, 2003).

3. Perspektif Sosial Budaya

Dalam perspektif sosial budaya sangat jelas terkandung bahwa manajemen sumber daya manusia sangat berperan penting jika dilihat dari perspektif sosial budaya dimana berkaitan dengan kultur, budaya, kebiasaan seseorang dalam menunjang kualitas diri, menunjukkan kompetensi bahkan keterampilan baik dalam organisasi terkecil yaitu keluarga, maupun organisasi yang luas yakni dalam lingkungan bermasyarakat. Dalam berorganisasi tentunya hubungan sosial sangat penting agar terciptanya keharmonisan dan keselarasan dalam menjalankan tugasnya, perannya, maupun etika dalam memberikan pendapat. Begitupun berkaitan dengan budaya dan kultur seseorang juga berpengaruh pada caranya dalam

berorganisasi, caranya memperlkukan orang lain, termasuk caranya dalam hidup bersosial dan berorganisasi ditengah masyarakat. Sebenarnya, suatu budaya tidak dapat dengan mudah diubah namun kebiasaan seseorang, perilaku seseorang dapat dibentuk, dapat diatur, dapat di manage dengan baik, ditanam dengan ciri khas yang positif sehingga dapat terbentuk budaya yang baik, kebiasaan yang baik dan melahirkan sumber daya manusia yang berkualitas.

4. Perspektif Ekonomi

Dalam Perspektif ekonomi peran manajemen sumber daya manusia tentunya sangat berperan, dimana jalannya suatu perekonomian yang baik di suatu daerah maupun pada suatu negara membutuhkan sumber daya manusia yang terampil dan terpercaya untuk bisa menjalankan roda perekonomian pada suatu daerah. Sumber daya manusia dalam perspektif ekonomi ini tidak sepenuhnya dibangun dengan adanya sarana prasarana yang lengkap, namun sumber daya manusia disini bersifat mengatur stabilitas perekonomian untuk menghasilkan sesuatu, menciptakan sesuatu, bahkan membuat dan merancang sesuatu hal yang bersifat menghasilkan, berguna, dan tentunya memiliki nilai dan hasil yang akan berkelanjutan serta diprediksikan akan makin berkembang. Organisasi ataupun tim yang dibentuk berdasarkan perspektif ekonomi ini adalah orang – orang dengan kompetensi dalam bidang ekonomi dan memiliki keterampilan dalam melatih, mengkoordinir, maupun mengelola keuangan, sumber – sumber yang menghasilkan nilai / uang dan tentunya diatur berdasar ketentuan serta pelaporan yang benar(Faustino, 2003).

9.4 Organisasi Dan Manajemen Pelayanan Kesehatan

Kata organisasi berasal dari kata organon dalam bahasa Yunani yang berarti alat (Fais,2014). Beberapa ahli mengemukakan pendapat tentang pengertian organisasi, namun beberapa pendapat tersebut dapat disatukan karena memiliki kemiripan dan tidak jauh berbeda satu sama lain. Beberapa pendapat terkait dengan organisasi dapat diuraikan sebagai berikut :

Chester Barnard dalam Fais (2014) berpendapat bahwa organisasi yaitu bentuk kerjasama antara dua orang atau lebih.

Max Weber berpendapat bahwa organisasi merupakan suatu kerangka atau suatu hubungan yang terstruktur yang didalamnya terdapat wewenang, dan tanggung jawab serta pembagian kerja dalam menjalankan suatu fungsi tertentu. Menurut Robins dalam Irene (2020) menyatakan bahwa organisasi merupakan kesatuan sosial yang dikoordinasikan secara sadar, dengan suatu batasan yang relatif bisa untuk diidentifikasi, dan bekerja atas dasar relatif dan terus menerus untuk mencapai tujuan tertentu. Siagian (2015) berpendapat bahwa organisasi merupakan setiap bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerjasama secara formal dan terstruktur serta bersifat terikat untuk mencapai suatu tujuan bersama.



Gambar 9.1. Unsur Organisasi (Fais,2014)

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa organisasi merupakan sekelompok orang yang memiliki pembagian tugas masing – masing dan saling berkoordinasi dalam menyatukan persepsi untuk mencapai tujuan bersama, dimana karakteristik organisasi yang terdiri dari beberapa orang dengan masing – masing pemikiran berusaha menyatukan hasil pemikirannya untuk membentuk suatu pemahaman yang satu, dan oleh karena kesatuan tersebut maka terbentuknya suatu kesepakatan untuk mencapai tujuan yang sama.

9.5 Prinsip - Prinsip Organisasi

Terdapat prinsip – prinsip organisasi yang dikemukakan oleh A.M. Williams dalam Fais 2014, bahwa prinsip – prinsip organisasi terdiri dari, sebagai berikut :

1. Organisasi harus memiliki tujuan yang jelas

Setiap organisasi harus memiliki tujuan atau capaian sehingga organisasi dapat dikatakan bermanfaat untuk dibentuk. Untuk mencapai suatu tujuan, perlu adanya kerjasama antar anggota organisasi baik pimpinan organisasi maupun seluruh anggota suatu organisasi. Salah satu faktor keberhasilan suatu organisasi adalah eratnya kerjasama tim yang saling membangun dan memotivasi satu sama lain sehingga tim yang solid dapat membawa pada tujuan yang diharapkan. Salah satu faktor penghambat dari tidak berhasilnya suatu organisasi adalah anggota tim yang tidak bekerjasama dengan baik, dan kurangnya komunikasi. Oleh sebab itu, perlu adanya komitmen dari semua anggota organisasi baik pemimpin organisasi maupun anggota untuk bisa saling bekerjasama, tidak bersekat dan memiliki kesepakatan untuk mencapai 1 tujuan yang sama(Fais, 2014).

2. Prinsip Skala Hierarki

Dalam suatu organisasi, perlu adanya pendelegasian dan kewenangan yang jelas yang diberikan baik oleh pimpinan organisasi, maupun penasehat dan pendamping pemimpin organisasi, sehingga setiap anggota organisasi dapat menjalankan tugas sesuai dengan pendelegasian dan kewenangan yang telah dipercayakan dan telah ditugaskan oleh pimpinan organisasi, maupun penasehat dan pendamping pimpinan organisasi. Masing – masing anggota organisasi harus memiliki TUPOKSI (tugas, pokok, dan fungsi) masing – masing dan dibagi berdasarkan keahlian dan kemampuan oleh masing – masing anggota. Setiap anggota organisasi berkewajiban untuk menjalankan tugasnya dalam organisasi dan berhak untuk mendapatkan kewenangan dalam menjalankan tugasnya dalam suatu organisasi. Maksud dan tujuan dari pemberian kewenangan pada anggota organisasi agar supaya anggota tim dapat bekerja sama satu sama lain, menyatukan semua pendapat, dan semua hal yang tercakup dalam tujuan organisasi dapat dikerjakan secara bersama – sama meskipun dengan pembagian tugas yang berbeda namun mengarah pada keberhasilan tujuan dari organisasi. Setiap anggota organisasi yang diberikan kewenangan dalam menjalankan tugas, juga wajib membuat laporan kinerja dan mendapat asesment oleh pimpinan organisasi (Fais, 2014).

3. Prinsip Kesatuan Perintah

Setiap organisasi hanya memiliki 1 kepala atau satu pimpinan dalam mengambil kebijakan dan keputusan, sehingga anggota organisasi wajib untuk patuh dan taat bahkan menghormati setiap kebijakan dan keputusan yang diberikan oleh satu pimpinan saja, dan bertanggung jawab

memenuhi tugas dan fungsinya pada satu pimpinan organisasi(Fais, 2014).

4. Prinsip Pendelegasian Wewenang

Seorang pemimpin tidak dapat bekerja sendiri dalam menjalankan suatu organisasi dan memenuhi capaian atau tujuan organisasi, sehingga dipandang penting untuk dilakukannya pendelegasian wewenang pada anggota organisasi untuk bisa membantu pimpinan organisasi untuk bekerja dan mencapai tujuan organisasi. Pembagian tugas pada anggota organisasi diberikan oleh pimpinan organisasi secara profesional dengan memperhatikan keahlian dan kompetensi yang dimiliki oleh anggota organisasi sehingga semua tugas dan pekerjaan dapat dikerjakan dengan baik dan terstruktur. Untuk itu berdasarkan pendelegasian wewenang atau biasanya disebut dengan pembagian tugas, maka anggota organisasi yang diberikan tanggung jawab wajib untuk menyusun laporan kinerja terkait dengan pelaksanaan tugas yang didelegasikan untuk dikerjakan. Pemimpin organisasi memiliki hak untuk mengontrol dan mengevaluasi kinerja dari anggota organisasi selama proses tersebut bersifat profesional dan penting untuk dilaksanakan(Fais, 2014).

5. Prinsip Pertanggungjawaban

Dalam setiap organisasi, anggota organisasi atau bawahan dalam suatu pekerjaan memiliki kewajiban dalam memberikan kinerja yang terbaik dan profesional terhadap tugas yang telah dipercayakan pimpinan untuk dikerjakan. Sebagai bentuk profesionalitas dari seorang anggota organisasi adalah dengan memberikan pelaporan tugas kinerjanya baik secara lisan maupun tulisan, dalam artian setiap tindakan yang dinilai perlu untuk dilakukan dalam

tugas yang dipercayakan wajib untuk diketahui oleh pimpinan organisasi dan berhak mendapatkan persetujuan terlebih dahulu sehingga kegiatan yang dilakukan dapat diketahui oleh pimpinan organisasi dan disetujui oleh pimpinan sebagai jenis kegiatan yang terlapor dan disetujui untuk dilaksanakan(Fais, 2014).

6. Prinsip Pembagian Pekerjaan

Dalam suatu organisasi,biasanya memiliki struktur organisasi, dimana pada struktur organisasi dapat memuat pembagian tugas sesuai dengan bidang keahlian masing – masing anggota organisasi.Seorang pemimpin organisasi memiliki hak dalam penunjukan anggota organisasi serta berhak untuk memilih dan menetapkan struktur organisasi dengan melihat latar belakang keahlian anggota, kompetensi yang dimiliki, serta kemampuan anggota dalam menjalankan tugas tersebut.Tujuan dari diadakannya pembagian pekerjaan, karena pemimpin organisasi tidak memiliki kemampuan untuk melaksanakan suatu kegiatan, mengontrol dan mengevaluasi kegiatan seorang diri. Suatu kegiatan ataupun pekerjaan dapat berjalan dengan baik jika dilakukan dan dijalankan secara bersama – sama dan saling bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Oleh sebab itu, pembagian pekerjaan sangat penting dan lumrah dijalankan dalam suatu organisasi(Fais, 2014).

7. Prinsip Rentang Pengendalian

Pada prinsip rentang pengendalian dapat memuat tentang jumlah anggota organisasi dengan jumlah pimpinan dalam suatu organisasi, dimana anggota suatu organisasi bertanggung jawab kepada satu pimpinan utama sehingga sistem monitoring, evaluasi, audit bahkan pelaporan kegiatan dapat berjalan dengan baik pada jalur satu arah,

dimana jenis kegiatan dan pekerjaan yang akan dijalankan diatur dan dikoordinir oleh satu pimpinan(Fais, 2014).

8. Prinsip Fungsional

Seorang anggota organisasi ataupun pekerja dalam suatu tempat kerja harus memiliki profesionalitas dalam bekerja. Eksistensi diri dalam pekerjaan sangat didasari oleh produktifitas kerja, dimana seorang yang memiliki produktifitas kerja yang baik dalam menjalankan tugas tanggung jawab, maka dapat menjalankan tugas – tugas fungsional yang menjadi tugas tanggung jawabnya. Prinsip fungsional sangat berkaitan dengan produktifitas kerja dimana orang yang memiliki tanggung jawab fungsional memiliki tanggung jawab yang lebih besar, sehingga rentan mengalami terganggunya kondisi psikologis seperti stress kerja, dan kelelahan kerja dimana kondisi – kondisi psikologis tersebut dapat berpengaruh pada produktifitas kerja dan mengganggu prinsip – prinsip fungsional yang berada di tempat kerja(Fais, 2014).

9. Prinsip Pemisahan

Prinsip pemisahan ini terkait dengan beban pekerjaan seseorang, dimana beban pekerjaan yang telah diberikan oleh pemimpin wajib dijalankan oleh orang yang bersangkutan, dan tidak diperkenankan untuk memberikan beban pekerjaan yang diberikan, kepada orang lain. Pemindahan beban kerja hanya bisa diberikan pada orang lain jika anggota organisasi ataupun pekerja sedang dalam keadaan dan kondisi yang tidak memungkinkan dalam menjalankan tugas pekerjaan yang dipercayakan dengan alasan sakit ataupun kondisi – kondisi tertentu yang tidak memungkinkan pekerja mengerjakan tugas dan tanggung jawabnya(Fais, 2014).

10. Prinsip Keseimbangan

Prinsip keseimbangan ini terkait dengan penyusunan struktur organisasi dimana perlu diperhatikan mengenai proporsi jumlah pekerja dan jenis pekerjaan yang diberikan pada anggota organisasi ataupun bawahan dalam pekerja. Jenis pekerjaan tertentu hanya bisa dikerjakan oleh pekerja laki – laki sebaliknya pada jenis pekerjaan tertentu, lebih cocok pada pekerja perempuan, sehingga dibutuhkan keseimbangan penempatan posisi pekerjaan karena didalamnya akan berpengaruh pada kualitas pekerjaan dan nilai keberhasilan dari tujuan pekerjaan. Pada prinsip keseimbangan ini juga yang menjadi perhatian adalah beban kerja seseorang dimana setiap pekerja memiliki kapasitas kerja dimana di Indonesia jumlah jam kerja seorang pekerja adalah 8 jam per hari dan pemilik pekerjaan wajib memberikan jam istirahat pada pekerja. Artinya, pemilik pekerjaan tidak diperkenankan untuk menaikkan jumlah jam kerja pekerja karena hal tersebut akan berpengaruh pada produktifitas kerja yang tidak akan lagi optimal sehingga tujuan dari pekerjaan tidak akan maksimal pencapaiannya. Begitu pula dengan beban kerja atau jumlah pekerjaan yang diberikan pada pekerja tidak boleh melebihi kapasitas kerja atau jumlah kerja berlebih, untuk itu pembagian tugas pada pekerja harus seimbang disesuaikan dengan kondisi, situasi bahkan kompetensi, kehandalan, dan kemampuan seseorang dalam bekerja (Fais, 2014).

11. Prinsip Fleksibilitas

Suatu organisasi harus mampu menunjukan inovasi berupa pengembangan dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan, serta mampu mengatasi setiap dinamika permasalahan yang muncul pada saat proses kegiatan.

Keberhasilan suatu organisasi mencapai tujuan yang diharapkan, wajib diusahakan bahkan diwujudkan oleh anggota organisasi termasuk pengembangan program yang didalamnya terdapat kumpulan pendapat, saran, motivasi dan membentuk suatu kesepakatan dalam melakukan inovasi terkait program yang akan dijalankan(Fais, 2014).

12. Prinsip Kepemimpinan

Seorang pemimpin adalah seorang yang bertanggung jawab atas program ataupun kegiatan yang sedang dan akan berlangsung. Seorang pemimpin juga harus memiliki wibawa kepemimpinan agar dapat disegani, dihormati bahkan dihormati oleh anggota organisasi ataupun bawahan dalam pekerjaan. Pada aplikasinya, seorang pemimpin menjadi panutan bahkan role model oleh para bawahan, sehingga cara – cara kepemimpinan yang baik dan berwibawa harus selalu dimiliki oleh seorang pemimpin, dan pemimpin juga harus bisa menjadi penunjuk arah ataupun pengarah kegiatan agar hasil pekerjaan ataupun tujuan kegiatan dapat tercapai(Fais, 2014).

Menurut Notoatmodjo dalam Alamsyah (2011) menjelaskan tentang pengertian dari manajemen kesehatan yang merupakan suatu pelaksanaan manajerial yang secara keseluruhan mengarah pada suatu sistem pelayanan kesehatan masyarakat, dan yang dimaksud dengan sistem adalah suatu keutuhan, suatu kesatuan yang terdiri dari subsistem yang didalamnya saling keterkaitan membangun suatu proses dan struktur yang mengupayakan agar tercapainya suatu tujuan. Oleh karena itu, berbicara tentang manajemen pelayanan kesehatan, maka didalamnya terkait dengan struktur, sistem, dan standard dari pelayanan kesehatan yang ada di puskesmas maupun rumah

sakit, dan tentunya mencakup beberapa aspek seperti tindakan kuratif, rehanilitatif, romotif dan preventif.

Pelayanan kesehatan merupakan bagian dari manajemen kesehatan, yang bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan serta mencegah terjadinya penyakit dan penularan penyakit. Sasaran utama dalam pelayanan kesehatan ini adalah masyarakat baik masyarakat berisiko tinggi maupun masyarakat dengan risiko rendah, masyarakat perkotaan maupun masyarakat pedesaan, tua maupun muda, karena ruang lingkup dari pelayanan kesehatan menyangkut semua orang dan hak setiap anggota masyarakat dalam memperoleh layanan kesehatan secara holistik dan menyeluruh. Kualitas pelayanan kesehatan yang diberikan mengacu pada mutu dan standard pemberian layanan kesehatan Alamsyah (2011).

Pemerintah berperan penting dalam pelayanan kesehatan, karena semua hal terkait dengan pelaksanaan regulasi, kebijakan terkait kesehatan, program kesehatan, maupun standard oprasional pelayanan kesehatan diawasi dan harus dilakukannya monitoring dan evaluasi oleh pemerintah yang terkait dalam hal ini puskesmas setempat dan dinas kesehatan yang terkait. Semua bentuk layanan kesehatan terkait dengan SOP baik di puskesmas maupun rumah sakit harus sesuai dengan standard operasional kesehatan nasional, dimana terkait dengan hak pasien maka petugas kesehatan wajib memberikan pelayanan kesehatan pada semua pasien tanpa membedakan – bedakan pasien satu dengan yang lainnya. Adapun tentang adanya gratifikasi dan kolusi dalam pelayanan kesehatan di rumah sakit, maka pemerintah perlu untuk meluruskan sistem pelayanan kesehatan rumah sakit, agar dapat berjalan sebagaimana mestinya.

Dalam menjalankan pelayanan kesehatan, maka perlu dilakukannya tahap perencanaan kesehatan berdasarkan teknik pemecahan masalah (problem solving). Dalam melakukan

perencanaan kesehatan maka terdapat langkah – langkah untun bertujuan dalam mengatasi permasalahan kesehatan yang dimulai dari identifikasi masalah kesehatan, penetapan prioritas masalah kesehatan, menetapkan tujuan, rencana kerja dan rumusan kegiatan atau pelaksanaan tindakan penyelesaian masalah,penetapan sasaran, pengorganisasian atau sumber daya manusia, pembiayaan, serta evalusi dan penilaian program Alamsyah (2011).

1. Identifikasi Masalah Kesehatan

Dalam perencanaan kesehatan perlu dilakukannya identifikasi masalah kesehatan seperti menelusuri jenis – jemis penyakit yang ada dimasyarakat kemudian mencari tau dalam bentuk analisa masalah terkait dengan jenis masalah kesehatan yang ditemui. Identifikasi masalah ini juga bisa diperoleh dari laporan masyarakat terkait dengan masalah kesehatan yang dialami, sehingga berdasarkan informasi tersenut, petugas kesehatan dapat melakukan penelusuran yang disebut dengan tressing data, dimana keterkaitan munculnya masalah kesehatan tersebut dapat teridentifikasi ataupun dapat diketahui secara jelas. Disasankan pada proses ini peran serta puskesmas sangat penting karena puskesmas meerupakan ujung tombak pelayanan kesehatan. Alamsyah (2011).

2. Menetapkan Prioritas Masalah

Setelah petugas telah melakukan identifikasi masalah, dan melalui tahap analisa situasi, maka langkah selanjutnya adalah penetapan prioritas masalah yang akan dilakukan tahapan penyelesaian masalah. Penetapan prioritas masalah dapat juga dibuat dalam bentuk pohon masalah agar dapat dengan jelas tergambar akar permasalahan, alasan ditetapkannya penyakit tersebut sebagai masalah kesehatan dan apa saja yang harus dilakukan untuk mengatasi permasalahan kesehatan tersebut.

Pada saat dilakukannya identifikasi masalah, biasanya petugas membuat daftar masalah kesehatan yang ditemui, dan pada saat penetapan prioritas masalah, petugas akan memilih prioritas masalah kesehatan yang paling besar dan menjadikannya fokus utama dalam penyelesaian masalah kesehatan. Dalam menentukan prioritas masalah menggunakan pohon masalah, biasanya petugas akan memilih 3 masalah kesehatan yang menjadi fokus penyelesaian masalah kesehatan. Dalam menetapkan prioritas atau fokus masalah kesehatan, petugas harus melakukan pengecekan dan penilaian terhadap besaran masalah yang ditemui, dampak masalah kesehatan pada masyarakat, hingga tingkat keberhasilan penanganan masalah kesehatan, serta sumber daya manusia dan sumber daya sarana prasarana yang memungkinkan dalam penyelesaian masalah kesehatan tersebut Alamsyah (2011).

3. Menetapkan Tujuan

Setelah petugas telah menetapkan 3 rioritas masalah yang akan ditangani, maka selanjutnya ptugas akan menetapkan tujuan dari penyelesaian masalah kesehatan yang dipilih berdasarkan hasil observasi dan analisis masalah kesehatan yang telah dibuat sebelumnya. Penetapan tujuan penyelesaian masalah kesehatan dibuat menjadi dua bagian yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Dimana, pada tujuan umum, menggambarkan secara umum tujuan dari penanganan permasalahan kesehatan, dan tujuan khusus menggambarkan secara khusus tujuan – tujuan yang ingin dicapai dalam penyelesaian masalah kesehatan Alamsyah (2011).

4. Rumusan Kegiatan Atau Pelaksanaan Tindakan Penyelesaian Masalah

Menurut Notoadmodjo dalam Alamsyah (2011) menjelaskan tentang rumusan kegiatan yang akan

dilaksanakan sebagai tindakan dari penyelesaian masalah adalah berupa susunan kegiatan – kegiatan yang akan dilakukan selanjutnya untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Sedangkan menurut Azrul Anwar Dalam Alamsyah (2011) berpendapat bahwa, pada rumusan kegiatan yang akan dilakukan berupa aktifitas atau kegiatan tersencana yang kemudian akan dilaksanakan sebagai tindakan penyelesaian masalah kesehatan. Sehingga pada tahap ini, petugas melakukan upaya – upaya yang terencana dalam bentuk susunan kegiatan yang dimulai dari tahap persiapan, dimana pada tahap ini petugas mengadakan pertemuan dan koordinasi dengan pihak terkait baik berupa organisasi kesehatan yang dibentuk maupun berupa advokasi lini sektor yang terkait. Kemudian susunan yang kedua, petugas yang telah bergabung dalam satu tim ataupun organisasi kesehatan, melaksanakan kegiatan penyelesaian masalah kesehatan misalnya dimulai dengan tahapan penyuluhan kesehatan sebagai upaya dalam pemberian informasi ataupun edukasi tentang masalah kesehatan yang didapatkan kemudian sebagai upaya untuk mempublikasikan cara pencegahan yang harus dilakukan oleh masyarakat agar tetap sehat dan terhindar dari masalah kesehatan. Tindakan – tindakan penyelesaian selanjutnya dapat berupa pemeriksaan kesehatan yang bertujuan untuk memantau status kesehatan dan penilaian risiko terjadinya penyakit. Dan tindakan – tindakan selanjutnya akan disesuaikan dengan permasalahan kesehatan yang didapatkan berupa penyusunan aturan, kebijakan, maupun protokol kesehatan yang disusun dan ditetapkan oleh pemerintah untuk wajib dilakukan.

5. Menetapkan Sasaran

Menentukan sasaran dalam suatu kegiatan adalah bagian dari tujuan kegiatan agar kegiatan penyelesaian

masalah kesehatan dapat dilakukan sesuai rencana pada kelompok yang menjadi sasaran atau efektif diberikan tepat sasaran. Adapun sasaran kegiatan yang dimaksudkan yaitu kelompok orang yang memiliki kecenderungan atau berisiko, berpotensi, untuk terdampak masalah kesehatan tersebut. Secara umum, sasaran tindakan penyelesaian masalah kesehatan, adalah masyarakat pada umumnya, namun jika disesuaikan dengan tujuan dan prioritas penyelesaian masalah maka sasaran penyelesaian masalah ditujukan pada kelompok – kelompok berisiko dan tepat seperti misalnya masalah kesehatan pada penyakit hipertensi, diabetes, dan asam urat, lebih cenderung pada kelompok masyarakat usia lanjut, maka yang menjadi sasaran penyelesaian masalah kesehatan adalah kelompok masyarakat usia lanjut. Begitu juga dengan penyelesaian masalah kesehatan lainnya, sasaran ditentukan berdasarkan kelompok dengan risiko tinggi Alamsyah (2011).

6. Pengorganisasian (Sumber Daya Manusia)

Sumber daya manusia berperan penting dalam penyelesaian masalah kesehatan dimasyarakat. Sumber daya manusia yang dibentuk pada suatu tim atau organisasi kesehatan telah dibentuk, disusun, dipilih dan diarahkan pada suatu tujuan tertentu. Suatu organisasi kesehatan terdiri dari sekumpulan orang dengan kompetensi yang memadai dalam suatu bidang kesehatan tertentu dan memiliki keterampilan yang cukup dalam menyelesaikan masalah kesehatan. Komponen yang paling dibutuhkan dalam pengorganisasian ini adalah kerja sama tim yang baik, penyusunan kerangka kegiatan yang baik dan terstruktur, serta susunan organisasi yang jelas dan tepat sesuai dengan bidang keahlian Alamsyah (2011).

7. Anggaran Kegiatan

Anggaran kegiatan adalah rencana pembiayaan yang akan digunakan pada suatu kegiatan penyelesaian masalah kesehatan, karena pada dasarnya ketersediaan anggaran sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan suatu program atau kegiatan. Setiap jenis atau program kesehatan memiliki jumlah pembiayaan yang berbeda karena besaran anggaran yang digunakan yang berbeda, lokasi kegiatan yang mungkin saja berbeda, sasaran dan jumlah sasaran program yang berbeda, jumlah sumber daya manusia yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan, serta banyaknya sarana dan prasarana yang digunakan pada program tersebut. Adapun biaya – biaya yang digunakan pada program penyelesaian masalah kesehatan diantaranya terkait dengan pembiayaan sumber daya yang didalamnya terkait dengan kompensasi jasa dan kontribusi sumber daya manusia, pembiayaan operasional program yang didalamnya mencakup alat, bahan, perlengkapan, dan fasilitas yang digunakan dalam menjalankan suatu program atau kegiatan, kemudian biaya penilaian yang mencakup penyusunan laporan keuangan, tindakan evaluasi dan audit keberhasilan program Alamsyah (2011).

8. Evaluasi Dan Penilaian Program

Evaluasi suatu kegiatan yang terencana sangat penting untuk dilakukan, mengingat program – program yang dilakukan memiliki tujuan untuk terciptanya suatu perubahan dan diharapkan setiap program yang dijalankan memiliki manfaat dan dampak yang baik dalam penanggulangan masalah kesehatan. Tujuan dari evaluasi kegiatan ini salah satunya adalah untuk memonitoring pelaksanaan program kesehatan yang berjalan, kemudian berdasarkan hasil evaluasi, dilakukan analisis kembali tingkat keberhasilan atau capaian program kesehatan, pada tahap ini juga, petugas atau organisasi dapat melakukan

modifikasi terkait dengan rencana kegiatan, prosedur pelaksanaan kegiatan, bahkan jika didapati terdapat kendala maka akan dilakukan peninjauan kembali serta merumuskan solusi yang akan dilakukan untuk meminimalisir bahkan menghilangkan kendala yang ditemui agar tercapainya tujuan dari program kesehatan. Penilaian program kesehatan yang telah dilakukan bertujuan untuk meninjau besaran dampak positif yang terjadi ketika suatu program telah terlaksana, serta memutuskan apakah program ini dapat dilaksanakan secara berkelanjutan pada setiap daerah, ataukah perlu adanya perbaikan sesuai dengan regulasi dan situasi yang terjadi di lapangan Alamsyah (2011).

9.6 Organisasi Pelayanan Kesehatan

Organisasi pelayanan kesehatan dapat berupa fasilitas – fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, maupun klinik – klinik kesehatan. Dalam menjalankan tugas di fasilitas kesehatan diperlukan orang – orang yang mampu bekerja baik dalam hal yang bersifat promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif. Arah dari pelayanan kesehatan adalah berkaitan dengan mutu layanan kesehatan pada pasien yang datang dengan berbagai keluhan dan berhak memperoleh pelayanan yang terbaik, ditangani dengan baik, hingga berkewajiban membuat pasien merasa aman dan nyaman selama diberikan perawatan maupun pengobatan Alamsyah (2011).

Organisasi pelayanan kesehatan merupakan suatu sistem bahkan sarana pelayanan kesehatan yang berupaya memberikan pelayanan kesehatan terbaik dan menyeluruh bagi masyarakat yang mengalami masalah kesehatan serta bertugas memberikan informasi ataupun edukasi terkait dengan permasalahan kesehatan yang perlu dihindari agar menuju kehidupan masyarakat yang sehat, dan meningkatnya derajat kesehatan masyarakat.

Organisasi pelayanan kesehatan berperan penting dalam terbentuknya pembangunan kesehatan dimana salah satu inti dari pelayanan kesehatan adalah membentuk paradigma sehat yang ada dimasyarakat, karena pembangunan kesehatan lebih cenderung mengarahkan fokusnya pada tindakan kuratif maupun rehabilitatif sehingga organisasi pelayanan kesehatan saat ini berupaya merubah fokus pembangunan kesehatan pada upaya preventif dan promotif, namun tidak mengesampingkan tindakan kuratif dan rehabilitatif, dimana jika masyarakat paham tentang masalah kesehatan masyarakat dan terampil serta bijak dalam menjaga dan mempertahankan kesehatan, maka angka kesakitan akan menurun dan derajat kesehatan masyarakat akan naik. Semakin banyak masyarakat yang sakit, maka beban negara dalam memberikan pelayanan kesehatan semakin tinggi, dan jika masyarakat bijak dalam menjaga kesehatan, serta berkomitmen untuk merubah perilaku tidak sehat menjadi perilaku sehat, maka dapat mengurangi sedikitnya 30% beban negara dalam pelayanan kesehatan masyarakat.

Untuk berjalannya fungsi dari suatu manajemen maka perlu adanya pengawasan dan pengarah yang bertugas untuk mengarahkan, mengukur, mempertimbangkan, bahkan memutuskan dalam kaitannya dengan kebijakan kesehatan, dimana suatu kegiatan atau program kesehatan wajib dilakukan dan sepatutnya berjalan secara optimal. Suatu program dapat dikatakan berhasil dan layak untuk diberlakukan di seluruh wilayah (daerah) di Indonesia jika telah menempuh berbagai kriteria seperti tujuan program dapat diimplementasikan, tercapainya target dari suatu program, program yang dilaksanakan tepat sasaran, memiliki dampak pada perubahan status kesehatan masyarakat, dapat dengan mudah dipahami dan dilaksanakan oleh kelompok sasaran, antusiasme masyarakat terhadap program meningkat, serta masalah kesehatan mengalami penurunan kasus. Pengarah kesehatan akan melihat

dari sisi kuantitas dan kualitas dari suatu program, apakah tepat sesuai dengan fenomena masalah kesehatan yang terjadi dilapangan, kemudian pentingnya akses masyarakat untuk memperoleh informasi kesehatan, serta cara kerja tim atau organisasi serta keterlibatan pimpinan dalam pelaksanaan program kesehatan ini Alamsyah (2011).

Penilaian program kesehatan dapat dilakukan dalam tiga tahap, yaitu tahap yang pertama merupakan tahap dimana tim atau organisasi memastikan bahwa program yang dijalankan telah sesuai dengan masalah kesehatan yang ditemui, memastikan apakah program telah tepat sasaran, dan pada tahap ini tim atau organisasi memastikan bahwa anggaran, fasilitas sarana prasarana, bahan dan alat yang dibutuhkan telah tersedia dan siap digunakan pada proses kegiatan Alamsyah (2011).

Tahap yang kedua merupakan tahap dimana program atau kegiatan telah dijalankan, sehingga pada tahap ini penilai sudah bisa mengukur seberapa efisien dan efektif program ini dijalankan, apakah program ini berjalan sesuai dengan rencana, dan apakah sumber daya manusia cukup untuk memenuhi berjalannya program ini. Pada tahap ini juga, penilai sudah dapat melihat tentang alokasi dana yang diperuntukan pada program kesehatan, apakah disalurkan dengan baik atau mengalami kendala. Segala bentuk kendala berjalannya program ini sudah dapat dilihat pada tahap ini Alamsyah (2011).

Pada tahap ketiga penilaian program, dilakukan untuk melihat besaran dampak yang terjadi setelah dilaksanakan program ini, sehingga pada tahap ketiga ini, penilai dapat menilai sejauh mana tingkat keberhasilan program yang sudah terlaksana, serta dampak pada perubahan status kesehatan masyarakat. Diharapkan setelah terlaksananya program kesehatan ini, maka bisa terjadinya perubahan yang signifikan terhadap status kesehatan masyarakat, dimana hal tersebutlah yang menjadi tujuan dari pelaksanaan program kesehatan

masyarakat. Sebagai contoh, terdapat program kesehatan masyarakat yang hingga saat ini masih terus digalakan yaitu Germas (Gerakan Masyarakat Hidup Sehat) 7 pilar Germas ini masih terus digalakan karena belum sepenuhnya diketahui masyarakat, dan pelaksanaannya cenderung lambat, dan tidak menjadi prioritas utama dalam pemberian layanan kesehatan, padahal jika dilihat dari susunan tujuan dari program Germas ini, apabila diimplementasikan dengan baik oleh seluruh masyarakat, maka derajat kesehatan di Indonesia dapat meningkat, terutama terhindar dari adanya penularan penyakit dan terjadinya penyakit tidak menular (PTM) atau biasanya disebut dengan penyakit degeneratif Alamsyah (2011).

9.7 Penjaminan Mutu Pelayanan Kesehatan

Mutu adalah tingkatan baik atau buruk sesuatu yang dilakukan ataupun sesuatu yang dikerjakan. Mutu mengarah pada kualitas yang dapat mengukur taraf ataupun derajat sesuatu. Penjaminan mutu pelayanan kesehatan adalah suatu ukuran atau tingkatan kualitas pelayanan kesehatan yang diberikan oleh petugas kesehatan baik di puskesmas maupun di rumah sakit. Mutu pelayanan kesehatan berkaitan dengan sistem pelayanan kesehatan yang diatur oleh adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan. Standard pelayanan kesehatan menjadi jaminan tingkatan kualitas ataupun mutu pelayanan yang diberikan, oleh sebab itu ketersediaan informasi terkait prosedur pelayanan kesehatan di puskesmas maupun di rumah sakit sangat perlu untuk diberikan kepada masyarakat, dalam hal ini pasien yang akan datang berkunjung. SOP tentang pelayanan kesehatan dapat disosialisasikan pada pasien dalam bentuk informasi alur pelayanan kesehatan, mulai dari tahap registrasi, hingga pada tahap pengobatan maupun perawatan kesehatan. Kurangnya informasi, menjadi salah satu hal yang membuat kualitas pelayanan atau mutu pelayanan kesehatan

menjadi dipandang tidak baik oleh pasien dan memunculkan reaksi ketidakpuasan terhadap suatu pelayanan kesehatan (Bustami, 2011).

Pada dasarnya dalam suatu rumah sakit, pelayanan kesehatan merupakan aspek penting yang harus dijalankan dengan baik. Pelayanan kesehatan di rumah sakit merupakan produk yang harus dilaksanakan secara terus menerus setiap hari karena pelayanan kesehatan adalah inti dari semua kegiatan di puskesmas maupun di rumah sakit. Sehingga, kepuasan pasien menjadi tolak ukur dari mutu pelayanan kesehatan yang diberikan, dan untuk melaksanakan penjaminan mutu pelayanan kesehatan maka diperlukan adanya organisasi kesehatan berupa susunan manajerial yang terdiri dari sekelompok orang dalam menyusun, menerapkan bahkan mengelola sumber daya manusia untuk bekerja pada suatu sistem manajemen pelayanan kesehatan yang berkelanjutan, serta wajib untuk memberikan layanan yang terbaik (Bustami, 2011).

Tujuan dari mutu pelayanan kesehatan adalah membuat pengunjung, pasien, maupun petugas kesehatan berada pada satu sistem yang sama, yang didalamnya menjamin adanya keselamatan kerja dan keselamatan pasien secara utuh, sehingga petugas dapat melakukan penanganan kesehatan secara tepat dan pasien akan mendapatkan pelayanan sesuai dengan kondisi yang dialami (Bustami, 2011).

Tercapainya mutu pelayanan kesehatan didasarkan pada standard pelayanan kesehatan yang terlaksana dengan baik. Standard pelayanan kesehatan yang akan dijalankan harus sesuai dengan tujuan dari pelayanan kesehatan sehingga setiap kegiatan yang dilakukan dapat terintegrasi dengan baik sesuai dengan kebutuhan layanan kesehatan. Standar pelayanan kesehatan harus benar – benar jelas dijalankan di puskesmas maupun rumah sakit berdasarkan ukuran yang telah ditetapkan yakni terkait dengan value tujuan yang akan dicapai, dirancang

berdasarkan kriteria secara profesional, memiliki batasan atau pencapaian tertinggi atas hasil yang diharapkan, berisi tentang uraian kegiatan yang spesifik terhadap pelayanan kesehatan, dan mengacu pada visi dan misi rumah sakit terkait dengan pelayanan kesehatan(Bustami, 2011).

9.8 Peran Komunikasi Pimpinan Dalam Proses Manajemen Sumber Daya Manusia

Manajemen dapat berperan secara interpersonal dimana dalam satu tim manajerial perlu adanya kerjasama tim yang baik dan tidak saling menjatuhkan. Kerja sama tim yang paling nampak terlihat adalah relasi atau kerjasama antara atasan dan bawahan, dimana hubungan interpersonal antara atasan dan bawahan merupakan jalinan atau relasi yang tercipta secara berpatutan artinya hubungan atasan dan bawahan merupakan hubungan yang saling membutuhkan satu sama lain, begitu pula dengan tim suatu manajemen, dimana satu tim atau suatu manajemen merupakan satu kesatuan yang harus berjalan secara bersama – sama menuju satu tujuan bersama.Kebutuhan informasi sebagai jaringan penghubung pada hubungan interpersonal sangat penting karena untuk menumbuhkan iklim kebersamaan dan kerjasama tim yang solid maka perlu adanya sistem pendukung untuk bisa menyatukan keselarasan yang tumbuh dalam suatu manajemen organisasi. Peran pimpinan manajemen atau organisasi juga sangat penting untuk bisa menyatukan dan menyelaraskan hubungan interpersonal dalam suatu manajerial(Siagian, 2015).

Manajemen dapat berperan secara informasional, dimana yang dimaksud dengan hubungan peranan informasional adalah atasan yang menjadi pusat informasi dan pemberi arahan dan tugas bagi para anggota manajemen, sehingga segala bentuk arahan berupa informasi yang diberikan wajib dijalankan dengan baik dan terstruktur oleh anggota manajemen. Kualitas pekerjaan

dan tercapainya tujuan dari pekerjaan bergantung pada kejelasan informasi yang diberikan oleh atasan untuk dijalankan sebagaimana mestinya. Kurangnya informasi atau terbatasnya informasi yang diberikan oleh atasan terkait proses pekerjaan akan menghambat tujuan utama yang ingin dicapai dalam suatu pekerjaan. Atasan yang bertindak sebagai pengarah, pengatur, bahkan engelola berhak untuk memberikan tugas, arahan, bahkan menuntun bawahan untuk bisa mengintegrasikan pekerjaannya dalam suatu sistem pekerjaan yang tersusun. Sebaliknya, jika bawahan tidak menjalankan pekerjaan sesuai dengan arahan, himbauan, dan informasi dari atasan, maka akan menghambat tercapainya tujuan pekerjaan (Siagian, 2015).

Produktifitas kerja sangat dibutuhkan dalam suatu tempat kerja baik dalam bekerja maupun dalam memberi informasi dan arahan pekerjaan. Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang dapat menjadi teladan dan motivasi bagi bawahan dalam bekerja, suasana dan iklim kerja yang baik juga akan menumbuhkan produktifitas kerja orang – orang yang bekerja disuatu tempat kerja. Oleh sebab itu, manajemen perlu membuat aturan terkait dengan kesejahteraan pekerja seperti pemberian waktu istirahat yang cukup, jam kerja yang cukup dan tidak berlebihan, jika perlu diadakannya lembur kerja maka pemimpin bisa memberikan tambahan tunjangan lembur ataupun memberlakukan waktu cuti karyawan bagi yang membutuhkan waktu istirahat yang lebih panjang. Seorang pemimpin yang bersifat otoriter akan cenderung menumbuhkan iklim kerja yang tidak baik di tempat kerja, dan pekerja yang bekerja dibawah tekanan cenderung mengalami stress kerja akibat dari kelelahan kerja serta berdampak pada melemahkan produktifitas kerja. Seperti yang diketahui bahwa melemahnya produktifitas kerja pekerja dapat mengganggu proses produksi, misalnya pekerja yang bekerja di rumah sakit dengan produktifitas kerja yang kurang, maka dapat berpontensi terjadinya kesalahan dalam memberikan layanan

kesehatan. Masalah pekerja secara psikologis terkait dengan stress kerja dan kelelahan kerja, dapat berpotensi terjadinya kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja bagi pekerja yang bekerja. Salah satu aspek untuk menumbuhkan minat kerja dan produktifitas kerja adalah dengan memberikan reward pada pekerja atau bawahan dapat berupa pujian etos kerja bagi pekerja berprestasi, pemberian kesempatan bagi pekerja yang mungkin akan melanjutkan study pengembangan pengetahuan dan karir, reward berupa gaji, ataupun waktu kebersamaan pekerja berupa senam bersama, rekreasi dll(Siagian, 2015).

Peran selaku pengambil keputusan tentunya setiap tempat kerja pasti berbeda – beda demikian pula dengan sifat dan karakter orang pasti berbeda – beda, sehingga cara dalam memberi arahan informasi, maupun bimbingan cenderung berbeda. Pimpinan dalam suatu pekerjaan terdapat 2 tipe yaitu top down (dari atas kebawah) tipe yang kedua bottom up (dari bawah keatas. Pemimpin yang bersifat top down adalah pemimpin yang melakukan pendekatan ataupun pemberian arahan dan informasi kepada bawahannya sesuai dengan apa yang telah ditetapkan sendiri oleh pemimpin tersebut, sehingga pemimpin yang bersifat top down cenderung disegani dan dihormati, karena tegas dalam memberikan arahan, type kepemimpinan bersifat top down dapat menjadi sifat pemimpin positif jika dalam pelaksanaannya pemimpin tidak memanfaatkan kekuasaannya dalam memberikan arahan ataupun membuat suatu keputusan. Pengambilan keputusan oleh pimpinan sekiranya merupakan kebijakan untuk kepentingan pekerjaan, sebagai upaya untuk memajukan suatu tempat kerja, dan mengarah pada tujuan yang bernilai, tidak memiliki unsur menjatuhkan orang lain bahkan pembunuhan karakter, namun kebijakan yang membawa iklim disiplin kerja, keteraturan bahkan keselarasan yang harmonis di tempat kerja. Type yang kedua adalah bottom up artinya adalah pemimpin yang bersifat

bottom up adalah arahan dan informasi yang diberikan yang sebagian besar disuarakan atau disarankan oleh bawahan atau berupa rekomendasi dari bawahan terkait dengan iklim kerja yang baik, keteraturan kerja, perbaikan untuk terjadinya perkembangan, serta bermanfaat positif untuk semua pekerja. Pemimpin dengan sifat bottom up cenderung menjadi sahabat dari semua pekerja karena mampu menampung aspirasi dan pendapat dari bawahan namun, sifat bottom up ini dapat menjadi sifat yang positif apabila dalam keputusan pemimpin menerima masukan dan rekomendasi bawahan ini tidak memiliki unsur untuk menjatukan rekan kerja yang lain, ataupun merubah sistem inti dari pelaksanaan pekerjaan. Sehingga pemimpin yang bersifat bottom up ini merupakan pemimpin yang memiliki sifat bijaksana dengan selalu mengutamakan perbaikan atau pembenahan untuk berkembang serta mengutamakan kenyamanan kerja bagi pekerja yang bekerja di suatu tempat kerja(Siagian, 2015).

DAFTAR PUSTAKA

- Alamsyah. 2011. Manajemen Pelayanan Kesehatan. Yogyakarta: Nuha Medika
- Bustami. 2011. Penjaminan Mutu Pelayanan Kesehatan & Akseptabilitasnya. Jakarta : Erlangga
- Fais. 2014. Organisasi Manajemen Dan Pelayanan Kesehatan. Jakarta : Salemba Medika
- Faustino. 2003. Manajemen Sumber Daya Manusia. Yogyakarta : Andi
- Irene. 2020. Komunikasi Organisasi. Surabaya : PT Scopindo Media Pustaka
- Siagian. 2015. Sistem Informasi Manajemen. Jakarta : Bumi Aksara

BIODATA PENULIS



Mila Sari, S.ST, M.Si

Dosen STIKES Dharma Landbouw Padang

Penulis dilahirkan di Pilubang, 13 Mei 1989. Penulis adalah dosen tetap pada Program Studi Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan, Universitas Fort De Kock Bukittinggi. Menyelesaikan pendidikan D3 dan D4 pada Jurusan Kesehatan Lingkungan Politeknik Kesehatan Kemenkes Padang dan melanjutkan S2 pada Jurusan ilmu Lingkungan Universitas Negeri Padang. Penulis menekuni bidang ilmu lingkungan dan kesehatan lingkungan. Penulis dapat dihubungi melalui email : milasari111326@gmail.com atau nomor telepon 081374464054

BIODATA PENULIS



Prof. Dr. Ir. Nurliita Pertiwi, M.T

Dosen Program Studi Doktoral Pendidikan Kependudukan dan Lingkungan Hidup Program Pasca Sarjana Universitas Negeri Makassar

Penulis lahir di Palembang tanggal 02 April 1969. Penulis Adalah guru besar di bidang Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan dan bertugas sebagai dosen tetap pada Doktoral Pendidikan Kependudukan dan Lingkungan Hidup Program Pascasarjana Universitas negeri Makassar.

Penulis menyelesaikan pendidikan S1 pada Jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin. Selanjutnya pendidikan megister diselesaikan padamprogram studi Teknik Sipil Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin. Penulis menyelesaikan pendidikan Dokto pada Program Studi Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan pada Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor pada tahun 2011.

Penulis telah menulis beberapa buku referensi diantaranya adalah Implementasu Sunstainable Development di Indonesia, Beton Ramah Lingkungan dan Ilmu Bahan Bangunan.

BIODATA PENULIS



Dr. dr. Elsa Yuniarti, S.Ked, M.Biomed, AIFO-K
Dosen di Universitas Negeri padang

Dr. dr. Elsa Yuniarti, S.Ked, M.Biomed, AIFO-K, Lahir di Bandung 23 Juni 1982. Memperoleh gelar Sarjana Kedokteran di Universitas Andalas, memperoleh gelar Magister Biomedik di Universitas Andalas, serta memperoleh gelar Doktor di Universitas Negeri Padang, dan telah berkarir lama menjadi dosen di Universitas Negeri padang. Beliau sangat aktif dalam bidang akademik, penelitian, pengabdian masyarakat dan penulisan karya ilmiah, serta telah banyak berpartisipasi di berbagai kegiatan. Beliau juga anggota Pusat Penelitian Kependudukan dan Lingkungan Hidup Universitas Negeri Padang.

BIODATA PENULIS



Prof. Gufran Darma Dirawan, M.EMD

Dosen Program Studi Doktoral Pendidikan
Kependudukan dan Lingkungan Hidup Program Pasca
Universitas Negeri Makassar

Penulis lahir di Makassar pada tanggal 13 Februari 1971. Penulis merupakan Dosen tetap pada Universitas Negeri Makassar (UNM) pada program studi S2/S3 Pendidikan Kependudukan dan Lingkungan Hidup (PKLH), Penulis menyelesaikan Pendidikan dasar dan menengah di Ujung pandang. Menyelesaikan S1 pada program studi Teknik Sipil konsentrasi Transportasi pada Universitas Hasanuddin, Graduate Diploma dan Master pada program studi Environmental Management Development pada National Center of Development Studies (The NCDS), The Australian National University (The ANU) dan S3 pada program studi Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan (PSL) pada Institut Pertanian Bogor. Penulis juga secara fungsional menjabat Guru Besar dalam bidang PSL pada Universitas Negeri Makassar. Penulis dalam melaksanakan tugasnya pernah menjadi Visiting professor pada University Canberra, The University Queensland di Australia, Keio University Jepang, Temple University, Yale university di Amerika Serikat

dan menjadi International Expert pada Universty Technology Malaysia. Disamping itu pernah menjabat sebagai Sekertaris Pusat Penelitian Kependudukan dan Lingkungan Hidup, Direktur Manajemen Asset, Ketua program studi S2/S3 PKLH PPS UNM, Wakil Rektor bidang Kerjasama dan Pengembangan UNM, serta Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan propinsi Sulawesi Barat.

BIODATA PENULIS



Yosef Adicita, S.Fil., M.Sc.

Dosen Program Studi Teknik Lingkungan
Fakultas Teknik Universitas Universal Batam

Penulis lahir di Bekasi tanggal 31 Januari 1989. Penulis adalah dosen tetap pada Program Studi Teknik Lingkungan Fakultas Teknik, Universitas Universal. Menyelesaikan pendidikan S1 dan S2 di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Penulis selain berprofesi sebagai pengajar juga menekuni Penelitian pada bidang Infrastruktur dan dampak Lingkungan. Penulis juga merupakan Koordinator bidang profesi IATPI (Ikatan Ahli Teknik Penyehatan Lingkungan Indonesia) Provinsi Kepulauan Riau dengan masa bakti 2019-2024. Penulis yang memiliki keahlian bidang energi terbarukan dan infrastruktur lingkungan ini juga Aktif sebagai Tutor dan pembicara internal mengenai edukasi pemanfaatan Infrastruktur lingkungan bagi pembangunan masyarakat.

BIODATA PENULIS



Nur Rohim Yunus

Dosen Bidang Hukum Tata Negara
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Nur Rohim Yunus adalah santri alumni Pondok Modern Darussalam Gontor (1999) & ISID (2002). Meraih gelar Master of Law (LL.M) dari International Islamic University (IIU) Islamabad Pakistan (2009) dan Program Doktor (Ph.D) di GUU (Gosudarstvennyy Universitet Upravleniya) Moscow Russia (2022).

Saat ini menjabat sebagai Direktur Eksekutif Pusat Studi Konstitusi dan Legislasi Nasional (POSKOLEGNAS) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Selain aktif juga dalam kegiatan organisasi seperti Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Russia sebagai dewan pakar, anggota APHAMK Jakarta, anggota Asosiasi Pengajar HTN-HAN Jakarta, anggota ADI (asosiasi Dosen Indonesia), anggota HISSI (Himpunan Ilmuwan dan Sarjana Syariah Indonesia), pembimbing MCC (Moot Court Community) UIN Jakarta.

BIODATA PENULIS



Fresy Nissia Lumowa,SKM.,M.Kes.

Dosen Program Studi Ilmu Keperawatan. Fakultas Keperawatan. Universitas Katolik De La Salle Manado.

Penulis lahir di Manado, tanggal 7 Oktober 1991. Penulis adalah dosen tetap yayasan pada Program Studi Ilmu Keperawatan. Fakultas Keperawatan. Penulis telah menyelesaikan pendidikan Strata satu di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sam Ratulangi Manado (2009 – 2013), kemudian melanjutkan strata dua di Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat Universitas Sam Ratulangi Manado (2014 – 2016).

Awal karir penulis bermula dari Tenaga Harian Lepas (THL) di Puskesmas Koya Kabupaten Minahasa sebagai tenaga bidang Promosi Kesehatan (2016 – 2017), kemudian penulis juga pernah berkarir di Universitas Negeri Manado Fakultas Keolahragaan Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat (2015 – 2017). Saat ini penulis sebagai dosen tetap yayasan di Universitas Katolik De La Salle Manado (2017 – sekarang) dan telah mendapatkan jabatan fungsional Asisten Ahli (2021). Penulis telah memperoleh 17 Sertifikat yang berkaitan dengan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3) diantaranya 15 Sertifikat

K3 ISO 14001 : 2015, 1 Sertifikat Ahli K3 Umum Kemnaker RI 2022, dan 1 Sertifikat Ahli Hiperkes Dan KK oleh Kemnaker RI 2021. Bidang pengkajian yang menjadi pengampuh penulis di Fakultas Keperawatan Universitas Katolik De La Salle Manado adalah Keselamatan Pasien dan Keselamatan Kesehatan Kerja dalam Keperawatan (K3) Keperawatan, Program Kesehatan Komunitas, Promosi Kesehatan dan Keperawatan HIV – AIDS.